LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan baik sosial maupun ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi, yang meliputi permasalahan kesejahteraan ekonomi, kapasitas maupun inklusi sosial (Wagle, 2009). Kemiskinan terdiri dari segala bentuk ketidakadilan, yang merupakan sumber pengucilan sosial, dalam distribusi kondisi kehidupan yang esensial bagi martabat manusia (Asselin, 2009). Adapun kebutuhan dasar manusia tercermin dalam dimensi antara lain pendapatan, pendidikan, kesehatan, nutrisi/makanan, sanitasi/air bersih, pekerjaan, rumah, akses terhadap aset produktif, akses terhadap pasar dan partisipasi dalam komunitas (Asselin, 2009). Pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun ke belakang juga terbukti memberikan dampak pada kondisi kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat karena adanya penutupan atau pengurangan aktivitas ekonomi (Suryahadi et al., 2020).

Dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan penting untuk melihat bagaimana tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Setelah garis kemiskinan ditentukan, maka profil kemiskinan dapat dianalisis yang kemudian memberikan perkiraan kemiskinan secara keseluruhan, distribusi kemiskinan di seluruh sektor, wilayah, kelompok sosial ekonomi maupun perbandingan antara penduduk miskin dan tidak miskin (Kakwani & Son, 2008). Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Hal ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang disampaikan oleh Worldbank (Haughton & Khandker, 2009). Melalui konsep ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dapat dikelaskan sebagai

penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ravaillion (1998) dalam (Haughton & Khandker, 2009), terdapat tiga langkah untuk menganalisis kemiskinan: (i) Mendefinisikan indikator kesejahteraan,

(ii) Menetapkan standar minimum yang dapat diterima dari indikator tersebut untuk memisahkan yang miskin dari yang tidak miskin (garis kemiskinan), (iii) Membuat ringkasan statistik untuk mengumpulkan informasi dari distribusi indikator kesejahteraan ini relatif terhadap garis kemiskinan. Beberapa pertanyaan penting dalam mendalami kemiskinan di suatu wilayah antara lain: Bagaimana karakteristik rumah tangga miskin? Bagaimana kondisi kemiskinan yang ada apakah sementara atau tetap? Bagaimana pola dan perubahan kemiskinan? Selain itu, perlu diperhatikan pula aspek longitudinal/panel yang lebih luas dari profil kemiskinan - aliran pendapatan seumur hidup, posisi anak-anak, orang sakit dan lanjut usia, kecukupan tabungan, jenis kelamin; dll. Selain itu, penting menggunakan sumber data gabungan untuk penilaian kemiskinan - menggabungkan survei rumah tangga dan sensus penduduk untuk menyusun peta kemiskinan agar profil, karakteristik dan permasalahan kemiskinan dapat dijabarkan secara jelas untuk kemudian dicari upaya-upaya (kebijakan) penanggulangan kemiskinan yang sesuai.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, diperlukan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diimplementasikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan karakteristik kemiskinan masing-masing daerah, karena kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi memiliki kewajiban menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), yaitu dokumen perencanaan yang bertujuan untuk mengurai persoalan kemiskinan. Selain itu, RPKD memberikan ruang fleksibilitas dalam menentukan prioritas penanganan permasalahan di setiap daerah sesuai dengan kondisi daerah yang menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, sosial, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan lain-lain. Untuk itu perlu

disusun RPKD sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan selama 2025 – 2029 guna mewujudkan sinergitas kebijakan dan program kegiatan di Kabupaten Kendal.

B. TUJUAN

RPKD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud :

1. Sebagai arah kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal pada periode tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kendal di bidang penanggulangan kemiskinan selama periode tahun 2025 2029;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan TKPK Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan; dan
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan target pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RKPD) Kabupaten Kendal yaitu :

1. Menjadi instrumen dalam upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan di daerah
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan di bidang penanggulangan kemiskinan
3. Menjadi instrumen sinkronisasi kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian sampai dengan evaluasi di tingkat daerah hingga pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku pembangunan daerah secara inklusif; dan kepentingan
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
19. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;
24. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029;

27. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026;

D. METODE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPKD

Penyusunan Dokumen RPKD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal agar lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran.

Penyusunan RPKD diarahkan untuk memperkuat dan memperdalam substansi dokumen RPJMD melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, pendekatan penguatan substansi perencanaan dan penganggaran daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, RPKD berfungsi untuk melengkapi, mempertajam, dan memperkaya arah kebijakan serta program daerah, dengan memastikan bahwa setiap bagian dalam RPKD mampu memperkuat agenda percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah secara keseluruhan.

Kedua, pendekatan terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah. Melalui pendekatan ini, substansi RPKD diharapkan dapat terintegrasi ke dalam setiap tahapan perencanaan, sehingga isu penanggulangan kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang terarusutamakan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

Ketiga, pendekatan berbasis prioritas wilayah. RPKD diarahkan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah prioritas beserta bentuk intervensi yang dibutuhkan, berdasarkan analisis indikator utama dan indikator pendukung kemiskinan. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan lebih terarah, spesifik, dan sesuai dengan karakteristik serta tingkat kerentanan masing-masing wilayah di Kabupaten

Kendal.

Tahap penyusunan RPKD Kabupaten Kendal tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Kebutuhan Data Kemiskinan

   Tahap awal penyusunan RPKD diawali dengan pemetaan kebutuhan data kemiskinan yang relevan dan mutakhir. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh analisis dan perumusan kebijakan didasarkan pada data yang akurat, baik yang bersumber dari data makro, data sektoral, maupun data by name by address untuk kelompok sasaran.

2. Identifikasi kondisi perekonomian daerah dan karakteristik wilayah yang terdiri dari aspek geografis, topografis, dan demografis

   Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap kondisi perekonomian daerah serta karakteristik wilayah Kabupaten Kendal yang mencakup aspek geografis, topografis, dan demografis. Analisis ini penting untuk memahami keterkaitan antara kondisi wilayah dengan pola dan penyebab kemiskinan yang terjadi di masing-masing kawasan.

3. Identifikasi dan Penentuan Permasalahan Kemiskinan dan Penyusunan Theory of Change berdasarkan kondisi ekonomi dan karakteristik wilayah

   Berdasarkan data dan karakteristik wilayah, dilakukan identifikasi permasalahan utama kemiskinan secara sektoral dan kewilayahan. Tahap ini dilanjutkan dengan penyusunan Theory of Change (ToC) yang menggambarkan hubungan logis antara intervensi program, output, outcome, hingga dampak terhadap penurunan kemiskinan.

4. Penentuan fokus strategi dan strategi prioritas berdasarkan visi – misi bupati dan wakil bupati

   Tahap ini bertujuan merumuskan fokus strategi dan strategi prioritas penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Strategi yang disusun diarahkan untuk menjawab akar permasalahan kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.

5. Penentuan Lokasi prioritas untuk strategi penanggulangan kemiskinan

   Berdasarkan hasil analisis indikator kemiskinan dan kerentanan wilayah, ditetapkan lokasi prioritas sebagai sasaran utama intervensi program. Pendekatan ini memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan tingkat

kebutuhan masing-masing wilayah.

6. Penyusunan Draft

   Hasil analisis, strategi, dan penentuan prioritas kemudian dituangkan dalam bentuk draf dokumen RPKD. Tahap ini mencakup penyusunan substansi kebijakan, rencana aksi, serta kerangka pemantauan dan evaluasi.

7. Perbaikan dan review draft

   Draf yang telah disusun selanjutnya dibahas dan ditelaah bersama perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Proses ini bertujuan menyempurnakan substansi dokumen agar lebih komprehensif, realistis, dan dapat diimplementasikan.

8. Finalisasi dan legalitas dokumen

   Setelah melalui proses perbaikan, dokumen RPKD difinalisasi dan diproses untuk memperoleh pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap ini menandai kesiapan dokumen untuk dijadikan acuan resmi.

9. Implementasi dokumen

   Tahap akhir adalah pelaksanaan RPKD melalui integrasi strategi dan program penanggulangan kemiskinan ke dalam kebijakan dan kegiatan perangkat daerah. Implementasi dilakukan secara terkoordinasi dengan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan.

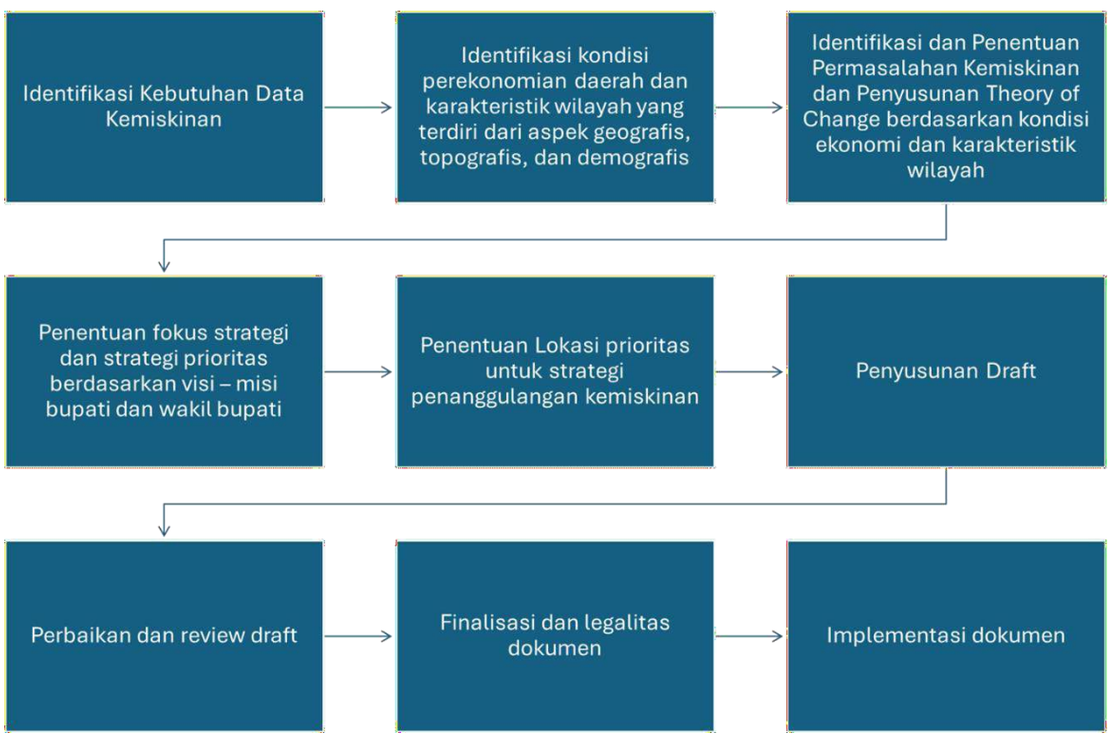

Gambar I-1 Tahapan Penyusunan RPKD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, dasar hukum, metode dan tahapan penyusunan RPKD, sistematika penulisan serta pemanfaatan dokumen RPKD.

2. Bab II Profil Kemiskinan Daerah

Berisi uraian tentang konsep kemiskinan, kondisi kemiskinan daerah, kondisi perekonomian dan karakteristik kewilayahan, analisis kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayah di Jawa Tengah, permasalahan kemiskinan, isu strategis penanggulangan kemiskinan, gambaran keuangan daerah serta pembiayaan non APBD untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Bab III Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Berisi uraian tentang hubungan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada dokumen perencanaan pusat dan daerah, strategi utama penanggulangan kemiskinan, fokus strategi penanggulangan kemiskinan, pentahapan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, program prioritas gubernur dan wakil gubernur, target kemiskinan daerah, prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan.

4. Bab IV Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

Berisi uraian tentang matriks rencana aksi daerah meliputi strategi utama, aktivitas riil, target dan lokasi prioritas.

5. Bab V Penutup

F. PEMANFAATAN DOKUMEN RPKD

Dokumen RPKD yang telah disahkan selanjutnya akan digunakan oleh pihak pemerintah dan non pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan dokumen ini menjadi rujukan dalam pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya. Dokumen RPKD Kabupaten Kendal dimanfaatkan sebagai acuan bersama bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan. Pemanfaatannya dimulai dari penggunaan data kemiskinan sebagai dasar penentuan sasaran kegiatan, sehingga program dan subkegiatan yang direncanakan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dalam proses perencanaan, perangkat daerah mengarahkan kegiatan yang dimiliki agar berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Penentuan lokasi intervensi juga mempertimbangkan wilayah dengan tingkat kerentanan lebih tinggi, sehingga upaya yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran. Di sisi lain, pemangku kepentingan non-OPD turut menyesuaikan programnya dengan arah intervensi daerah melalui koordinasi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Pada tahap pelaksanaan, RPKD berfungsi sebagai rujukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan tetap selaras dengan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah disepakati. Hasil pelaksanaan kegiatan kemudian dilaporkan dan dikomunikasikan kepada TKPK sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan pengendalian program.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan tersebut menjadi bahan dalam proses pemantauan dan evaluasi. Informasi mengenai capaian kegiatan digunakan untuk menilai efektivitas intervensi sekaligus menjadi masukan penting dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya. Dengan demikian, RPKD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen pengarah yang memastikan kesinambungan, keterpaduan, dan peningkatan kualitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

BAB II
PROFIL KEMISKINAN DAERAH

A. KONSEP KEMISKINAN

1 Konsep kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Definisi kemiskinan yang dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik yakni kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun Garis Kemiskinan (GK) menurut BPS mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Selain garis kemiskinan, BPS juga menggunakan Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index (HCI-P0)*) yang merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2. Jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat dikaji baik secara absolut maupun relatif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Namun demikian, kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis

kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas.

Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *Gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : (i) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi, (ii) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah, (iii) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

B. KONDISI KEMISKINAN DAERAH

1 Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal

Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2025 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal berada di kisaran Rp400.000 per kapita per bulan. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal naik sekitar Rp20.000 dari tahun sebelumnya. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana Garis Kemiskinan naik sekitar Rp30.000. Tren kenaikan sebesar sekitar Rp30.000 per tahun ini berlanjut hingga tahun 2024. Pada tahun 2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal mencapai sekitar Rp530.000 per kapita per bulan, meningkat sekitar Rp20.000 dari tahun 2024. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal terus mengalami kenaikan, dari sekitar Rp400.000 pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp530.000 pada tahun 2025. Kenaikan tertinggi terjadi pada periode 2021-2024 dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp30.000 per tahun.

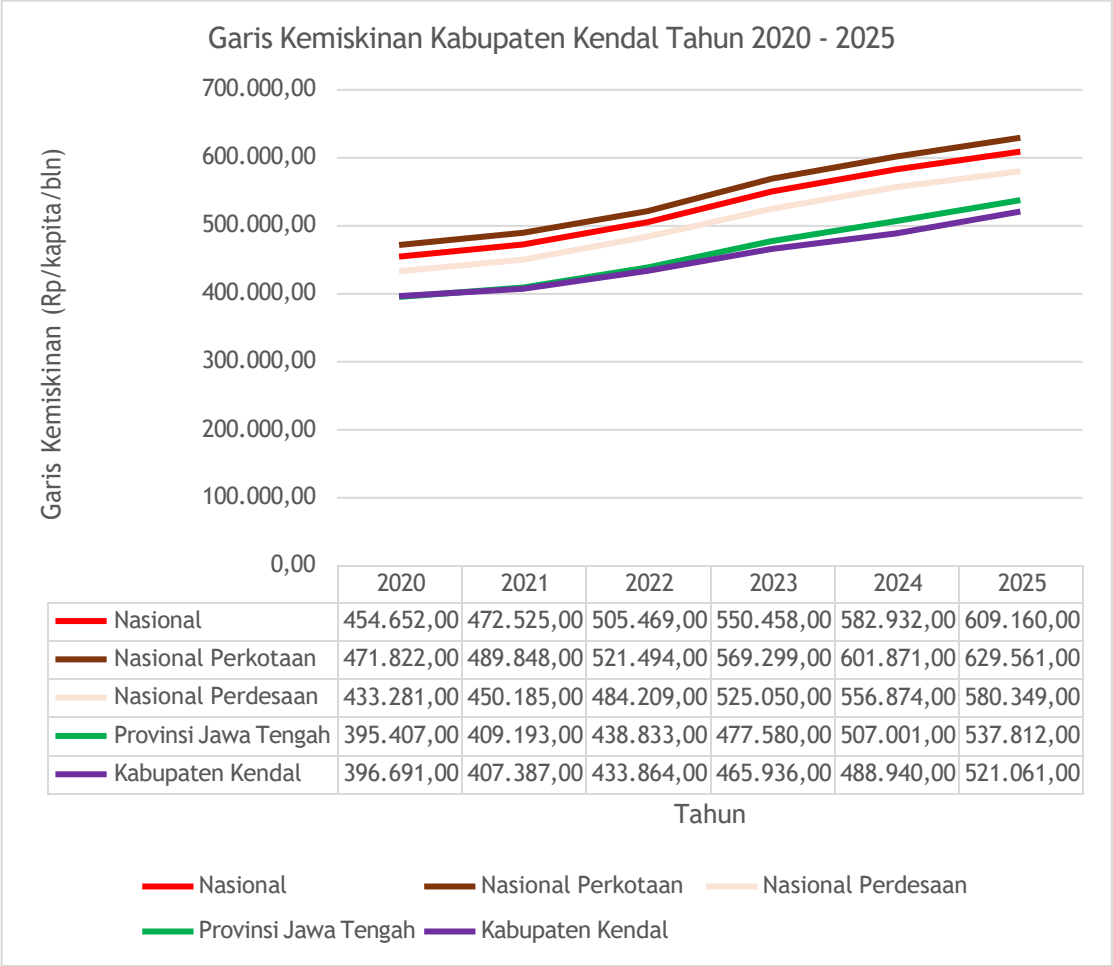

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	454.652,00	472.525,00	505.469,00	550.458,00	582.932,00	609.160,00
Nasional Perkotaan	471.822,00	489.848,00	521.494,00	569.299,00	601.871,00	629.561,00
Nasional Perdesaan	433.281,00	450.185,00	484.209,00	525.050,00	556.874,00	580.349,00
Provinsi Jawa Tengah	395.407,00	409.193,00	438.833,00	477.580,00	507.001,00	537.812,00
Kabupaten Kendal	396.691,00	407.387,00	433.864,00	465.936,00	488.940,00	521.061,00

Gambar II-1 Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2025
Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025

Dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Nasional, Nasional Perkotaan, Nasional Perdesaan, dan Provinsi Jawa Tengah, Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal secara konsisten berada pada posisi terendah. Garis Kemiskinan Nasional Perkotaan selalu menjadi yang tertinggi, diikuti oleh Nasional, dan Nasional Perdesaan. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada di atas Kabupaten Kendal, namun di bawah Nasional Perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar di Kabupaten Kendal cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi, serta wilayah perkotaan dan perdesaan secara nasional.

2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

Grafik persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2020-2025 menunjukkan adanya dinamika. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal sedikit meningkat dari sekitar 10.0% pada tahun 2020 menjadi puncaknya sekitar 10.2% pada tahun 2021. Setelah itu, terjadi penurunan yang konsisten, di mana tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal turun menjadi sekitar 8.4% pada tahun 2025, menunjukkan penurunan sekitar 1.8% dari puncaknya di tahun 2021.

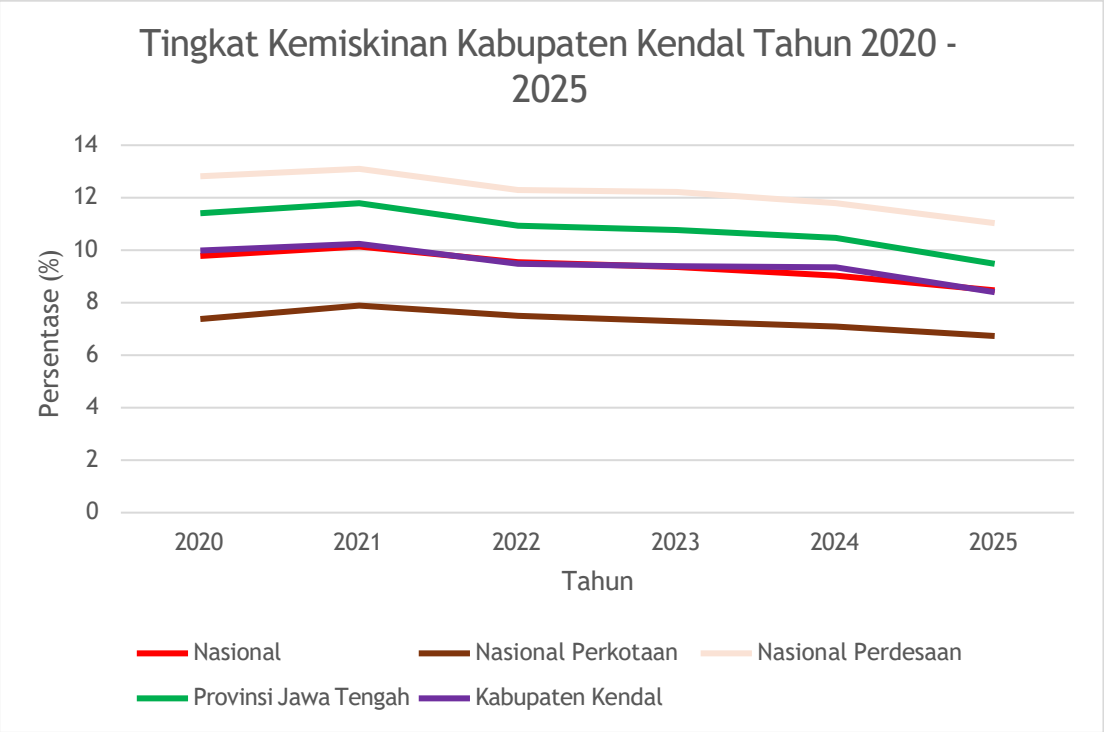

Gambar II-2 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2025

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal tahun 2020-2025 memiliki posisi yang umumnya berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Perdesaan. Meskipun pada tahun 2020-2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal sedikit di atas atau setara dengan rata-rata Nasional, pada tahun 2025 tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal berhasil berada di bawah rata-rata Nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu ini secara keseluruhan berada pada kategori Nasional Perdesaan, yang mencapai puncaknya sekitar 13.0% pada tahun 2021. Adapun kemiskinan nasional terbagi menjadi dua, yaitu nasional perdesaan dan nasional perkotaan. Apabila mempertimbangkan kategori kemiskinan perdesaan dan perkotaan pada grafik, maka tingkat kemiskinan nasional perdesaan memiliki persentase paling tinggi dari tahun 2020-2025, sementara nasional perkotaan memiliki persentase paling rendah.

Berdasarkan grafik "Posisi Relatif Persentase Kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2025", Kabupaten Kendal memiliki persentase penduduk miskin sebesar **8,47%**. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Nasional (**8,48%**) dan lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah (**9,48%**). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, perlu dilihat bagaimana posisi Kabupaten Kendal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah."

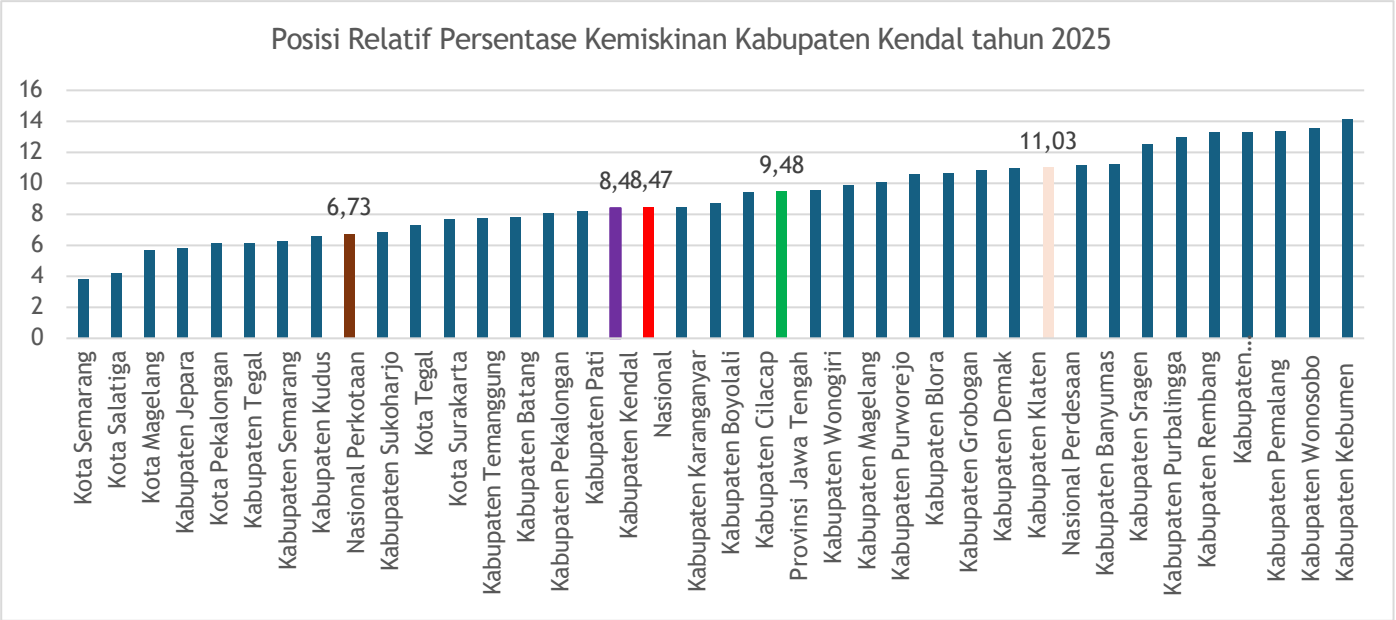

Gambar II-3 Posisi Relatif Persentase Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2025

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, Kabupaten Kendal berada di posisi yang cukup baik. Terdapat **15 kabupaten/kota** yang memiliki persentase kemiskinan lebih rendah dari Kabupaten Kendal, yaitu: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Nasional Perkotaan (6,73%), Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Terdapat **20 kabupaten/kota** (termasuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Perdesaan) yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari Kabupaten Kendal, yaitu: Kabupaten Pati, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah (9,48%), Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Nasional Perdesaan (11,03%), Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Brebes. Secara keseluruhan, pada tahun 2025, Kabupaten Kendal berhasil menekan angka kemiskinan hingga berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi, menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Grafik "Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kendal" periode 2020-2025 menyajikan gambaran fluktuasi yang menarik, di mana setelah mengalami kenaikan pada awal periode, Kabupaten Kendal berhasil mencatat penurunan signifikan jumlah penduduk miskin hingga mencapai titik terendah pada tahun 2025. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kendal tercatat sebanyak 97.490 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2021, yang mengalami penambahan sebanyak 2.510 jiwa dibandingkan tahun 2020. Setelah tahun 2021 jumlah

penduduk miskin mulai menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 6.970 jiwa dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, meskipun hanya sedikit, yaitu turun 390 jiwa dari tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, terjadi sedikit kenaikan jumlah sebesar 60 jiwa dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2025, Kabupaten Kendal berhasil mencatat penurunan signifikan dalam jumlah penduduk miskin, menjadi 83.730 jiwa. Ini berarti terjadi penurunan sebanyak 8.970 jiwa dibandingkan tahun 2024, sekaligus menjadi jumlah penduduk miskin terendah dalam periode 2020-2025. Secara keseluruhan, setelah mengalami kenaikan di awal periode hingga tahun 2021, Kabupaten Kendal menunjukkan upaya yang berhasil dalam menekan jumlah penduduk miskin, terutama dengan penurunan drastis yang tercatat pada tahun 2025.

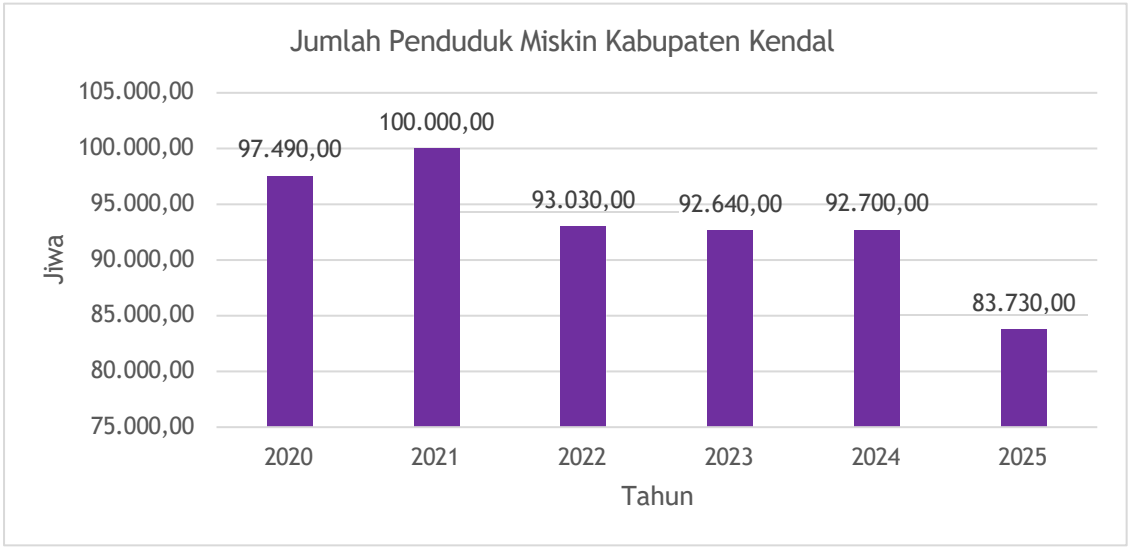

Gambar II-4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kendal

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025

3 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim

Pemahaman mengenai sebaran kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kendal merupakan dasar penting bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Perhitungan kemiskinan ekstrim dihitung dengan menggunakan data penduduk dalam persentil 1 – 5 (bagian dari desil 1). Persentil 1 – 5 merupakan bagian paling bawah yang terdapat dalam desil 1, dan dianggap sebagai penduduk yang memerlukan penanganan yang penting. Berdasarkan data yang disajikan, total populasi dengan penghasilan sangat rendah (persentil 1-5) di Kabupaten Kendal mencapai 42.940 jiwa. Analisis menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam distribusi kelompok ini antar kecamatan. Kecamatan Sukorejo tercatat memiliki jumlah penduduk berpenghasilan sangat rendah tertinggi, yaitu 4.852 jiwa, diikuti oleh Singorojo dengan 3.582 jiwa dan Plantungan dengan 3.517 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Ngampel memiliki jumlah penduduk berpenghasilan sangat rendah terendah, hanya 880 jiwa, sedikit di atas Pegandon (983 jiwa) dan Patebon (1.079 jiwa). Dengan rata-rata 2.147 jiwa penduduk berpenghasilan sangat rendah per kecamatan, data ini menyoroti wilayah-wilayah yang

mungkin memerlukan perhatian lebih dalam program pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Tabel II-1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal pada persentil 1 - 5

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Persentil 1 - 5
1	Boja	1.595
2	Brangsong	1.774
3	Cepiring	2.310
4	Gemuh	2.543
5	Kaliwungu	1.504
6	Kaliwungu Selatan	2.142
7	Kangkung	1.983
8	Kendal	1.154
9	Limbangan	1.175
10	Ngampel	880
11	Pageruyung	2.106
12	Patean	3.435
13	Patebon	1.079
14	Pegandon	983
15	Plantungan	3.517
16	Ringinarum	1.459
17	Rowosari	2.533
18	Singorojo	3.582
19	Sukorejo	4.852
20	Weleri	2.334
Total		**42.940**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 2025

4 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, tetapi bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kendal menjadi sangat penting. Kedalaman kemiskinan adalah ukuran kesenjangan pengeluaran rata-rata untuk setiap orang miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi skor indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2025 menunjukkan adanya dinamika (fluktuatif) tiap tahun dari 2020-2025, dengan tren naik, stabil, turun tajam, kemudian naik kembali. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kendal pada tahun 2020 adalah 1,37. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022, P1 Kabupaten Kendal sedikit meningkat sebesar 0,01 poin dari tahun 2021. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2022, P1 Kabupaten Kendal mengalami penurunan signifikan sebesar 0,33 poin pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini berlanjut pada

tahun 2024, di mana P1 Kabupaten Kendal turun sebesar 0,28 poin dari tahun 2023, mencapai titik terendah dalam periode ini. Namun, pada tahun 2025, P1 Kabupaten Kendal kembali mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 0,56 poin dibandingkan tahun 2024.

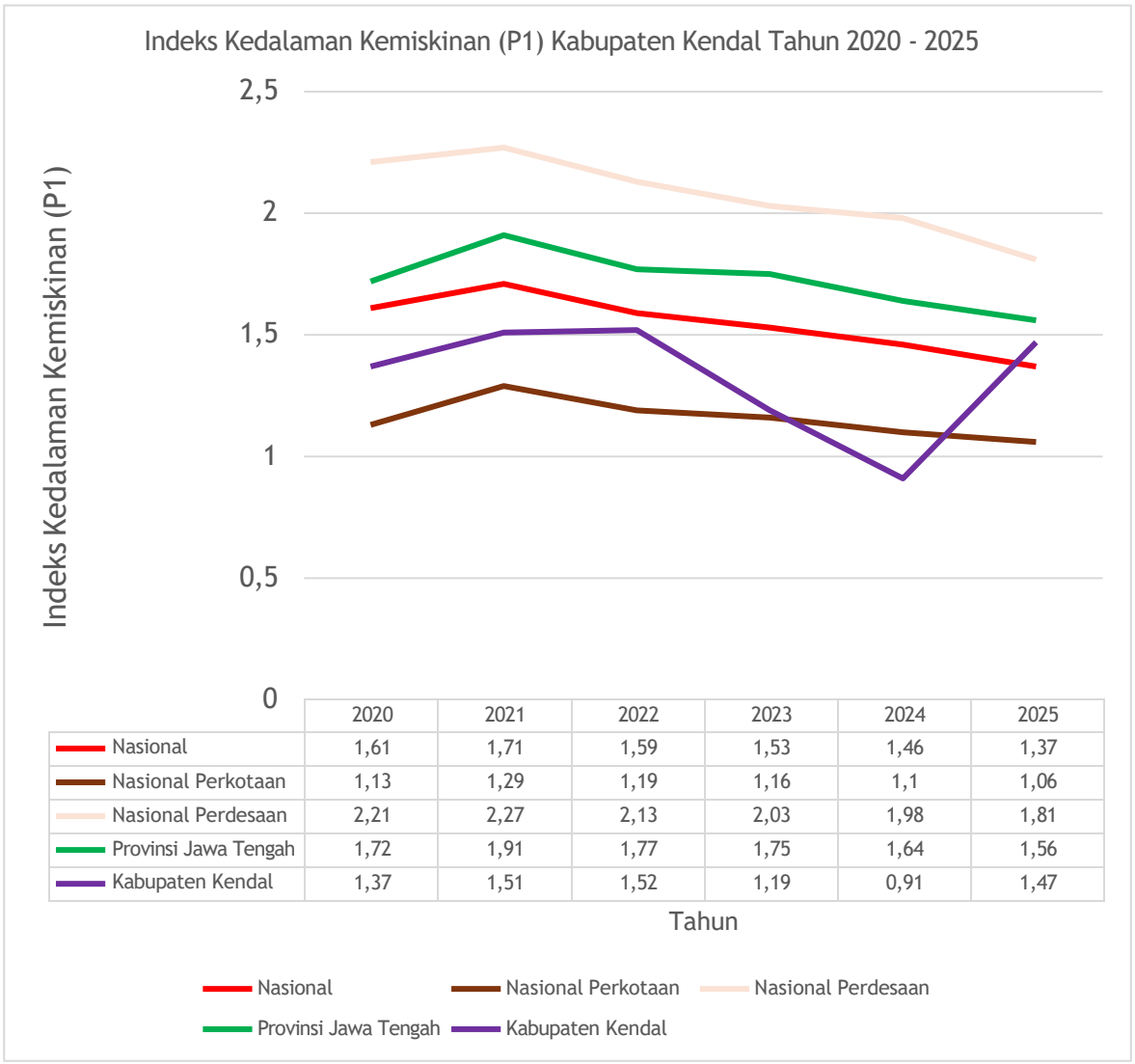

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	1,61	1,71	1,59	1,53	1,46	1,37
Nasional Perkotaan	1,13	1,29	1,19	1,16	1,1	1,06
Nasional Perdesaan	2,21	2,27	2,13	2,03	1,98	1,81
Provinsi Jawa Tengah	1,72	1,91	1,77	1,75	1,64	1,56
Kabupaten Kendal	1,37	1,51	1,52	1,19	0,91	1,47

Gambar II-5 Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2025

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025

Secara keseluruhan, tingkat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kendal kurun waktu 2020-2025 paling tinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 1,52 dan paling rendah pada tahun 2024 sebesar 0,91. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2024-2025 sebesar 0,56 poin dan penurunan paling tinggi pada tahun 2022-2023 sebesar 0,33 poin. Dibandingkan dengan Nasional, Nasional Perkotaan, Nasional Perdesaan, dan Provinsi Jawa Tengah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kendal cenderung berada di posisi yang lebih rendah dari Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Perdesaan untuk sebagian besar periode. Pada tahun 2024, P1 Kabupaten Kendal (0,91) bahkan menjadi yang terendah di antara semua kategori yang ditampilkan. Namun, pada tahun 2025, P1 Kabupaten Kendal (1,47) kembali berada di atas P1 Nasional (1,37) dan Nasional Perkotaan (1,06), meskipun masih di bawah P1 Provinsi Jawa Tengah (1,56) dan Nasional

Perdesaan (1,81). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki fluktuasi yang cukup dinamis, dengan kinerja yang sangat baik pada tahun 2024 namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2025.

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah 1,47. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan Nasional (1,37), namun masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah (1,56). Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Kendal (1,47) berada di posisi menengah. Berdasarkan tabel, terdapat 21 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kedalaman kemiskinan lebih rendah dari Kabupaten Kendal, antara lain Kota Semarang (0,41), Kabupaten Jepara (0,53), Kota Salatiga (0,61), dan Kota Tegal (1,42). Ini menempatkan Kabupaten Kendal sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kedalaman kemiskinan terendah ke-22 di antara 35 kabupaten/kota yang ditampilkan. Di sisi lain, terdapat 13 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kedalaman kemiskinan lebih tinggi dari Kabupaten Kendal. Kota/kabupaten dengan tingkat kedalaman kemiskinan (P1) terbesar adalah Kabupaten Rembang (3,35), diikuti oleh Kabupaten Pemalang (2,39) dan Kabupaten Wonosobo (2,25). Secara keseluruhan, tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kendal lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, namun sedikit di bawah rata-rata Nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Kendal berada di paruh bawah daftar (dari yang terendah), upaya untuk mengurangi kedalaman kemiskinan masih perlu ditingkatkan agar lebih mendekati atau melampaui capaian Nasional.

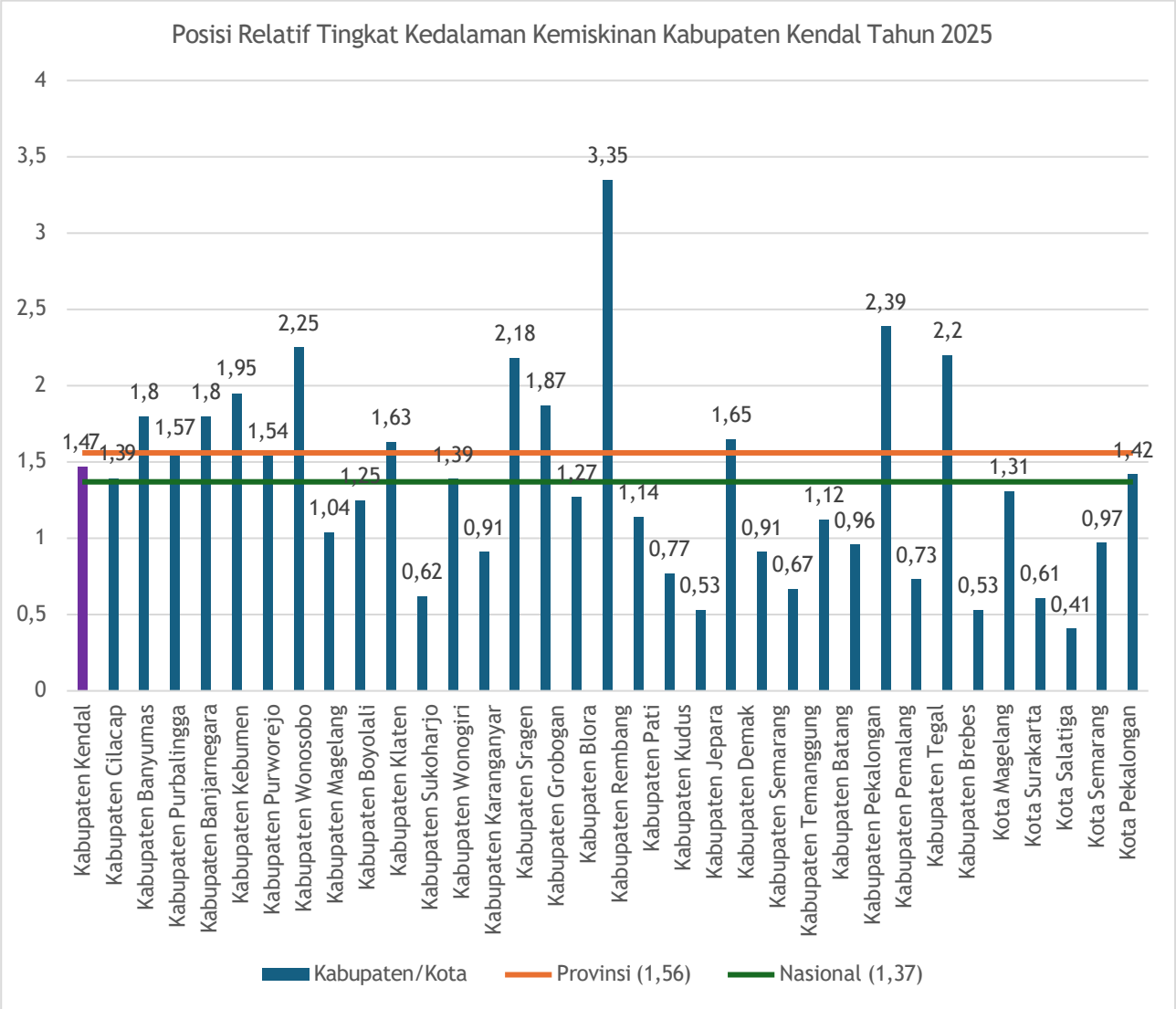

Gambar II-6 Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2025

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

5 Indeks Keparahan Kemiskinan

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2025 menunjukkan adanya dinamika fluktuatif, dengan tren naik, turun tajam, dan kemudian naik kembali. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kendal pada tahun 2020 adalah 0,25. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Kenaikan berlanjut pada tahun 2022, di mana P2 Kabupaten Kendal meningkat sebesar 0,06 poin dari tahun 2021.Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2022, P2 Kabupaten Kendal mengalami penurunan signifikan sebesar 0,14 poin pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana P2 Kabupaten Kendal turun sebesar 0,10 poin dari tahun 2023, mencapai titik terendah dalam periode ini, yaitu 0,15. Namun, pada tahun 2025, P2 Kabupaten Kendal kembali

mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 0,20 poin dibandingkan tahun 2024. Secara keseluruhan, tingkat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kendal kurun waktu 2020-2025 paling tinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 0,39 dan paling rendah pada tahun 2024 sebesar 0,15. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2024-2025 sebesar 0,20 poin dan penurunan paling tinggi pada tahun 2022-2023 sebesar 0,14 poin.

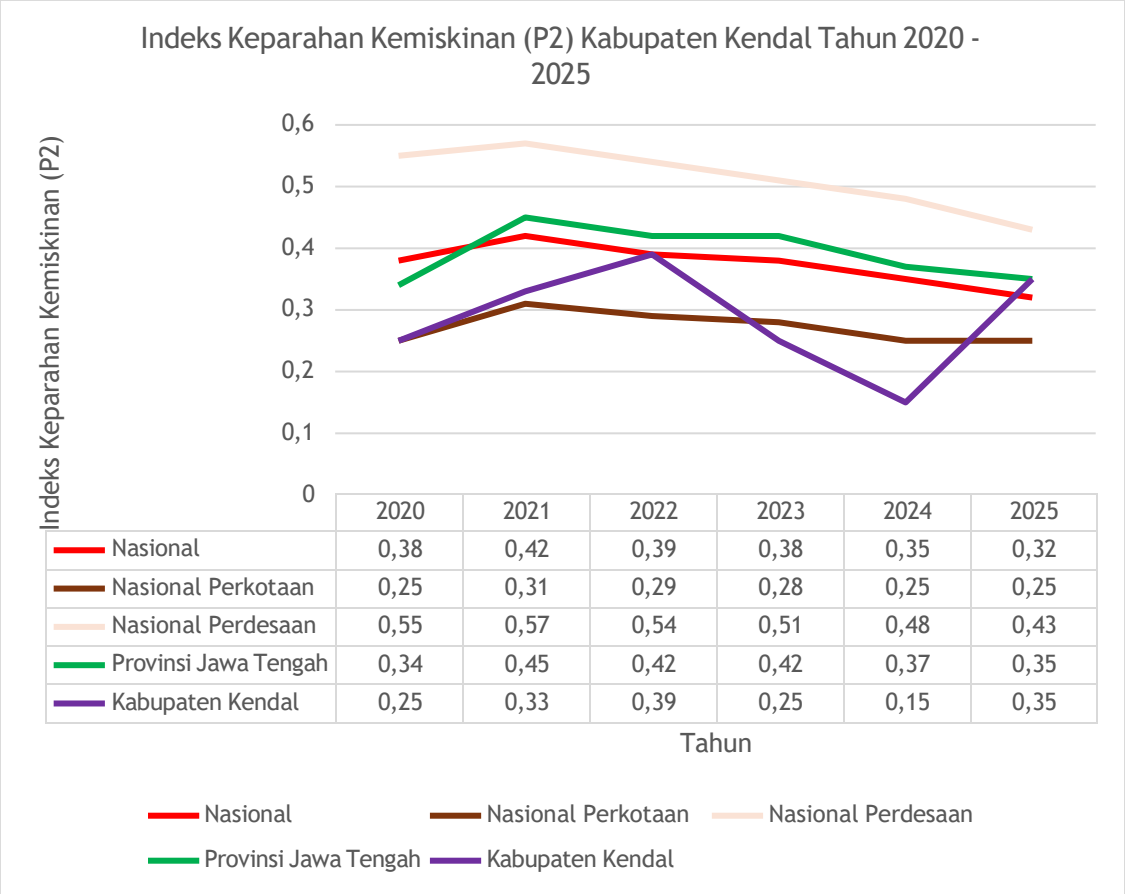

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	0,38	0,42	0,39	0,38	0,35	0,32
Nasional Perkotaan	0,25	0,31	0,29	0,28	0,25	0,25
Nasional Perdesaan	0,55	0,57	0,54	0,51	0,48	0,43
Provinsi Jawa Tengah	0,34	0,45	0,42	0,42	0,37	0,35
Kabupaten Kendal	0,25	0,33	0,39	0,25	0,15	0,35

Gambar II-7 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2025

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025

Dibandingkan dengan Nasional, Nasional Perkotaan, Nasional Perdesaan, dan Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kendal cenderung berada di posisi yang lebih rendah dari Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Perdesaan untuk sebagian besar periode. Pada tahun 2024, P2 Kabupaten Kendal (0,15) bahkan menjadi yang terendah di antara semua kategori yang ditampilkan. Namun, pada tahun 2025, P2 Kabupaten Kendal (0,35) kembali berada di atas P2 Nasional (0,32) dan Nasional Perkotaan (0,25), serta setara dengan Provinsi Jawa Tengah (0,35), meskipun masih di bawah P2 Nasional Perdesaan (0,43). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki fluktuasi yang cukup dinamis, dengan kinerja yang sangat baik pada tahun 2024 namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2025.

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah 0,35. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan Nasional (0,32), dan setara dengan Provinsi Jawa Tengah (0,35). Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Kendal (0,35) berada di posisi menengah. Terdapat 21 kabupaten/kota yang memiliki tingkat keparahan kemiskinan lebih rendah dari Kabupaten Kendal, antara lain Kota Semarang (0,05), Kabupaten Kudus (0,1), Kabupaten Jepara (0,15), dan Kota Salatiga (0,19). Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Kendal masih lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/kota lainnya. Di sisi lain, terdapat 13 kabupaten/kota yang memiliki tingkat keparahan kemiskinan lebih tinggi dari Kabupaten Kendal. Kota/kabupaten dengan tingkat keparahan kemiskinan (P2) terbesar adalah Kabupaten Tegal (1,07), diikuti oleh Kabupaten Pati (0,6) dan Kabupaten Pemalang (0,62). Secara keseluruhan, tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kendal sedikit lebih tinggi dari rata-rata Nasional dan setara dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya penanggulangan kemiskinan mungkin telah mengurangi jumlah penduduk miskin, distribusi pengeluaran di antara mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan masih memerlukan perhatian lebih untuk mengurangi kesenjangan.

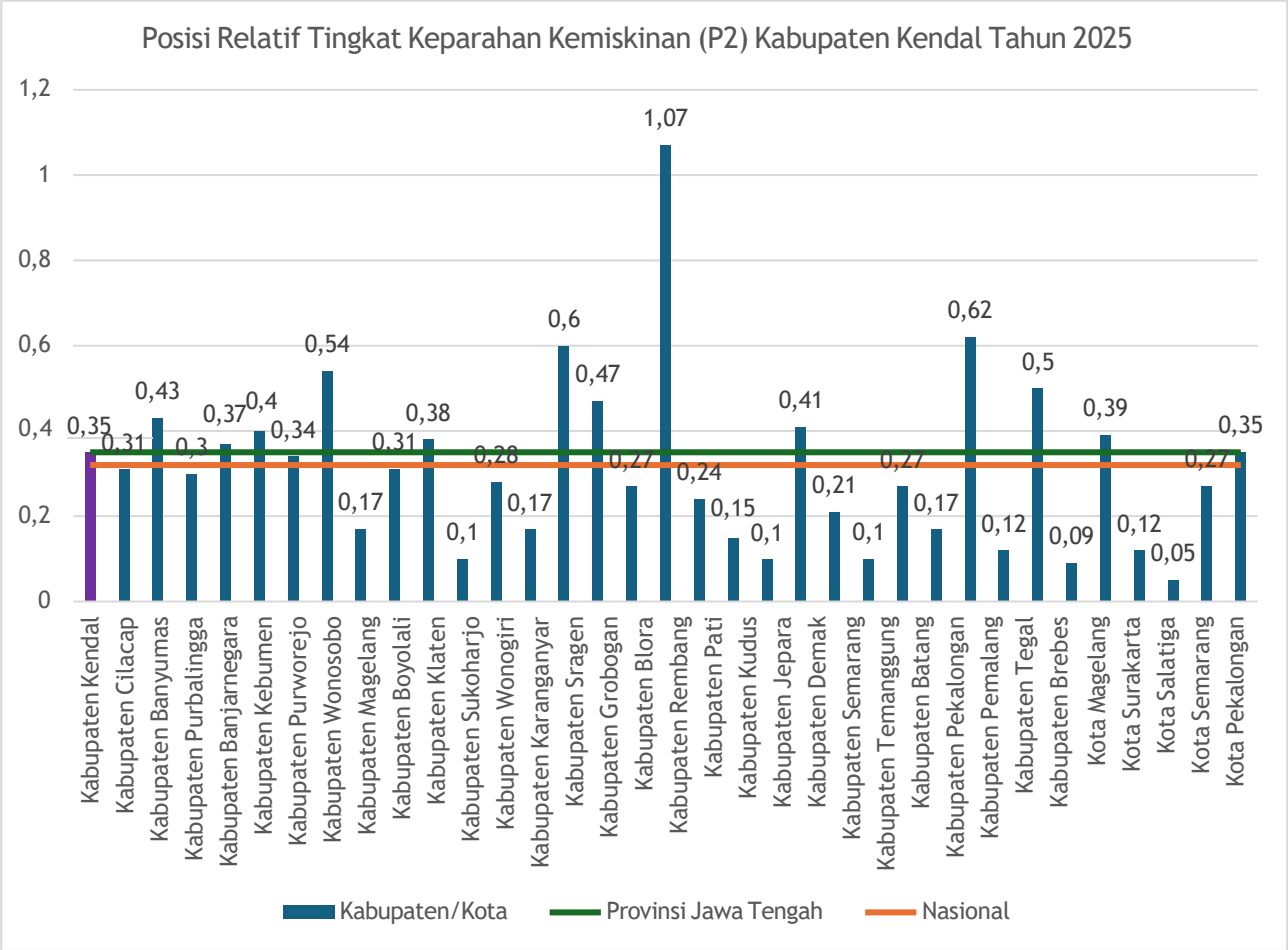

Gambar II-8 Posisi Relatif Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kendal Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

6 Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan cenderung meningkat pada awal periode, artinya semakin tinggi jumlah penduduk miskin dan/atau nilai indeks maka menunjukkan semakin jauh dari rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Kendal mengalami dinamika kondisi kemiskinan konsumsi yang fluktuatif, namun menunjukkan tren perbaikan signifikan di akhir periode. Program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Kendal dinilai efektif dan relevan dengan kebijakan di tingkat Provinsi maupun nasional.

Pada indikator Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Kabupaten Kendal menunjukkan posisi relatif yang lebih baik dibandingkan rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, bahkan termasuk dalam 15 kabupaten/kota dengan persentase terendah di Jawa Tengah. Perkembangan antar waktu menunjukkan kondisi yang fluktuatif, namun dengan tren penurunan signifikan sejak tahun 2022 dan mencapai titik terendah pada tahun 2025, mengindikasikan efektivitas dan relevansi program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan.

Indikator Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), Kabupaten Kendal pada tahun 2025 menunjukkan jika berada di bawah Provinsi Jawa Tengah namun di atas Nasional. Perkembangan antar waktu menunjukkan fluktuasi dengan titik terendah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan efektif dan relevan dalam mengurangi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Sementara itu, untuk indikator Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2), pada tahun 2025 Kabupaten Kendal berada setara dengan Provinsi Jawa Tengah, namun di atas Nasional serta Nasional Perkotaan. Perkembangan antar waktu juga menunjukkan fluktuasi dengan titik terendah pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal efektif dan relevan dalam mengurangi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II-2 Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan

No.	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	Fluktuatif	Efektif	Relevan
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional	Fluktuatif, dengan titik terendah pada 2024	Efektif	Relevan
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	Setara Provinsi Jawa Tengah, dan di atas Nasional serta Nasional Perkotaan	Fluktuatif, dengan titik terendah pada 2024	Efektif	Relevan

C. KONDISI PEREKONOMIAN DAN KARAKTERISTIK KEWILAYAHAN

1 Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap kemiskinan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB ADHB Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023) meningkat sebesar 27,75 persen, dari Rp42,54 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp54,36 triliun pada tahun 2023. Jika proyeksi tahun 2024 diperhitungkan, maka PDRB ADHB diperkirakan mencapai Rp58,84 triliun atau tumbuh 38,27 persen dibandingkan tahun 2019.Sementara itu, PDRB ADHK Kabupaten Kendal naik dari Rp30,91 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp35,29 triliun pada tahun 2023, atau tumbuh 14,17 persen dalam periode lima tahun. Dengan proyeksi tahun 2024, PDRB

ADHK mencapai Rp37,20 triliun, yang berarti secara riil perekonomian Kabupaten Kendal tumbuh sebesar 20,35 persen sejak tahun 2019.

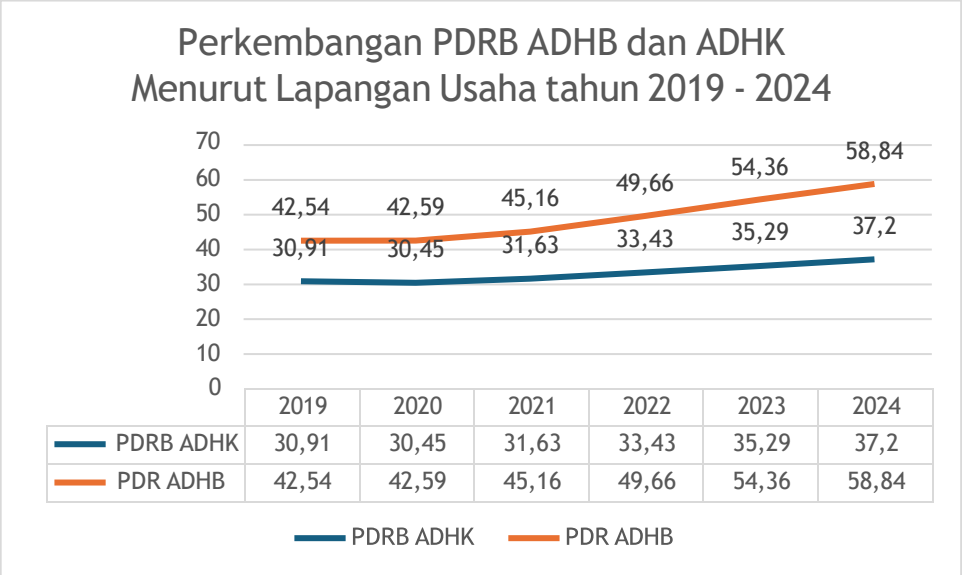

Gambar II-9 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2019 – 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

PDRB per kapita Kendal juga mengalami perkembangan positif. Pada 2019, PDRB per kapita ADHK tercatat sebesar Rp31,99 juta, sempat turun menjadi Rp29,96 juta pada 2020 akibat pandemi, lalu kembali naik hingga Rp33,52 juta pada 2023. Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita Kendal mencapai Rp51,63 juta pada 2023. Meski angka ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan, Kendal masih berada sedikit di bawah capaian rata-rata provinsi dan nasional, sehingga peningkatan produktivitas tenaga kerja masih perlu dioptimalkan.

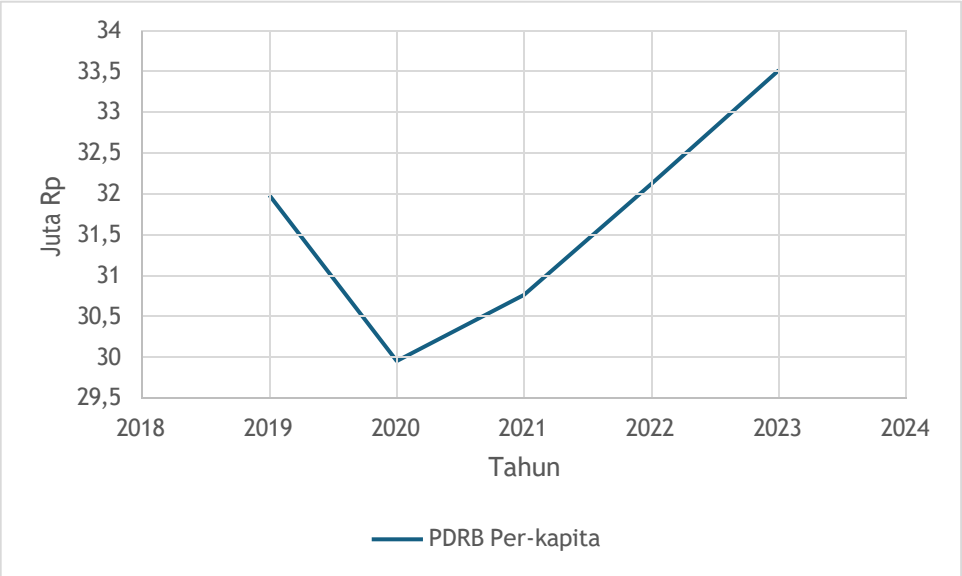

Gambar II-10 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kendal Tahun 2019 - 2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kendal dalam periode 2019–2024 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi nasional. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kendal mengalami kontraksi akibat pandemi. Meskipun demikian, kinerja ekonomi Kendal relatif lebih tangguh dibandingkan rata-rata provinsi karena ditopang sektor industri pengolahan yang tetap bertahan.

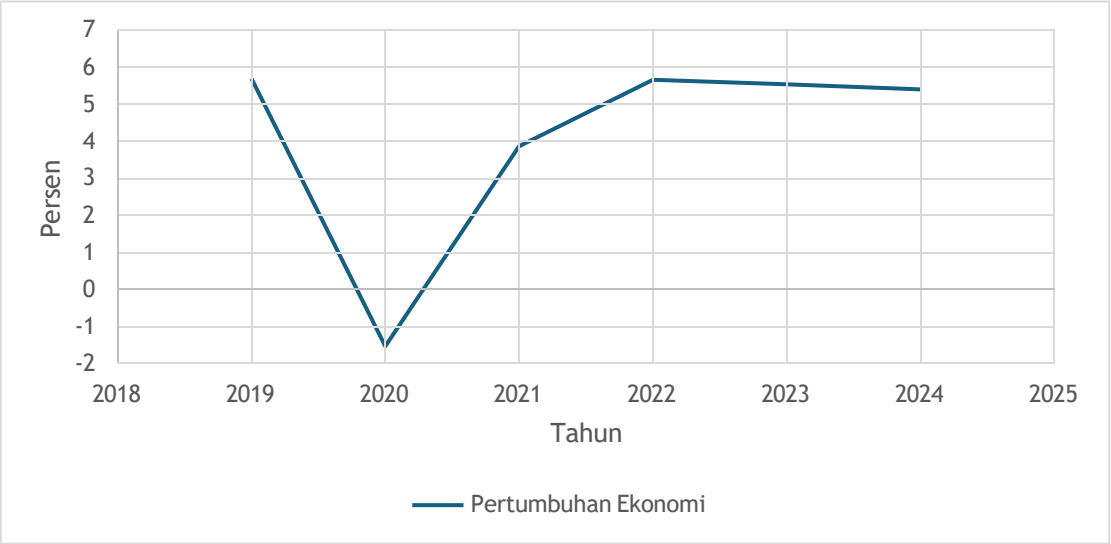

Gambar II-11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2019 - 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sejak tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kendal mulai membaik dan terus meningkat hingga tahun 2024. Laju pemulihan ini karena adanya aktivitas produksi di Kawasan Industri Kendal yang berorientasi ekspor. Dengan basis industri yang cukup solid, Kendal mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kendal memiliki daya adaptasi tinggi dalam menghadapi guncangan global, sekaligus menegaskan peran sektor industri sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.

Berangkat dari tren pada grafik, terlihat bahwa setelah kontraksi tajam pada tahun 2020, perekonomian Kendal memasuki fase pemulihan yang cukup kuat mulai 2021. Kenaikan pertumbuhan yang berlanjut hingga melampaui 5 persen sejak 2022 mencerminkan adanya pemulihan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi didukung oleh fondasi struktural yang lebih kokoh. Aktivitas industri di Kawasan Industri Kendal (KIK) yang berorientasi ekspor berperan penting dalam mendorong kembali kapasitas produksi, meningkatkan utilisasi tenaga kerja, serta memperbaiki kinerja sektor-sektor pendukung seperti transportasi, pergudangan, dan jasa logistik.

Dampak penguatan sektor industri ini juga menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok industri. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi turut memperluas kesempatan kerja dan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga kembali menjadi salah satu penopang

pertumbuhan. Kombinasi antara ekspor yang kuat dan permintaan domestik yang membaik membuat struktur ekonomi Kendal lebih seimbang dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Ke depan, keberlanjutan pertumbuhan di atas 5 persen ini perlu dijaga melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur pendukung industri, serta diversifikasi basis ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. Dengan strategi tersebut, Kendal tidak hanya mampu mempertahankan momentum pemulihan, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.

c. Inflasi

Berdasarkan grafik, laju inflasi menunjukkan pola yang dinamis dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, inflasi relatif rendah dan stabil di kisaran 1,49 persen. Kondisi ini mencerminkan lemahnya tekanan permintaan pada masa pemulihan awal pascapandemi, di mana aktivitas ekonomi masih bergerak terbatas sehingga kenaikan harga barang dan jasa cenderung terkendali.

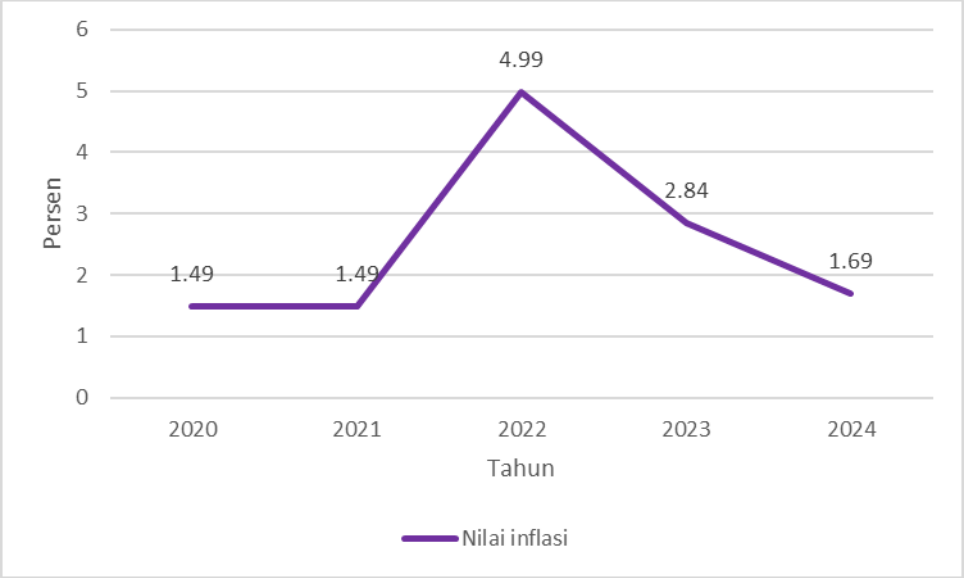

Gambar II-12 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2019 - 2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Lonjakan inflasi terjadi pada tahun 2022 hingga mencapai sekitar 4,99 persen. Kenaikan ini sejalan dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya permintaan masyarakat, bersamaan dengan tekanan global seperti kenaikan harga energi dan bahan baku impor. Bagi daerah dengan basis industri seperti Kendal, peningkatan aktivitas produksi dan ekspor juga mendorong pergerakan harga, terutama pada komoditas pendukung industri, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa fase pemulihan ekonomi yang kuat turut diiringi oleh peningkatan tekanan inflasi.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali menurun masing-masing menjadi sekitar 2,84 persen dan 1,69 persen. Penurunan ini mengindikasikan mulai stabilnya sisi penawaran dan distribusi,

serta keberhasilan pengendalian harga melalui kebijakan pemerintah dan kelancaran rantai pasok. Tren ini sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, sehingga mencerminkan kombinasi yang sehat antara ekspansi ekonomi dan stabilitas harga. Dengan inflasi yang lebih terkendali, daya beli masyarakat dapat terjaga, sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi memainkan peran penting dan saling berhubungan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal. Kenaikan PDRB per kapita mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, yang dapat memperkuat daya beli dan berpotensi mengurangi kemiskinan, meskipun efektivitasnya sangat ditentukan oleh meratanya distribusi pendapatan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi turut mendukung penurunan kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi, walaupun dampaknya tidak selalu proporsional apabila manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh sektor-sektor tertentu. Di sisi lain, inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah, sehingga menghambat kontribusi positif dari peningkatan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin dan rentan. Stabilitas inflasi menjadi faktor kunci dalam menjaga agar peningkatan pendapatan riil masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga, sementara kualitas pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif dan mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas. Dengan demikian, sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pendapatan per kapita, dan pengendalian inflasi menjadi prasyarat penting dalam percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) menjadi sangat urgen sebagai instrumen perencanaan yang terarah dan terpadu. RPKD diperlukan untuk memastikan bahwa capaian makroekonomi dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang secara langsung menyasar rumah tangga miskin dan rentan, melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan layak, penguatan usaha ekonomi produktif, serta perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko inflasi dan guncangan ekonomi. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis data, RPKD diharapkan mampu menjembatani pertumbuhan ekonomi daerah dengan penurunan kemiskinan secara lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

2 Karakteristik Kewilayahan

a. Kondisi Geografi

Kabupaten Kendal, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki keunikan tersendiri sebagai wilayah yang menggabungkan pesona alam, budaya, dan sejarah. Secara geografis, Kendal membentang dari pegunungan hingga pesisir pantai Laut Jawa, memberikan potensi keindahan alam yang beragam. Kawasan pariwisata seperti Pantai Sendang Sikucing, Curug Sewu, Wisata alam Kalikesek dan Pantai Indah Kemangi (PIK) menjadi destinasi andalan. Selain itu, Kendal dikenal dengan kerajinan lokal kerajinan kayu dan batik khas yang memperlihatkan identitas budaya yang kuat.

Kabupaten Kendal memiliki potensi sektor unggulan sangat menjanjikan, terutama di sektor agribisnis dan industri. Pertanian padi, hortikultura, dan perikanan berkembang pesat di wilayah ini berkat dukungan alam dan sistem irigasi yang memadai sehingga Kabupaten Kendal didaulat sebagai salah satu penumpu pangan Jawa Tengah. Di sektor industri, Kendal memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KPI), yang berkontribusi besar dalam meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Dengan letak strategis yang dekat dengan Kota Semarang dan akses tol Trans Jawa, Kendal memiliki peluang besar untuk mendukung pengembangan industri yang kompetitif di Jawa Tengah.

Dari segi karakteristik, masyarakat Kendal terkenal sebagai daerah yang religius dengan masyarakat yang ramah dan semangat gotong royong yang kuat. Nilai-nilai tradisional ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai kegiatan sosial. Kabupaten Kendal juga dikenal sebagai daerah dengan keberagaman agama dan suku, yang hidup berdampingan secara harmonis. Kehidupan masyarakatnya yang dinamis, ditambah dengan visi pembangunan yang berorientasi pada inovasi, menjadikan Kabupaten Kendal sebagai daerah yang tidak hanya mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga terus berkembang untuk menghadapi tantangan modern.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal difokuskan pada optimalisasi sektor unggulan, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Sektor industri pengolahan akan ditingkatkan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sektor pertanian akan didorong melalui modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan pengembangan produk olahan. Sementara itu, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan meningkatkan infrastruktur, promosi, dan pengembangan destinasi wisata 9 berbasis potensi alam dan budaya.

Kabupaten Kendal merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur (yang meliputi Kabupaten/Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi). Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yaitu berada tepat di Pesisir Pantai Utara (Pantura) yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Salah satu bukti konkrit dari usaha pengembangan kawasan Pantura pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri

Kendal yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019. Salah satu nilai jual dari kawasan KEK ini adalah letaknya yang strategis yaitu terintegrasi dengan Pelabuhan Kendal, Tol Trans Jawa, dan juga Pelabuhan Internasional Tanjung Mas. Selain itu, kemudahan dalam melaksanakan kegiatan industri dalam bentuk insentif serta kemudahan pelayanan usaha dan pendampingan bagi perusahaan yang membangun pabriknya di kawasan ini juga menjadi sebuah usaha dari pemerintah agar investor dapat berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kawasan dan secara umum masyarakat Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah.

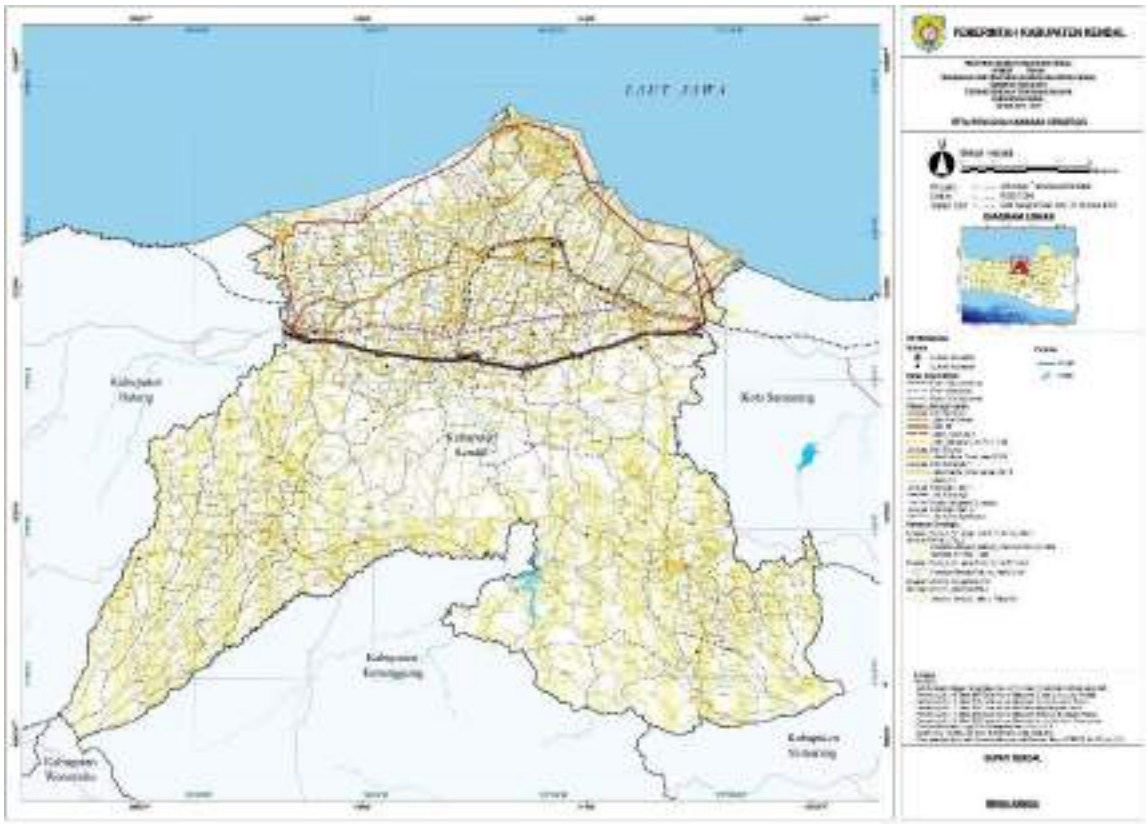

Gambar II-13 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kendal

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

Selain KEK Kendal, dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Rung Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, terdapat 3 (tiga) kawasan strategis yang kemudian menjadi arah pengembangan wilayah. Rincian 3 kawasan strategis tersebut antara lain; a) Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi yang meliputi sebagian kecil Kecamatan Boja, b) Kawasan Strategis Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi yang meliputi area KEK Kendal yaitu sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Brangsong, Kendal, Patebon, hingga Cepiring, dan c) Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup atau

Kawasan Lindung Fisiografis yang meliputi Kecamatan Limbangan, Boja, Singorojo, Patean, Pageruyung, Sukorejo, dan Plantungan.

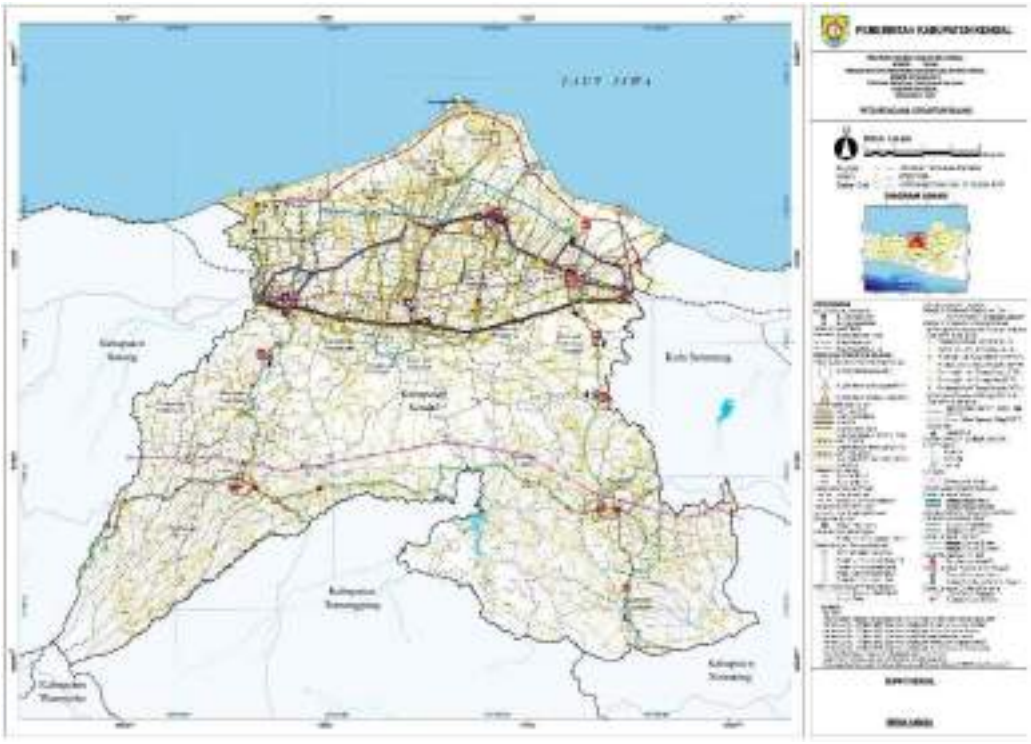

Gambar II-14 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kendal

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

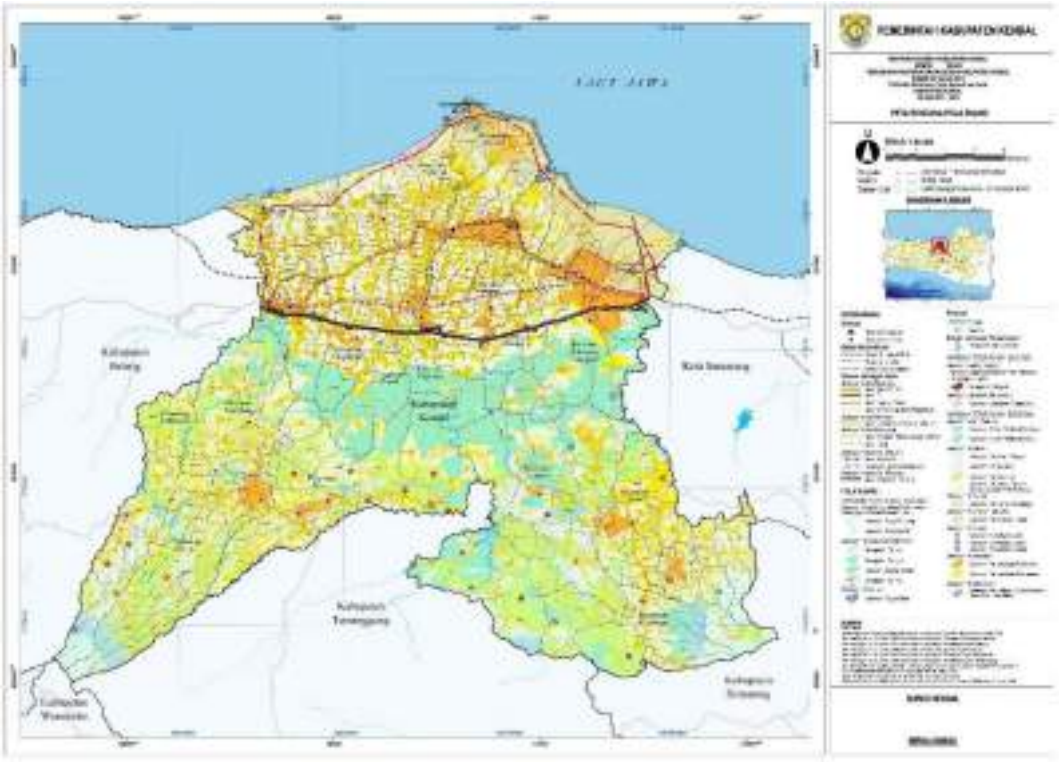

Gambar II-15 Peta Pola Ruang Kabupaten Kendal

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

Struktur Ruang ini akan dispesifikan pada aspek pusat kegiatan di wilayah kabupaten. Terdapat 3 (tiga) pusat kegiatan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal, antara lain: a) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terpusat di Kecamatan Kaliwungu, Boja, Sukorejo, dan Weleri, b) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdapat di Kecamatan Pegandon, dan c) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang tersebar di Kecamatan Limbangan, Singorojo, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Kangkung, Cepiring, Ringinarum, Patean, Plantungan, dan Pageruyung.

Dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Kendal, daerah utara meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Ngampel, Cepiring, Kangkung, Rowosari, dan beberapa wilayah sebelah utara dari Kecamatan Ringinarum, Weleri, Gemuh, Pegandin, Brangsong, dan Kaliwungu Selatan dimanfaatkan sebagai Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Perikanan Budaya terutama pada daerah pesisir. Sedangkan di daerah selatan seperti Kecamatan Limbangan, Boja, Singorojo, Patean, Sukorejo, Pageruyung Plantungan dan wilayah sebelah selatan dari Kecamatan Ringinarum, Weleri, Gemuh, Pegandin, Brangsong, dan Kaliwungu Selatan dimanfaatkan sebagian kecil sebagai Kawasan Permukiman Perdesaan dan sebagian besarnya dimanfaatkan sebagai Kawasan Peruntukan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pertanian Pangan Berkelanjutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Resapan Air, Cagar Alam, dan Kawasan Pariwisata.

b. Kondisi Topografi

Secara topografi, Kabupaten Kendal terbagi menjadi tiga jenis, yaitu daerah dataran rendah mencakup daerah pantai dan pesisir ketinggian antara 0-85 mdpl, daerah perbukitan di bagian tengah, dan area dataran tinggi dan pegunungan di sebelah selatan dengan elevasi tertinggi mencapai 2.579 mdpl yaitu bagian barat Gunung Ungaran. Adapun ketinggian daerah rerata di Kabupaten Kendal berkisar antara 0-698 mdpl. Adapun beberapa aliran sungai yang melewati Kabupaten Kendal bersumber dari daerah perbukitan di daerah selatan turun menuju daerah utara yang lebih landai dan menyebabkan daerah tersebut menjadi tempat akumulasi sedimentasi sehingga menyebabkan daerah utara menjadi tempat akumulasi sedimentasi

Kondisi geologi kabupaten kendal berdasarkan struktur geologi terdiri dari morfologi dataran aluvial, perbukitan bergelombang, perbukitan berelief sedang, plato, dan tubuh guunung api. Bagian utara Kabupaten Kendal merupakan daerah dataran aluvial dengan kemiringan 3-5% yang meliputi Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, sebagain Kaliwungu, Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, dan Ngampel. Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah merupakan daerah perbukitan bergelombang dengan kemiringan 3-10% dan didominasi oleh

batupasir, breksi, tufa dan aliran lava yang meliptui wilayah Kecamatan Pageruyung, Weleri, Ringinarum, dan Kaliwungu. Adapun Kecamatan Patean dan Singorojo yang juga berada di area tengah Kabupaten Kendal memiliki morfologi yang berbeda dari wilayah disekitarnya yaitu berelief sedang dengan kemiringan 15-20%. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang meliputi sebagian Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Limbangan dan Boja merupakan plato dengan kemiringan lebih dari 30%. Hal ini dikarenakan daerah ini merupakan morfologi hasil erupsi gunung api purba yang dicirikan dengan kondisi tanah yang terbentuk dari pelapukan lava andesit, basal, dan bongkah vulkanik lahar hingga pada daerah Limbangan dan Singorojo yang memiliki kemiringan 30-70% karena merupakan bagian dari tubuh gunungapi serta daerah perbukitan berelief kasar.

c. Kondisi Demografi

Kondisi demografi menunjukkan jumlah penduduk yang berubah pada tiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2022-2024) Kabupaten Kendal selalu mengalami kenaikan jumlah penduduk. Selama periode 3 tahun, jumlah penambahan penduduk Kabupaten Kendal sebanyak 24.619 pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023, terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 14.559 jiwa yang semula pada tahun 2022 jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.069.595 naik menjadi 1.084.154. Kenaikan jumlah penduduk diindikasikan adanya migrasi masuk yang cukup tinggi ke dalam wilayah Kabupaten Kendal sehingga menjadi salah satu faktor naiknya jumlah penduduk.

Total lansia di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 24.122 jiwa dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding jumlah lansia laki – laki sebesar 4.384 jiwa. Kondisi ini menunjukkan perempuan lansia memiliki waktu yang lebih lama untuk pulih dari kondisi kemiskinan daripada laki – laki. Kelompok rentan lansia juga lebih rentan masuk dalam kondisi miskin karena sering kali tinggal sendiri dan adanya keterbatasan fisik serta tidak adanya bantuan dari anggota keluarga memperbesar risiko lansia terdampak dalam situasi ketidakmampuan ekonomi.

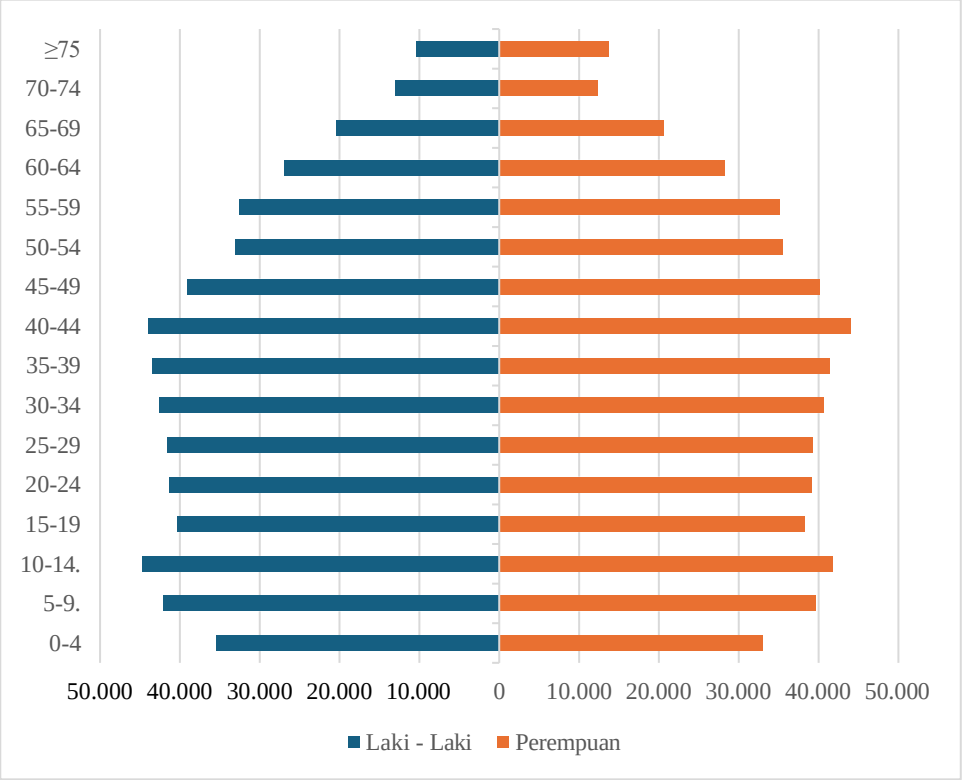

Gambar II-16 Piramida Penduduk Kabupaten Kendal Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Penyandang disabilitas menurut Undang – Undang No.4 Tahun 1997 adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang tuna daksa, tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, cacat fisik dan mental. Berdasarkan data menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tertinggi berada di Kecamatan Gemuh sebesar 534 disusul Kecamatan Cepiring sebesar 489. Tingginya angka disabilitas yang ada di kedua kecamatan tersebut memberikan indikasi terhadap akses layanan kesehatan dan adanya kerentanan sosial yang tinggi untuk penyandang disabilitas.

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Kendal juga memperlihatkan tren yang cenderung meningkat.. Pada tahun 2020, angka ini menurun tajam karena banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja akibat penurunan permintaan global dan domestik. Namun, pada tahun 2021 hingga 2024, rasio kembali naik secara konsisten. Kenaikan ini sejalan dengan menguatnya sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan transportasi.

Gambar II-17 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2019 - 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kondisi Kesehatan merupakan hal penting dalam demografi yang perlu dipertimbangkan. Faktor Kesehatan menjadi penting karena menggambarkan kondisi secara sosial dan kependudukan. Usia harapan hidup berada pada usia sekitar 74,73 tahun yang menunjukkan usia yang cukup jauh dari usia produktif. Secara persentase bayi yang mengalami stunting pada Kabupaten Kendal pada tahun 2024 menunjukkan angka 11,25 persen. Secara tren stunting cenderung menunjukkan kenaikan, yang dapat menunjukkan jika kondisi kesehatan yang masih perlu dibenahi. Kenaikan angka stunting dapat juga disebabkan karena keterbatasan akses terhadap gizi dan pangan sehat.

Permasalahan kemiskinan yang erat hubungannya dengan kesejahteraan sosial atau hambatan, kesulitan dan gangguan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Perlu adanya pencatatan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia untuk mengidentifikasi jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2024, jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Kendal berada pada kelompok usia 40-44 tahun sebanyak 88.043 jiwa atau 8% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia >75 tahun sebanyak 24.122 jiwa atau sebesar 2,2% dari jumlah penduduk.

D. ANALISIS KEMISKINAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH

Karakteristik wilayah Kabupaten Kendal memiliki keunikan secara geografis dan topografis yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Setiap kawasan di Kabupaten Kendal menghadapi dinamika dan faktor penyebab kemiskinan yang berbeda, sehingga permasalahan kemiskinan tidak dapat dipahami secara seragam. Variasi kondisi fisik wilayah, aksesibilitas, struktur ekonomi lokal, serta ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang membentuk perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kemiskinan perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis karakteristik wilayah agar kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran.

Secara spasial, Kabupaten Kendal berada dalam aglomerasi wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur, yang meliputi Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Posisi ini menjadikan Kendal sebagai wilayah yang strategis dalam pengembangan aktivitas ekonomi, khususnya sektor industri. Dampak dari perkembangan kawasan aglomerasi tersebut mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Kondisi inilah yang menjadikan analisis kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayah menjadi penting untuk mengidentifikasi perbedaan tantangan dan kebutuhan penanganan kemiskinan di setiap kawasan.

Secara tipologi geomorfologi, wilayah Kabupaten Kendal dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kawasan pesisir di sisi utara, kawasan dataran rendah hingga bergelombang di sisi tengah, dan kawasan perbukitan–Pegunungan Ungaran di sisi selatan. Perbedaan kondisi bentang alam tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang, struktur mata pencaharian masyarakat, tingkat aksesibilitas, serta kerentanan terhadap risiko lingkungan, yang pada akhirnya membentuk variasi karakteristik kemiskinan antarwilayah.

Kawasan pesisir umumnya berkembang dengan aktivitas perikanan tangkap, tambak, serta sebagian kegiatan industri dan perdagangan di koridor pantura. Wilayah ini menghadapi tantangan berupa kerentanan terhadap banjir rob, abrasi pantai, dan penurunan kualitas lingkungan pesisir yang dapat mengganggu keberlanjutan mata pencaharian. Fluktuasi hasil tangkapan dan produksi tambak menyebabkan pendapatan rumah tangga cenderung tidak stabil, sehingga kelompok nelayan dan petambak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kemiskinan.

Kawasan dataran rendah hingga bergelombang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dengan dominasi sektor industri, perdagangan, jasa, serta pertanian lahan sawah. Infrastruktur wilayah relatif lebih berkembang dan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pasar juga lebih baik dibanding wilayah lainnya. Namun demikian, kemiskinan di kawasan ini sering berkaitan dengan dinamika ekonomi perkotaan dan industri, seperti pekerja sektor informal berpendapatan rendah, buruh dengan keterampilan terbatas, serta rumah tangga yang terdampak tekanan biaya hidup.

Sementara itu, **kawasan perbukitan–Pegunungan Ungaran** dicirikan oleh topografi berbukit hingga bergunung dengan aksesibilitas yang relatif lebih terbatas. Mata pencaharian masyarakat didominasi oleh pertanian lahan kering, perkebunan rakyat, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta layanan dasar berdampak pada rendahnya produktivitas ekonomi dan terbatasnya diversifikasi pendapatan. Kemiskinan di wilayah ini cenderung bersifat lebih persisten karena dipengaruhi oleh faktor keterisolasian wilayah dan keterbatasan peluang ekonomi.

Selain tipologi geomorfologi, Kabupaten Kendal juga menunjukkan perbedaan karakter wilayah berdasarkan tipologi perdesaan dan perkotaan yang terlihat cukup signifikan. Pembagian ini mencerminkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk, struktur mata pencaharian, ketersediaan infrastruktur, serta akses terhadap layanan dasar, yang turut memengaruhi variasi kondisi kesejahteraan dan karakteristik kemiskinan antarwilayah.

Wilayah perkotaan di Kabupaten Kendal umumnya terkonsentrasi di kawasan tengah hingga utara yang berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta kawasan industri, termasuk area yang terhubung dengan koridor Pantura dan Kawasan Industri Kendal. Wilayah ini memiliki akses infrastruktur yang relatif lebih baik, seperti jalan, transportasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta jaringan ekonomi yang lebih dinamis. Namun, kemiskinan di wilayah perkotaan cenderung bersifat terselubung dan struktural, ditandai oleh keberadaan pekerja sektor informal, buruh berupah rendah, serta rumah tangga yang tinggal di permukiman padat dengan kualitas hunian dan sanitasi terbatas. Tekanan biaya hidup yang lebih tinggi di kawasan perkotaan juga meningkatkan kerentanan kelompok berpendapatan rendah terhadap gejolak ekonomi dan inflasi.

Sementara itu, **wilayah perdesaan di Kabupaten Kendal** lebih banyak tersebar di bagian selatan serta sebagian wilayah tengah yang masih didominasi oleh aktivitas pertanian, perkebunan rakyat, dan usaha berbasis sumber daya alam. Kepadatan penduduk relatif lebih rendah, namun akses terhadap infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, serta pasar sering kali lebih terbatas dibanding kawasan perkotaan. Kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung berkaitan dengan rendahnya produktivitas usaha pertanian, keterbatasan diversifikasi pendapatan, serta ketergantungan pada musim dan kondisi alam. Selain itu, keterisolasian beberapa desa, khususnya di wilayah perbukitan, turut memperbesar kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi.

Berdasarkan karakteristik kawasan yang telah diuraikan, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kendal bersifat multidimensional dan berkaitan erat dengan sejumlah determinan utama pembangunan. Determinan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, pertanian dan perikanan, ketahanan pangan, serta sosial kemasyarakatan. Keterkaitan antarbidang ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga oleh rendahnya akses terhadap layanan dasar, terbatasnya peluang ekonomi, serta kerentanan sosial yang dialami masyarakat.

E. PERMASALAHAN KEMISKINAN

1 Kondisi Pendidikan

Kemiskinan dalam pendidikan ini nampak dan terartikulasi pada indikator-indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan keluasan aspek dan akses pendidikan dengan mengukur persentase

total murid (tanpa memandang usia) yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia sekolah yang relevan untuk jenjang tersebut, menunjukkan kapasitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) lebih spesifik, mengukur persentase murid yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dan berada dalam kelompok usia sekolah yang seharusnya untuk jenjang tersebut, dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia yang relevan. Kedua indikator ini, yang diukur secara terpisah untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, sangat penting untuk memahami sejauh mana pendidikan dapat berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan.

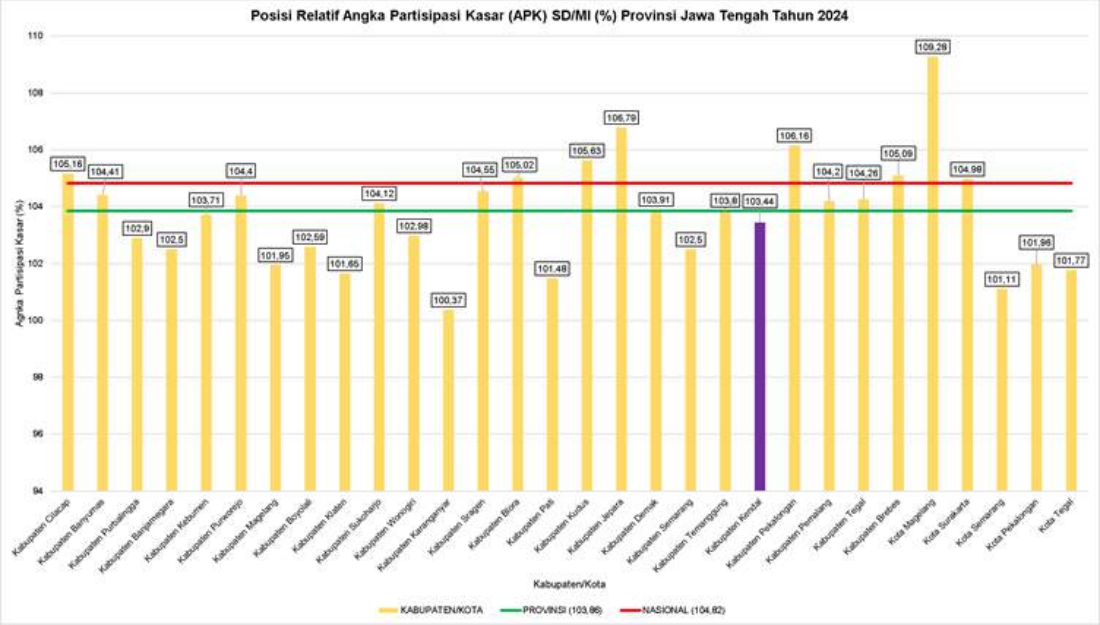

Gambar II-18 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

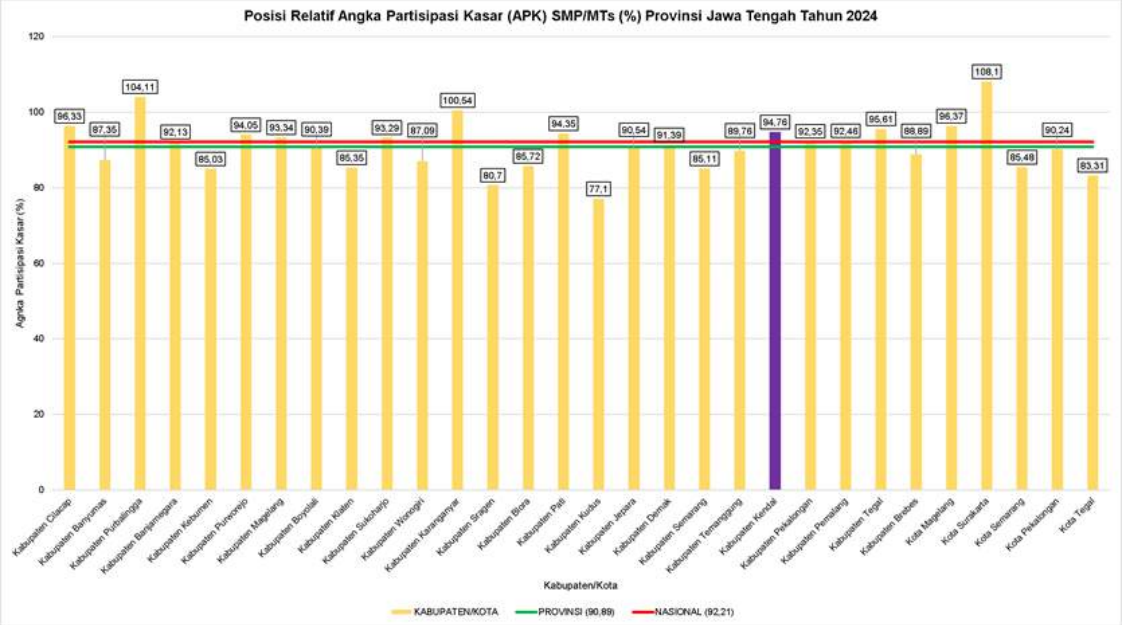

Gambar II-19 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

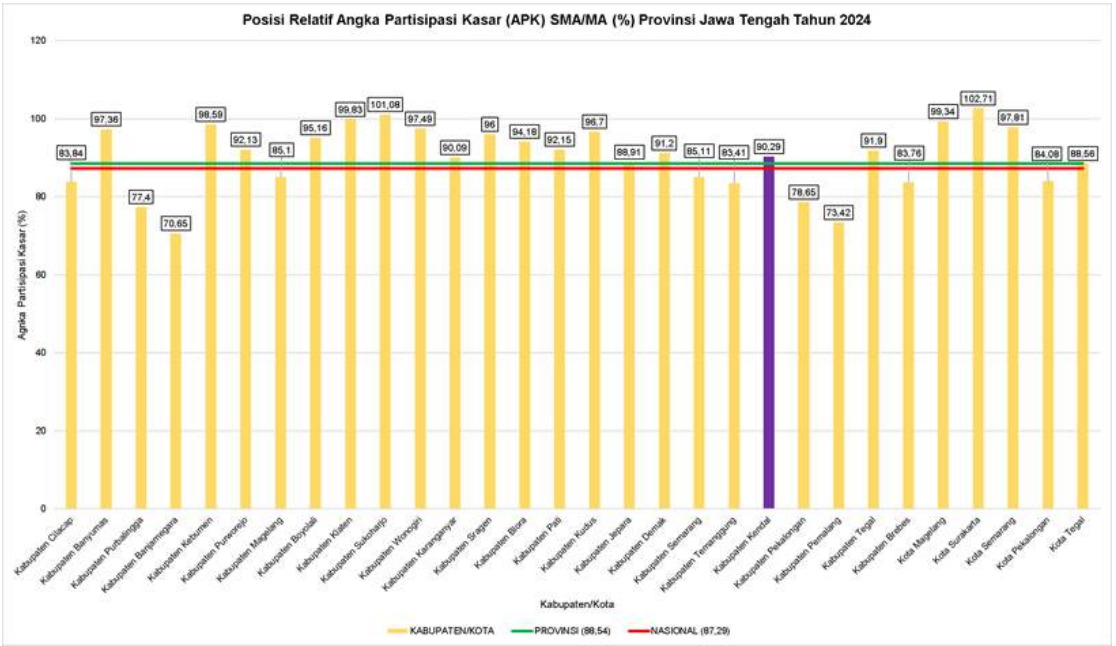

Gambar II-20 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Nilai APK di tahun 2024 pada Kabupaten Kendal cenderung memiliki angka yang mirip dan lebih baik daripada nilai Nasional maupun provinsi pada berbagai jenjang pendidikan. Pada tingkat SD Kabupaten Kendal memperoleh nilai sebesar 103,44%, Nilai tersebut berada di bawah

capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 103,86% dan dibawah capaian Nasional yaitu 104,82%. Tingkat SMP Kabupaten Kendal memperoleh capaian sebesar 94,76%. Nilai tersebut berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 90,89% dan di atas capaian Nasional yaitu 92,41%. Tingkat SMA Kabupaten Kendal memperoleh nilai sebesar 90,29%. Nilai tersebut berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dengan selisih sebesar 1,75% dan juga berada di atas capaian Nasional sebesar 3%.

Tren nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kendal menunjukkan adanya fluktuasi yang bervariasi antar jenjang pendidikan. Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung menunjukkan penurunan APK, mengindikasikan potensi tantangan dalam mempertahankan atau menarik siswa pada jenjang tersebut. Berbeda halnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang justru menunjukkan kenaikan APK, menandakan adanya peningkatan akses atau partisipasi siswa pada jenjang ini.

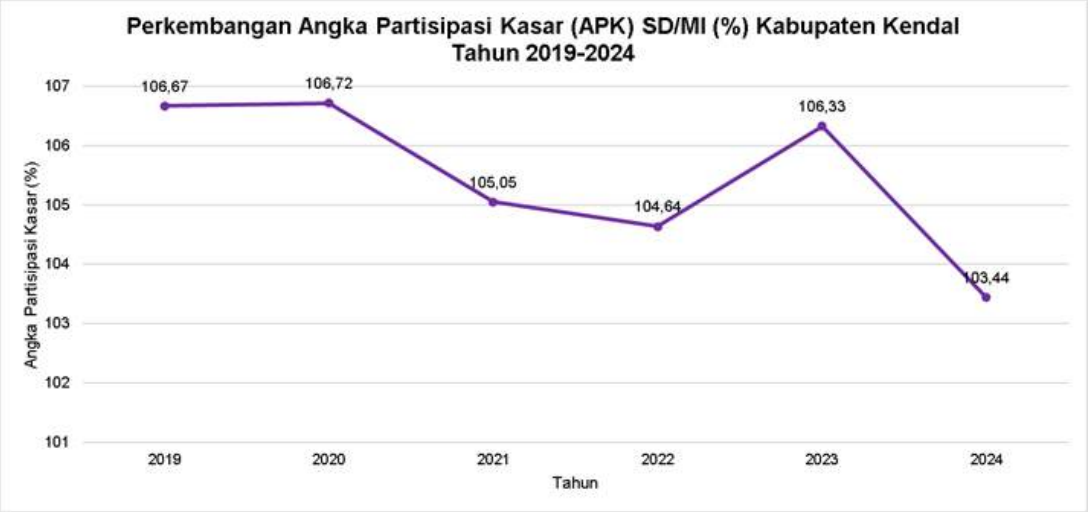

Gambar II-21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

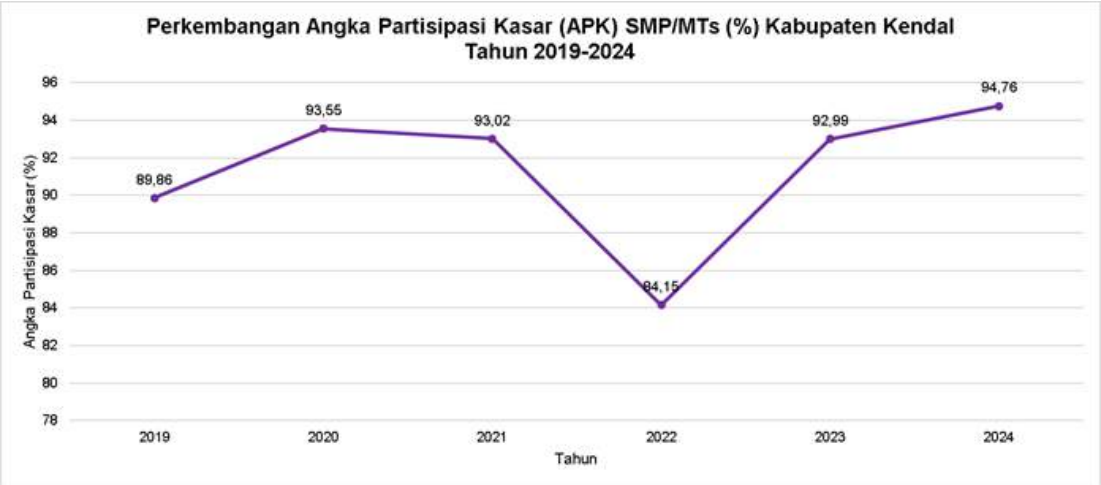

Gambar II-22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

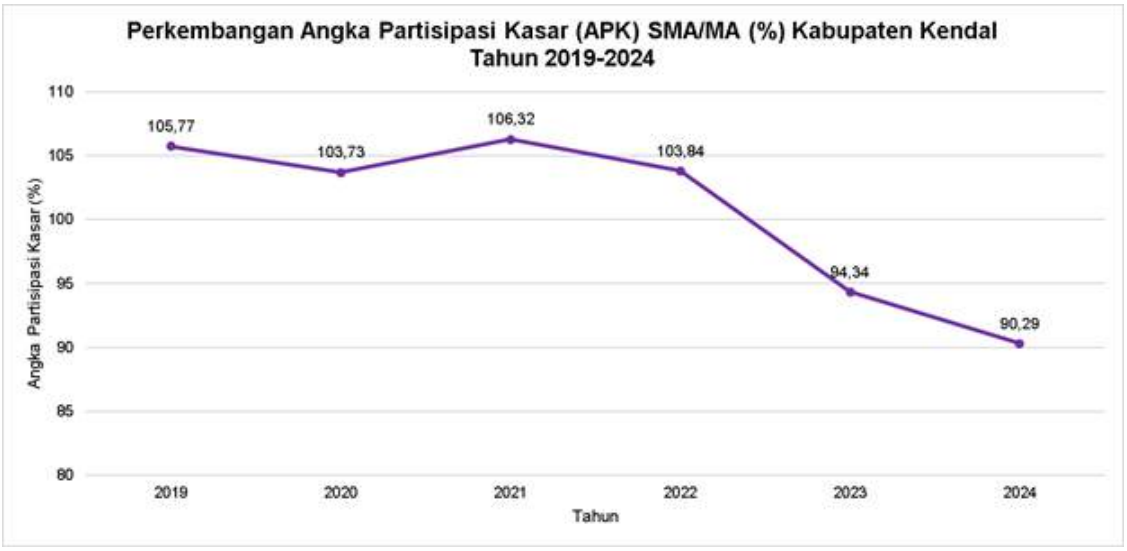

Gambar II-23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Nilai APM pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal menunjukkan variasi nilai yang beragam dengan nilai Provinsi maupun Nasional. Tingkat SD menunjukkan jika Kabupaten Kendal memperoleh capaian sebesar 96,73%, capaian tersebut berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dengan selisih sebesar 1,73% dan berada di bawah capaian nasional sebesar 1,21%. Pada jenjang SMP Capaian APM SMP/MTs Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 85,59%, Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah dengan selisih sebesar 4,03% serta lebih tinggi dari capaian nasional yaitu 3,86%. Terakhir pada tingkat SMA menunjukkan jika

capaian APM SMA/MA di Kabupaten Kendal sebesar 69,03%, capaian tersebut lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 61,46% serta lebih tinggi dari capaian Nasional yaitu 64,32%.

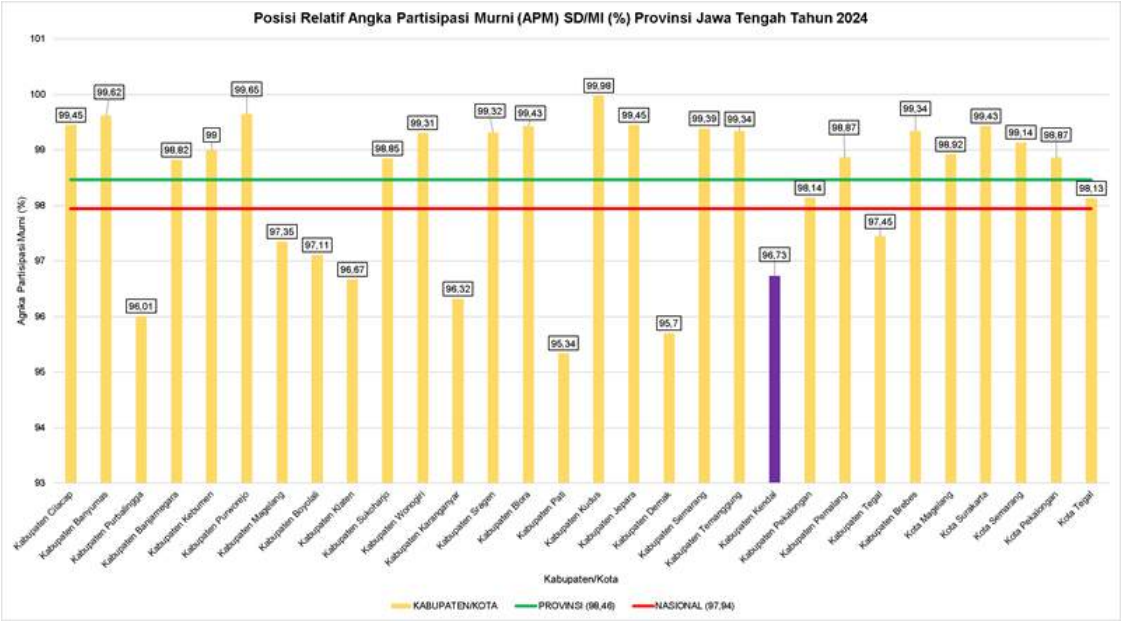

Gambar II-24 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

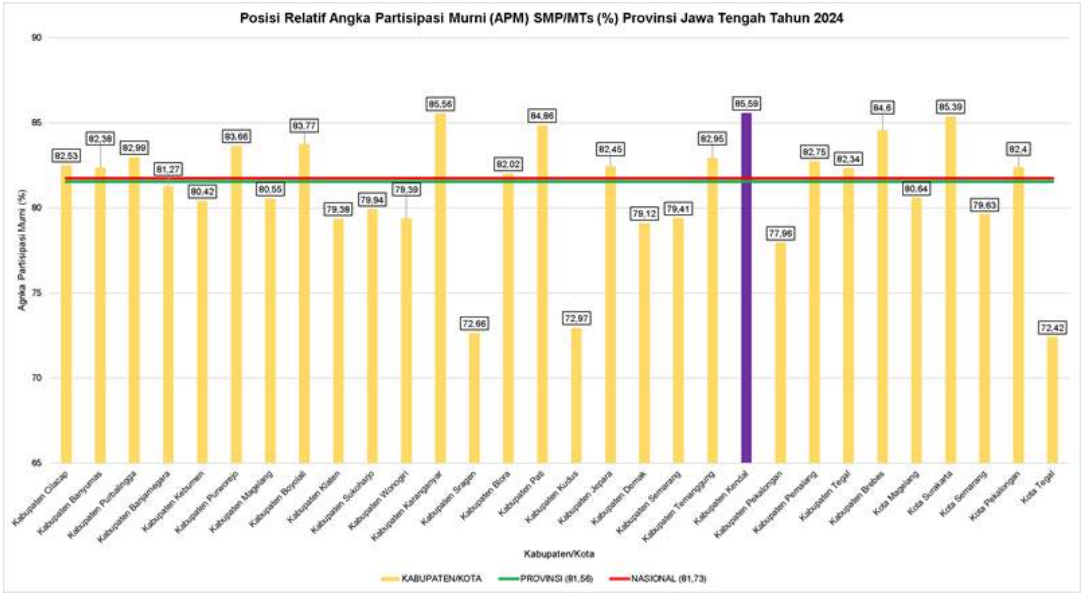

Gambar II-25 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

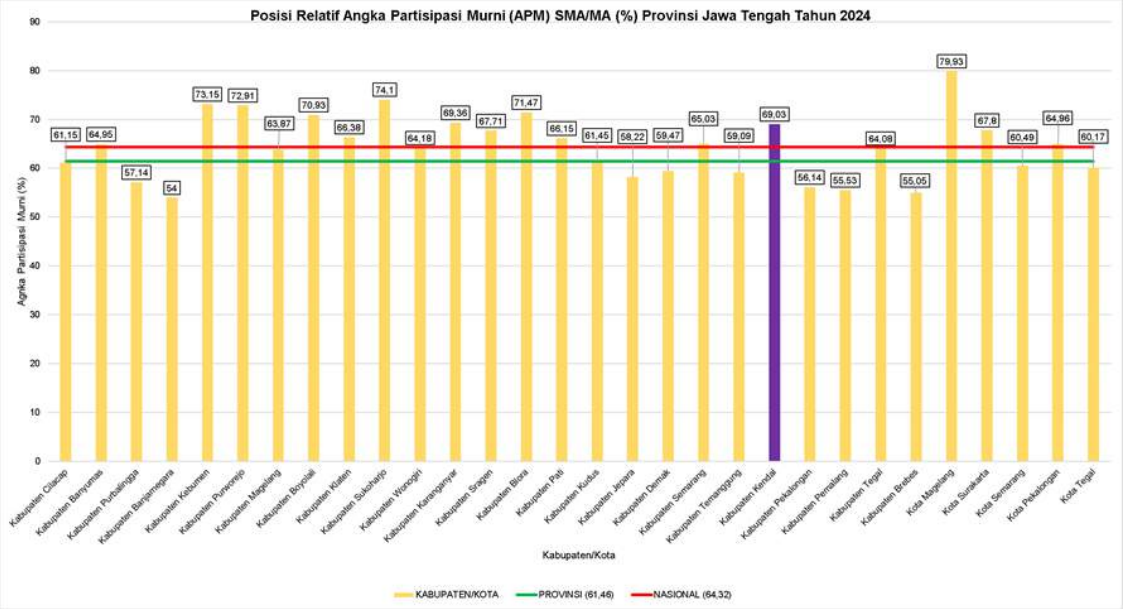

Gambar II-26 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Tren pada nilai APM di Kabupaten Kendal menunjukkan adanya kecenderungan nilai yang meningkat pada berbagai jenjang. Data tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya tren yang positif dari SD, SMP, maupun SMA. Kenaikan terbesar berada pada jenjang SMP yang menunjukkan kenaikan hingga 12 poin. mengindikasikan keberhasilan yang substansial dalam menjangkau dan mempertahankan siswa pada kelompok usia yang tepat untuk jenjang tersebut.

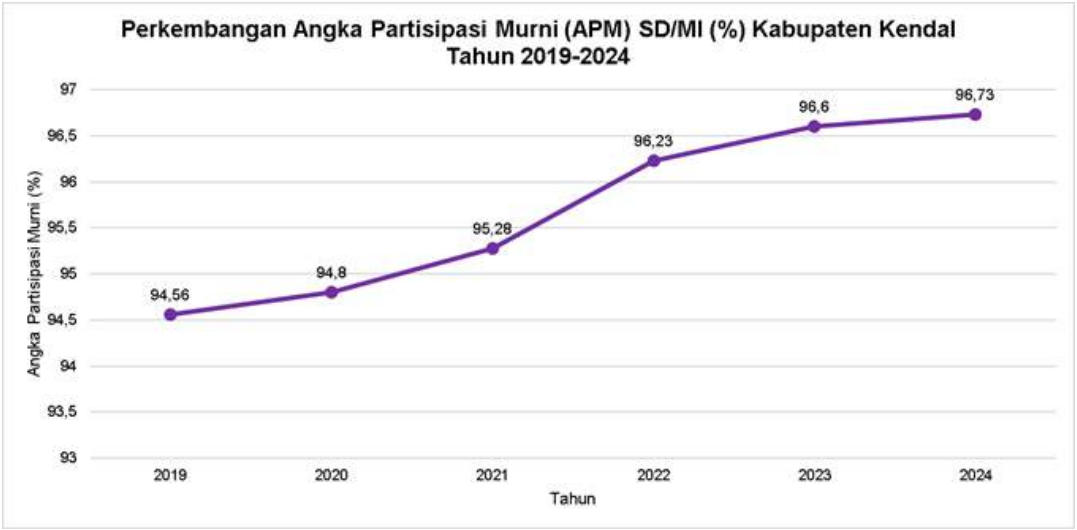

Gambar II-27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

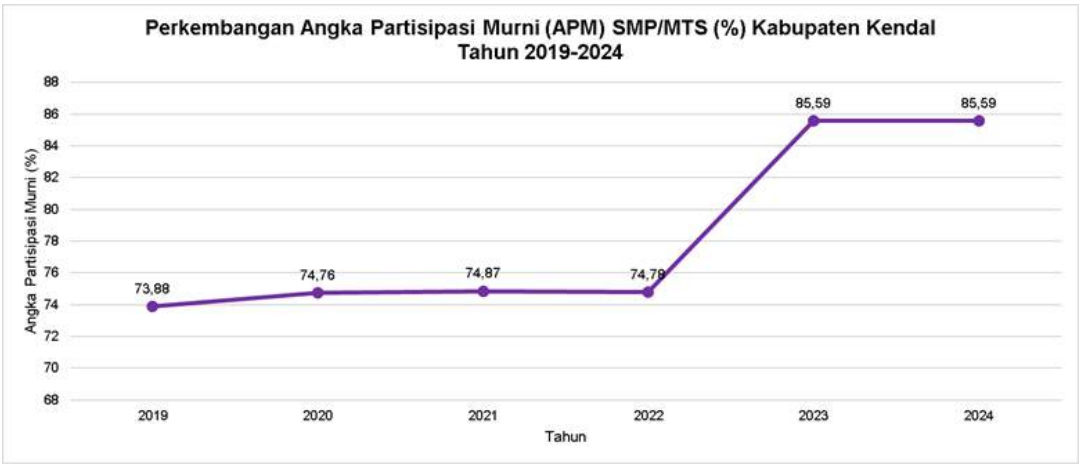

Gambar II-28 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

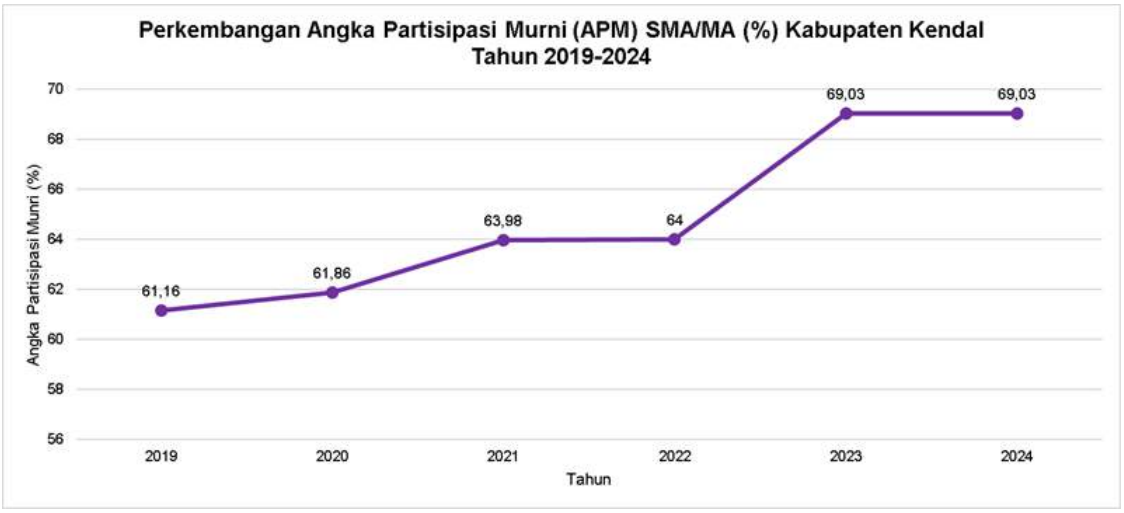

Gambar II-29 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Intervensi yang dilakukan perlu untuk mempertahankan nilai yang telah didapatkan pada APM yang menunjukkan tren positif selama 5 tahun terakhir. Peningkatan nilai APK, dan APM diperlukan agar dapat mencapai wajib belajar selama 12 tahun. Upaya peningkatan kuantitas dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan sedangkan kualitas dilakukan dengan pengembangan kurikulum dan upgrading tenaga pengajar. Selain itu sasaran juga ditujukan kepada menurunkan angka putus sekolah.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, permasalahan kemiskinan yang berakar pada sektor pendidikan di Kabupaten Kendal memerlukan intervensi yang terarah. Prioritas penanganan harus mencakup peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi

Murni (APM), , di samping upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Langkah-langkah ini krusial untuk memastikan bahwa pendidikan di Kabupaten Kendal memenuhi standar yang relevan dan dapat secara efektif berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara lebih luas. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah dengan menurunnya tingkat jumlah siswa yang tidak lanjut saat SMP menuju ke SMA.

Tingkat jumlah siswa yang tidak lanjut dapat mencerminkan kondisi dari nilai APM maupun APK. Hal ini dikarenakan siswa tidak lanjut berarti terjadi perubahan APM maupun APK dari jenjang SMP ke SMA, dan terjadi pengurangan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang mewajibkan sekolah hingga 12 tahun, sehingga indikator tersebut dapat digunakan sebagai target jangka panjang sebagai indikator pengentasan kemiskinan pada bidang pendidikan. Indikator lain yang digunakan setelah mengetahui tingkat siswa yang tidak lanjut adalah dengan menggunakan angka harapan lama sekolah.

Dengan demikian, penurunan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya menjadi titik krusial dalam strategi pembangunan pendidikan daerah. Upaya intervensi perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan akses masuk sekolah, tetapi juga pada penguatan faktor-faktor yang membuat siswa mampu bertahan hingga menyelesaikan pendidikan menengah, seperti dukungan pembiayaan, kualitas layanan pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Keberhasilan menekan angka siswa tidak lanjut akan berdampak pada meningkatnya partisipasi pendidikan secara berkelanjutan, yang pada akhirnya tercermin dalam kenaikan angka harapan lama sekolah. Dalam jangka panjang, peningkatan capaian pendidikan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan seperti melanjutkan sekolah hingga 12 tahun dapat didorong melalui pengembangan pendidikan formal maupun informal, sementara secara internal, kualitas pendidikan perlu terus ditingkatkan guna menarik minat masyarakat untuk melanjutkan dan menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, beberapa program utama yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kendal meliputi: (i) Program Pengelolaan Pendidikan.

2 Kondisi Kesehatan

Data menunjukkan bahwa capaian AKI kabupaten Kendal lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan lebih rendah daripada nasional. Pada tahun 2020, capaian AKI Kabupaten Kendal sebesar 115,79. Sedangkan capaian Provinsi Jawa Tengah lebih rendah 17,19 dari Kabupatataten Kendal dimana AKI provinsi sebesar 98,6. Dibandingkan dengan data nasional, Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah berada jauh di bawah dimana capaian AKI

Nasional sebesar 189. Artinya, angka kematian ibu masih sangat tinggi di tingkat nasional dibandingkan dengan Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah.

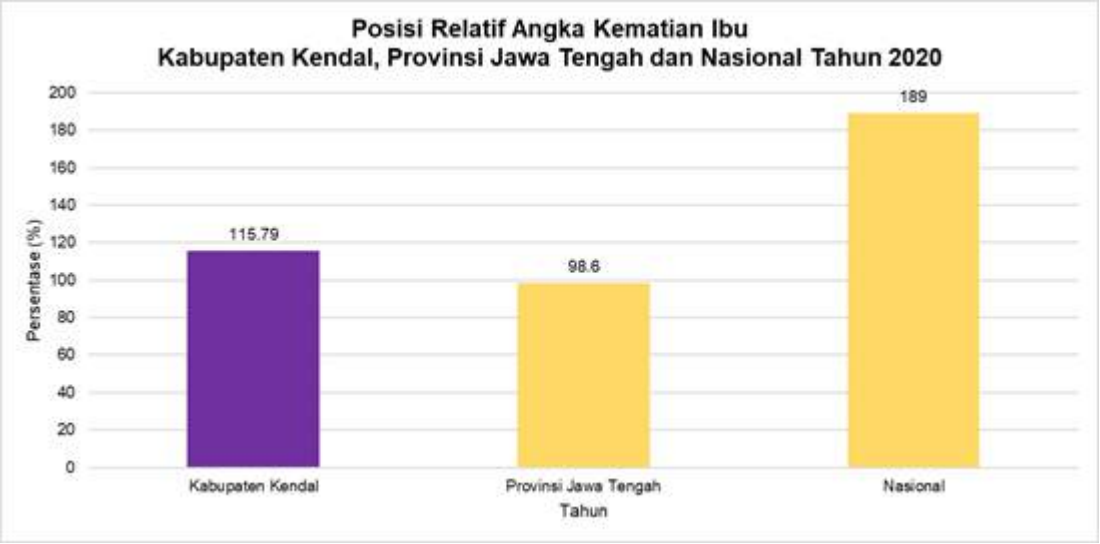

Gambar II-30 Posisi Relatif Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Kendal pada periode waktu 5 (lima) tahun menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, angka kematian ibu sebesar 104 naik menjadi 115,78 pada tahun 2020. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2021 sebesar 111,21 menjadi 227. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 menjadi saat yang paling rentan untuk ibu hamil dan menyusui serta menjadi salah satu faktor yang meningkatkan capaian AKI. Tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2021 sebesar 89,69 menjadi 137,31. Penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2023 menjadi 134,53 lalu naik kembali menjadi 194,48 pada tahun 2024.

Gambar II-31 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Semakin rendah nilainya, menunjukkan semakin baiknya fasilitas kesehatan pada suatu daerah tertentu. Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 9,6. Dibandingkan AKB Provinsi Jawa Tengah, terdapat perbedaan sebesar 2 dimana capaian AKB Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,60. Pada tingkat nasional, AKB Kabupaten Kendal masih berada di bawah capaian AKB nasional sebesar 14,10. Capaian AKB tertinggi di Provinsi Jawa Tengah diperoleh Kabupaten Rembang sebesar 13, sedangkan AKB terendah yaitu Kabupaten Cilacap dengan capaian sebesar 3,3. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal menempati peringkat ke – 8. Hal ini menunjukkan masih buruknya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal sehingga angka kematian bayi masih tinggi.

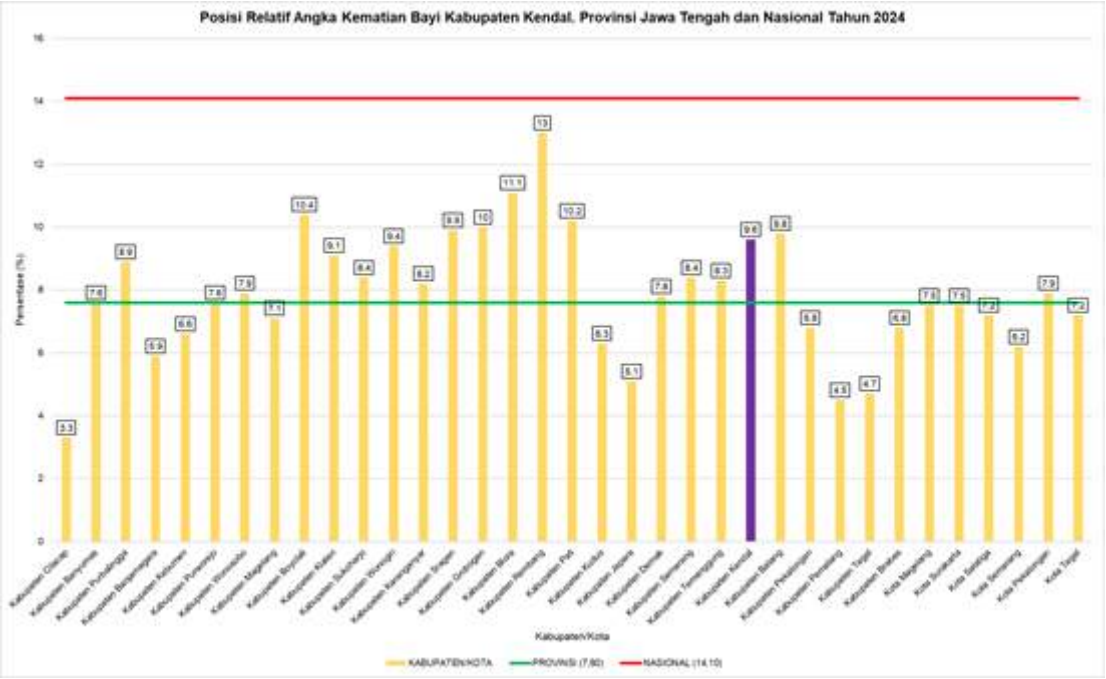

Gambar II-32 Posisi Relatif Angka Kematian Bayi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tenga, 2024

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kendal pada kurun waktu 2019 – 2024 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 angka kematian bayi sebesar 9,6% dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 10% pada tahun 2020. Setelah tahun 2020, tren AKB menunjukkan penurunan selama 2 tahun yaitu pada tahun 2021 sebesar 8,2% dan tahun 2022 sebesar 7,2%. Meningkatnya angka kematian bayi di tahun 2020 disebabkan Pandemi COVID-19. Setelah itu selama kurun waktu 2 tahun berikutnya terjadi penurunan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dalam menangani kasus. Selain itu, pandemi juga mulai terkendali sehingga jumlah kematian bayi semakin berkurang. Setelah tahun 2022 terdapat kenaikan angka kematian bayi dimana pada tahun 2023 sebesar 8,2% dan pada tahun 2024 sebesar 9,6%. Kembali naiknya tren tersebut disebabkan kembali tingginya jumlah stunting yang berkontribusi terhadap peningkatan AKB.

Gambar II-33 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2024

Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat yang dilihat dari rata – rata tahun hidup yang dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai tahun tertentu saat meninggal. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 74,73 tahun. Dibandingkan data nasional, Kabupaten Kendal lebih unggul 0,53 dibandingkan nasional sebesar 74,20 tahun. Sementara itu, dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Tengah, terdapat perbedaan sebesar 0,18 tahun dimana AHH Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,91 tahun dan menempatkan Kabupaten Kendal berada pada urutan 26 diantara kota/kabupaten di Jawa Tengah. Artinya, AHH Kabupaten Kendal belum memenuhi rata – rata capaian angka harapan hidup milik Provinsi Jawa Tengah. Wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan AHH tertinggi yaitu Kota Salatiga dengan capaian AHH sebesar 78,27 tahun. AHH terendah dicapai oleh Kabupaten Brebes sebesar 74,18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal sehingga capaian AHH masih di ambang rata – rata baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat nasional.

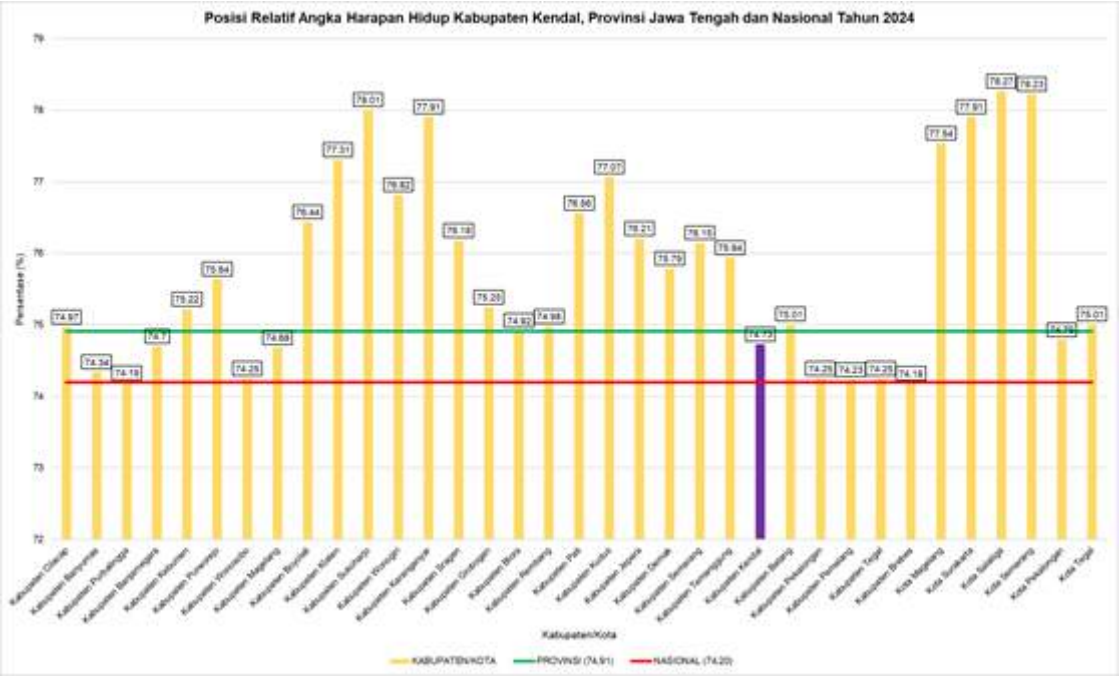

Gambar II-34 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Kendal memiliki tren yang terus naik. Pada tahun 2019-2024 AHH Kabupaten Kendal terus mengalami kenaikan yang menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan 0,1 dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 tercapai sebesar 74,33 dan pada tahun 2020 sebesar 74,43. Selanjutnya, selama 3 tahun berturut – turut pada tahun 2021-2023 terjadi kenaikan secara konsisten sebesar 0,05. Kenaikan paling besar terjadi pada tahun 2024 mencapai 0,15 dimana pada tahun 2023 sebesar 74,58 naik sebesar 74,73 tahun. Hal ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar II-35 Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2024

Stunting merupakan kondisi ketika balita memiliki kondisi pendek dan sangat pendek maupun status gizi yang lebih rendah berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Capaian angka stunting di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 11,7. Dibandingkan data nasional, Kabupaten Kendal memiliki kondisi yang lebih baik 8,10 dibandingkan nasional sebesar 19,80. Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, terdapat perbedaan sebesar 1,7 dimana stunting di Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,00 dan menempatkan Kabupaten Kendal berada pada urutan 14 diantara kota/kabupaten di Jawa Tengah. Artinya, angka stunting Kabupaten Kendal belum memenuhi rata – rata capaian milik Provinsi Jawa Tengah. Wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan stunting tertinggi yaitu Kabupaten Wonosobo dengan capaian sebesar 18,2. Stunting terendah dicapai oleh Kabupaten Demak sebesar 2,1. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya fasilitas atau program yang mendukung pengurangan angka stunting di Kabupaten Kendal maupun di tingkat Nasional.

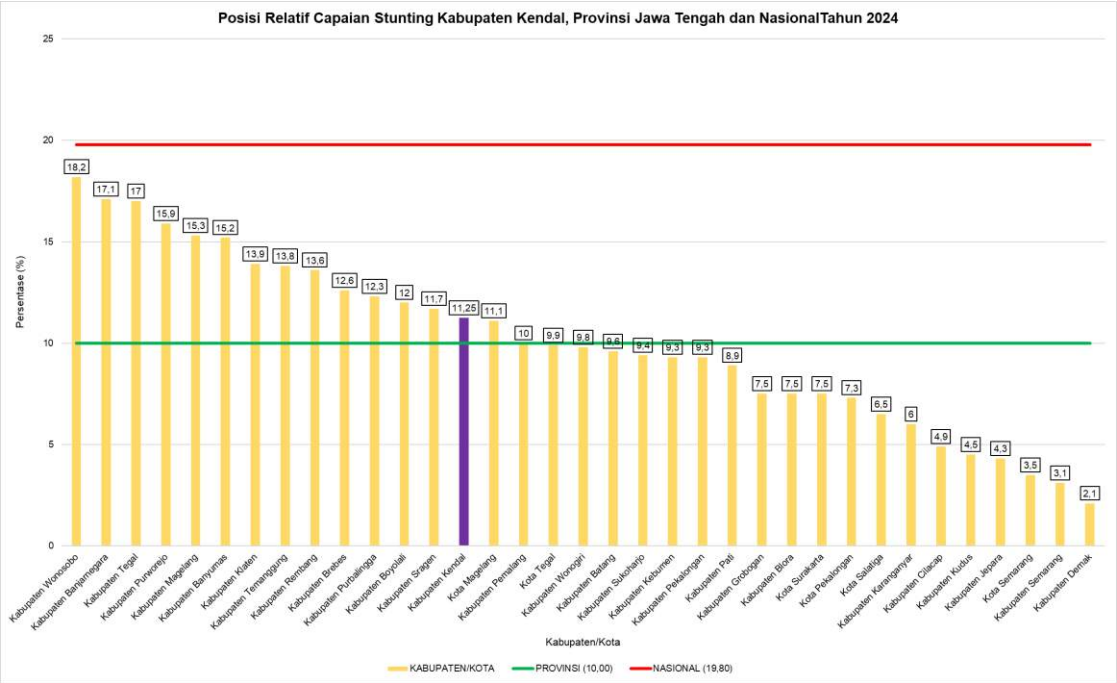

Gambar II-36 Posisi Relatif Stunting di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Perkembangan angka stunting Kabupaten Kendal memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan angka stunting yang sangat signifikan dimana pada tahun 2019 sebesar 2,2 naik menjadi 21,4. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 serta menunjukkan program pemerintah untuk stunting di masa pandemi masih belum efektif. Selanjutnya pada tahun 2021, turun drastis sebesar 11,9 menjadi 9,5. Angka stunting kembali naik pada tahun 2022 menjadi 11,4 dan terus naik hingga tahun 2024 sebesar 11,7.

Gambar II-37 Perkembangan Antar Waktu Stunting di Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2024

Bidang kesehatan menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Terdapat beberapa parameter yang krusial dan menjadi perhatian utama untuk intervensi program yang terkait dengan bidang kesehatan di Kabupaten Kendal. Parameter tersebut antara lain adalah: Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), , dan Angka Stunting.

Angka Kematian Ibu (AKI) yang berada di Kabupaten Kendal cenderung menunjukkan angka yang cukup tinggi. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai provinsi, pada tahun 2024 menunjukkan angka 194,48 sedangkan pada provinsi hanya menunjukkan 74,73. Tren nilai AKI pada Kabupaten Kendal menunjukkan nilai yang mengalami kecenderungan yang fluktuatif, namun cenderung untuk meningkat.

Angka kematian bayi (AKB) yang berada di Kabupaten Kendal menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada nilai nasional pada tahun 2024. AKB pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal menunjukkan angka 9,6 sedangkan nasional berada di angka 14,10. Nilai AKB juga cenderung fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024, namun menunjukkan adanya kecenderungan nilai yang menurun.

Angka stunting yang berada di Kabupaten Kendal menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada nilai nasional, namun lebih rendah daripada nilai Provinsi pada tahun 2024. Fluktuasi angka stunting menunjukkan adanya tren kenaikan hingga tahun 2024. Naiknya angka stunting secara perlahan hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa program dan kebijakan pemerintah untuk menangani stunting masih belum efektif untuk kembali ditekan seperti pada tahun 2019.

Penekanan yang diperlukan untuk menekan dalam bidang kesehatan adalah perlu adanya penjaminan kesehatan ibu dan anak. Penjaminan kesehatan ibu dan anak dapat dicirkan dari penurunan nilai angka kematian ibu maupun bayi. Selain itu, infrastruktur kesehatan dasar yang dapat mendukung penurunan angka stunting juga perlu menjadi perhatian. Bentuk Upaya menjaga kesehatan dapat dilangsungkan pada dua sasaran yakni kesehatan secara perorangan dan secara masyarakat. Berikut adalah beberapa program yang dapat dilakukan dalam bidang kesehatan yaitu (i) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dan (ii) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

3 Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 5,01%. Capaian ini menunjukkan TPT Kabupaten Kendal lebih tinggi sekitar 0,11% dibandingkan dengan capaian TPT Nasional, yaitu sekitar 4.90%. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Tengah, Kabupaten Kendal menduduki peringkat ke-11 TPT tertinggi dan yang capaiannya lebih tinggi dari nasional. Kota/kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki TPT tertinggi yaitu

Kabupaten Brebes sebesar 8,35%. Sedangkan kota/kabupaten yang memiliki TPT terendah, yaitu Kabupaten Temanggung sebesar 2,35%. Capaian TPT Kabupaten Kendal termasuk tinggi karena masih diatas rata – rata capaian TPT provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan, persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kendal masih belum memadai. Adanya Kawasan Industri Kendal (KIK) belum dapat menekan angka TPT. Selain itu kurangnya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga mempengaruhi masih tingginya capaian TPT di Kabupaten Kendal.

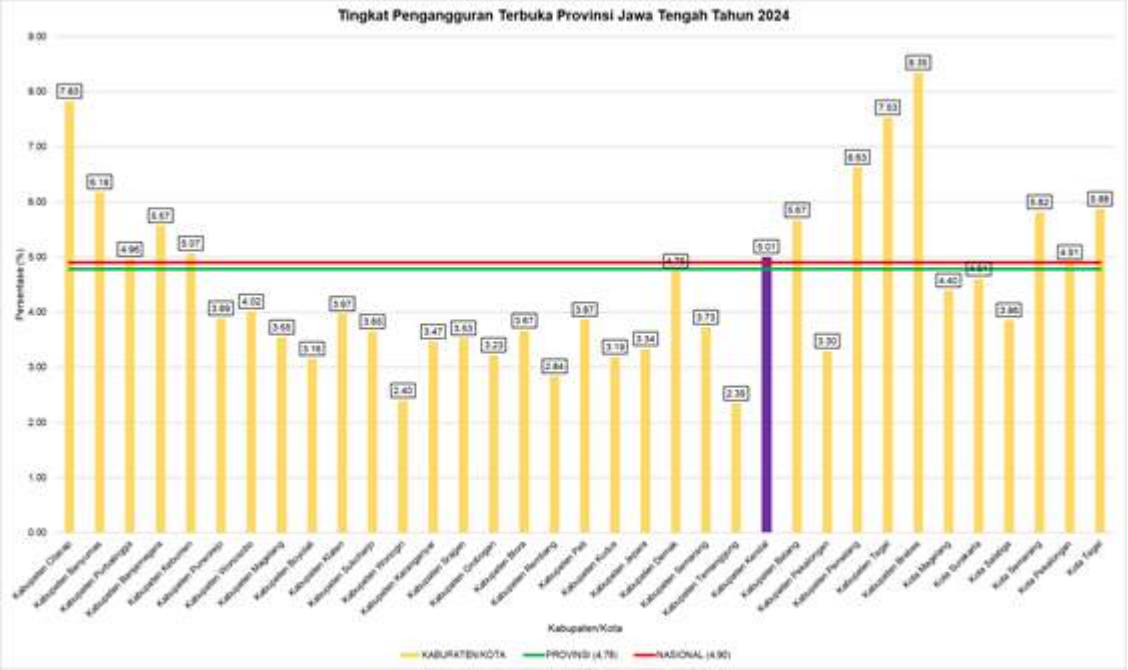

Gambar II-38 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Secara time series atau dari periode 2019-2024, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal cenderung mengalami penurunan. Tahun 2020 TPT naik sebesar 1,3% lalu selanjutnya terus turun hingga tahun 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2023 sebesar 1,58% yang semulanya di tahun 2022 sebesar 7,34% turun menjadi 5,76%. Naiknya tren angka TPT pada tahun 2020 disebabkan karena Pandemi COVID-19. Hal ini sangat berdampak kepada kondisi ekonomi di hampir semua sektor yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Sedangkan penurunan di tahun selanjutnya terjadi karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kondisi ekonomi mulai membaik. muncul investor baru di KIK dan kembali menggeliatnya aktivitas UMKM lokal.

Gambar II-39 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2024

Analisis bidang kemiskinan bidang ketenagakerjaan mengidentifikasi dua parameter yang menjadi permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka TPT Kabupaten Kendal (5,01 %) lebih tinggi sekitar 0,11% dibandingkan dengan capaian TPT Nasional (4,90 %) pada tahun 2024. Jika dibandingkan dalam kabupaten/kota lain dalam provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Kendal menduduki posisi ke-11 TPT tertinggi dan yang capaiannya lebih tinggi dari nasional.

Dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 menunjukkan gambaran yang terbalik: tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 76,85%—jauh di atas rata-rata nasional dan provinsi mengindikasikan semangat besar masyarakat untuk terlibat dalam dunia kerja. Namun, fenomena positif ini diiringi oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga melampaui angka nasional, mencapai 5,01%. Hal ini menyiratkan bahwa, meskipun banyak penduduk yang aktif mencari nafkah, Kabupaten Kendal masih bergulat dengan isu ketersediaan lapangan kerja yang sepadan atau kesenjangan antara keterampilan angkatan kerja dan kebutuhan pasar, yang mengakibatkan banyak dari mereka yang berpartisipasi aktif tetap berada dalam kondisi menganggur.

Intervensi yang perlu dilakukan adalah menurunkan nilai TPT. Penekanan angka TPT diperlukan dengan memperbanyak lapangan pekerjaan dan masyarakat yang terlibat didalamnya. Secara umum, program yang disusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kerja dan fasilitasi hubungan antara pasar dan kebutuhan tenaga kerja (*link and match*). Program yang dicanangkan antara lain adalah: (i) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, (ii) program penempatan tenaga kerja, (iii) program hubungan industrial, (iv) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, (v) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha

Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), (vi) Program Pengembangan UMKM, dan (vii) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4 Kondisi Infrastruktur Dasar

Sanitasi masih menjadi permasalahan, terutama di permukiman padat yang belum memiliki sanitasi layak dan masih terdapatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang belum terselesaikan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berikut ini dijelaskan posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi Kabupaten Kendal di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Berdasarkan grafik (3.72), capaian persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (%) di Kabupaten Kendal berada di bawah capaian Provinsi dan Nasional. Kabupaten Kendal pada tahun 2024 mencatat capaian sebesar 83,05%, sedangkan capaian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu 86,72%, dan Nasional sebesar 83,6%. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berasosiasi dengan Kabupaten Kendal seperti Kota Semarang, Kabupaten Temanggung Kabupaten Kendal, Kota Semarang mampu mencapai angka 95,83%, Kabupaten Temanggung sebesar 71,77%, sedangkan Kabupaten Batang hanya mampu mencapai angka 65,92%. Dengan capaian tersebut, dapat diketahui bahwa penyediaan sarana prasarana perumahan, permukiman dan penyelanitasi perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup sudah cukup baik dan harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengejar capaian rerata nasional dan provinsi.

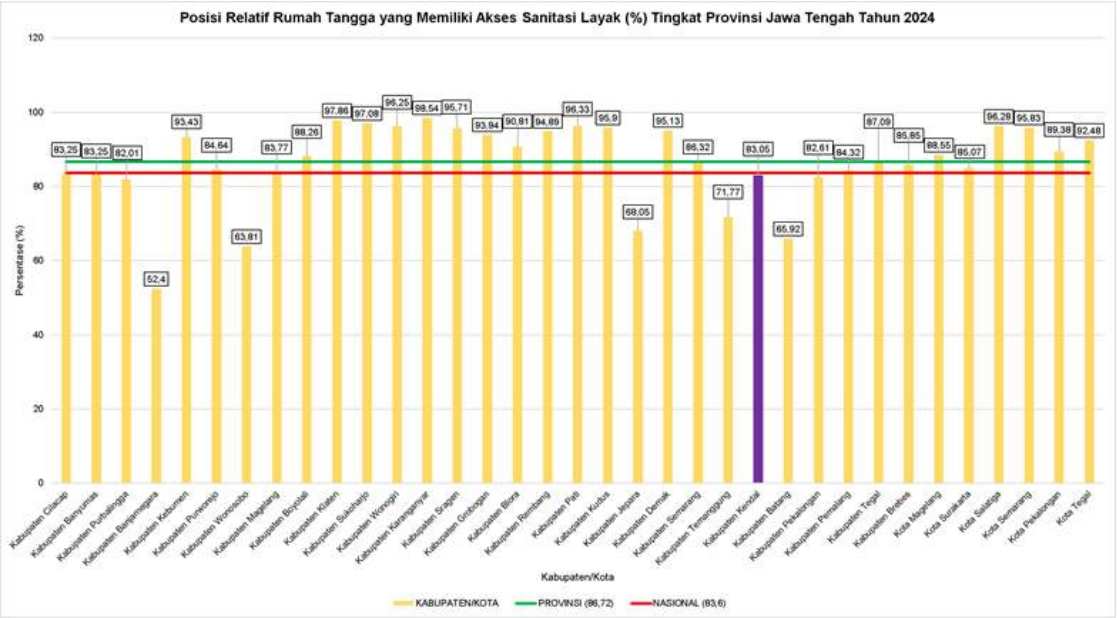

Gambar II-40 Posisi Relatif Persentase RT yang memiliki Akses ke Sanitasi Layak (%) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pada periode tahun 2019-2024, capaian Kabupaten Kendal menunjukkan perkembangan yang negatif dimana terjadi capaian yang tidak stabil atau fluktuatif yang cenderung menurun pada 5 tahun pertama . Hal ini ditunjukkan pada tahun 2019-2023, akses sanitasi layak Kabupaten Kendal menurun hingga 8,64%. Namun pada tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 4,72%. Meski dalam kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan yang cukup tinggi, namun Kabupaten Kendal dapat perlahan mengembalikan angka persentase ke angka 83,05%. Upaya meningkatkan dan mempertahankan konsistensi daripada nilai capaian akses sanitasi layak ini perlu dilakukan baik dengan program yang memfasilitasi sanitasi layak kepada masyarakat, sehingga dapat capaian sanitasi layak dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya.

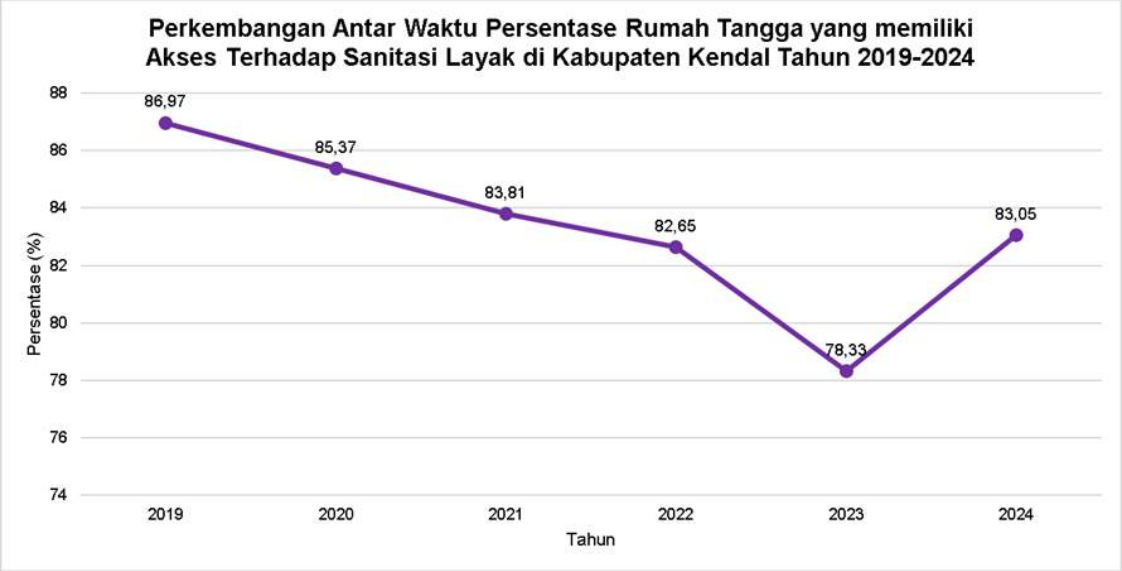

Gambar II-41 Perkembangan Persentase RT yang memiliki Akses ke Sanitasi Layak di Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu pada konsep terbaru tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Adapun konsep sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Berdasarkan gambar grafik posisi relatif (3.76), capaian persentase Rumah Tangga dengan sumber air minum layak (%) di Kabupaten Kendal berada di atas capaian provinsi dan nasional. Di tingkat nasional, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak sebesar 92,64%, artinya selisih 5,01% dari Kabupaten Kendal. Adapun di tingkat provinsi Jawa Tengah, selisih antara capaian provinsi dan Kabupaten Kendal mencapai 2,22%. Di tingkat regional, Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang memiliki selisih di angka 2,2% di bawah capaian Kota Semarang, sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Batang, capaian Kabupaten Batang lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Kendal.

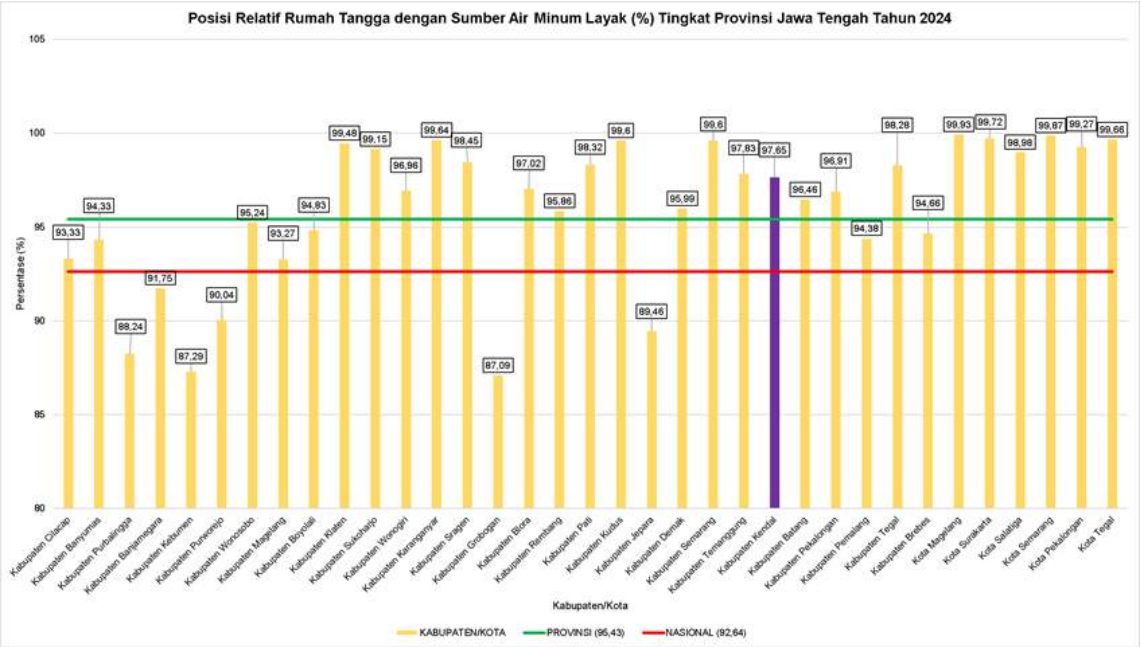

Gambar II-42 Posisi Relatif Persentase RT dengan Sumber Air Minum Layak (%) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam periode waktu 2019-2024, capaian persentase kondisi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, ketercapaian air minum layak yaitu 97,58%, namun 2 tahun selanjutnya, capaian tersebut turun masing-masing 1,8% di tahun 2020 dan di tahun 2021 sebesar 3,13% sehingga persentasenya menjadi 92,65%. Kendati demikian, pada tahun 2022-2024, capaian tersebut meningkat kembali secara beruturut-turut sebesar 2,5%, kemudian 1,63%, dan meningkat tipis pada tahun 2024 sebesar 0,87% sehingga persentasenya kembali di angka 97,65%. Tren fluktuatif yang terjadi dalam rentang 6 tahun tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal telah berhasil dalam meningkatkan kembali capaian persentase sumber air minum layak.

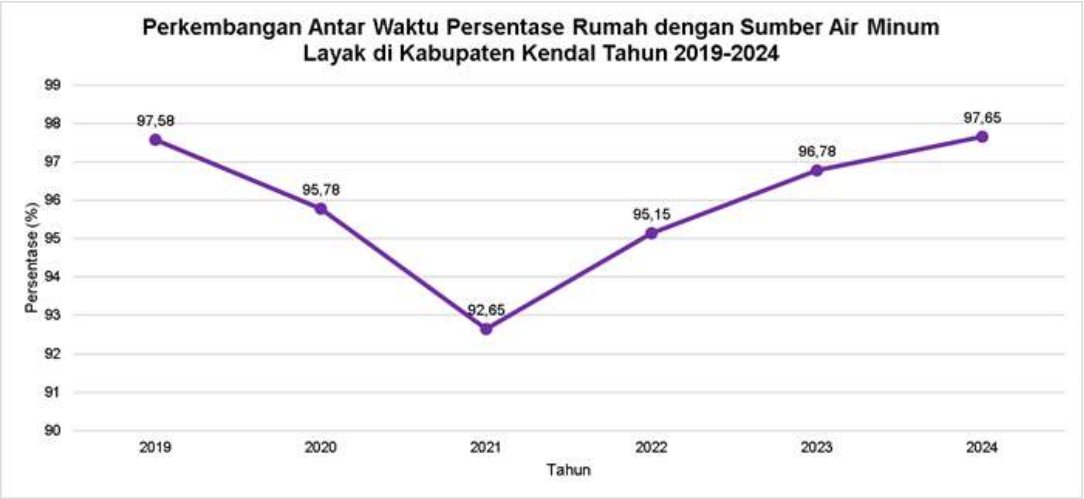

Gambar II-43 Perkembangan Persentase RT dengan Sumber Air Minum Layak (%) di Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kedua kriteria tersebut merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rumah layak huni. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (sufficient living space) (2) memiliki akses terhadap air minum layak (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak (4) ketahanan bangunan (durable housing). Kriteria akses terhadap air minum layak dijabarkan dengan sumber air minum yang baik dan RT yang menggunakan air kemasan/air isi ulang sebagai air minum. Akses sanitasi layak dijabarkan dengan kondisi fasilitas sanitasi sendiri/komunal, kloset leher angsa, dan tersedia septik tank atau sistem pengolahan air limbah (SPAL). Ketahanan bangunan dijelaskan dengan penggunaan bahan yang layak dan memenuhi syarat. Indikator yang dihitung adalah material atau jenis pada atap, dinding, dan lantai yang digunakan. Berikut adalah material yang dapat menjadi kriteria rumah layak huni. :

A. Atap terluas berupa beton, seng, fiber semen, metal, sirap, dan tanah liat;
B. Dinding terluas berupa kayu, batako, simpai, bata merah, bata ringan, dan beton;
C. Pondasi berupa umpak, batang besar/kecil, cerucug, dan batu kali;
D. Terdapat sloof;
E. Terdapat kolom;
F. Kusen berupa kayu, beton, dan alumunium;
G. Kuda-kuda berupa kayu, beton, dan baja ringan;
H. Plafon berupa triplek, papan kayu, gypsum, dan GRC;
I. Terdapat ring balok; dan
J. Lantai berupa kayu, plesteran, terasso, keramik, dan granit

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu, data rumah layak huni di Kabupaten Kendal cenderung menunjukkan adanya peningkatan persentase maupun jumlah rumah layak huni. Hal ini menunjukkan jika program untuk mengatasi rumah tidak layak huni berhasil sehingga dapat mencerminkan hasil dari peningkatan kualitas fisik rumah serta tersedianya akses terhadap prasarana dan sarana dasar permukiman. Kenaikan selalu terjadi dalam 5 tahun belakang menandakan program yang dicanangkan berhasil dan mampu meningkat rumah layak huni. Peningkatan jumlah rumah dari waktu ke waktu menunjukkan adanya tren positif. Tren positif ini memberikan gambaran jika program rumah layak huni bersifat efektif. Kenaikan nilai rumah layak huni menjadi tantangan bagi program yang dicanangkan agar mampu untuk mempertahankan nilainya, dan mengakomodasi untuk keperluan rumah bagi penduduk Kabupaten Kendal.

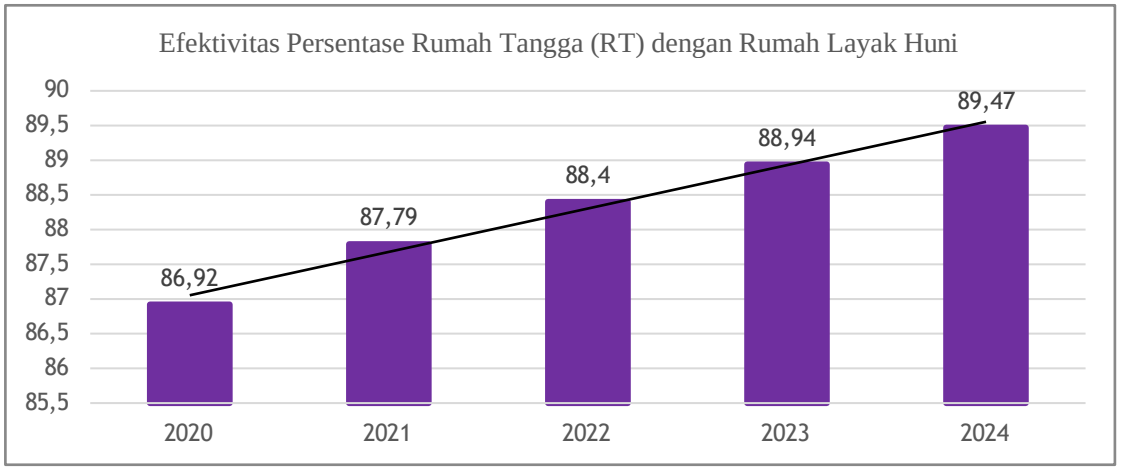

Gambar II-44 Grafik Efektivitas Rumah Tangga (RT) dengan Rumah Layak Huni

Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2024

Program ini terbukti relevan dan selaras dengan tujuan provinsi maupun nasional. Meskipun data dalam tingkat provinsi dan nasional tidak ditemukan, nilai peningkatan rumah layak huni ini dianggap sejalan dengan visi misi pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Target utama yang dicanangkan adalah 100 %, sehingga dengan nilai pada Kabupaten Kendal yang nyaris menyentuh angka 90 % menunjukkan peranan Kabupaten Kendal untuk terus meningkatkan persentase rumah layak huni di tingkat provinsi dan nasional.

Aspek infrastruktur dasar, khususnya di kawasan atau bidang permukiman menjadi isu yang harus ditangani dalam kerangka kemiskinan secara menyeluruh. Analisa yang dilakukan menunjukan kualitas infrastruktur dasar yang terdiri atas sanitasi, sumber air minum, sumber penerangan, dan kualitas hunian menjadi sub-aspek yang harus ditangani dalam kaitannya dengan kemiskinan. Indikator rumah layak huni dapat digunakan untuk mengukur secara infrastruktur dasar karena juga mencakup mengenai sumber air bersih dan sanitasi layak.

Untuk semakin menekan angka kemiskinan di bidang infrastruktur dasar, Pemerintah Kabupaten Kendal mencanangkan beberapa program yang secara terfokus menyasar peningkatan kualitas permukiman dan perumahan (Rumah Layak Huni) di Kabupaten Kendal. Program-program tersebut meliputi peningkatan dan perbaikan fisik hingga peningkatan tata kelola administrasi di bidang permukiman di Kabupaten Kendal. Beberapa program tersebut antara lain (i) Program Pengembangan Perumahan, (ii) Program Kawasan Permukiman, (iii) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, (iv) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, (v) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan (vi) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

5 Kondisi Pertanian dan Perikanan

Sektor pertanian dan perikanan memegang peranan penting dalam menopang kehidupan masyarakat, sejalan dengan karakter Indonesia sebagai negara agraris sekaligus maritim. Di Kabupaten Kendal, kedua sektor ini menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat perdesaan dan pesisir, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan perekonomian lokal. Ketersediaan pangan bagi populasi yang terus meningkat menuntut adanya peningkatan produksi pertanian, khususnya padi, secara berkelanjutan. Mayoritas petani mengelola usaha taninya melalui berbagai upaya intensifikasi guna mendorong peningkatan hasil panen dan pendapatan. Variasi produktivitas padi per hektare dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat kesuburan tanah, penggunaan pupuk, kualitas benih, teknik budidaya, serta gangguan organisme pengganggu tanaman. Di samping itu, kondisi anomali iklim seperti kelembapan dan curah hujan turut memberikan dampak terhadap output produksi pertanian.

Di sisi lain, subsektor perikanan (tawar maupun laut) juga memiliki peran strategis, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Kendal. Aktivitas perikanan menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah tangga nelayan dan pembudidaya, sekaligus penyedia protein hewani bagi masyarakat. Namun, produktivitas sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim, kualitas lingkungan perairan, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Kerentanan terhadap perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir, serta fluktuasi hasil tangkapan menyebabkan pendapatan pelaku usaha perikanan cenderung tidak stabil, sehingga meningkatkan risiko kerentanan ekonomi rumah tangga yang bergantung pada sektor ini.

Produktivitas padi Kabupaten Kendalmencapai 59,98 kuintal per hektar. Nilai ini berada pada kategori moderat (tidak termasuk yang tertinggi maupun terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) namun masih lebih tinggi dibandingkan produktivitas nasional yang tercatat sebesar 52,9%. Jika dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, produktivitas padi Kabupaten Kendal berada di atas Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, dengan selisih produktivitas sebesar 4,94% terhadap Kota Semarang. Secara

keseluruhan, kontribusi produktivitas padi Kabupaten Kendal memberikan pengaruh positif terhadap capaian produktivitas padi di tingkat nasional dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

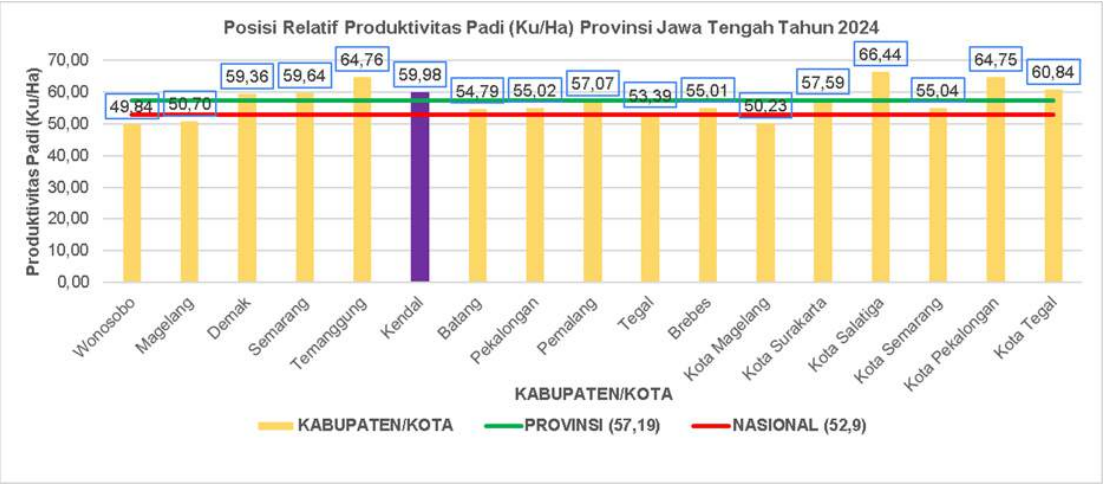

Gambar II-45 Posisi Relatif Produktivitas Padi (kw/ha) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan grafik perkembangan produktivitas padi tahun 2019–2024, Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang fluktuatif dan tidak stabil. Penurunan tajam terjadi dari 2019 ke 2020, yaitu dari 58,82% menjadi 55%. Tren penurunan berlanjut hingga 2023, meskipun sempat meningkat pada 2021 menjadi 55,27%. Setelah periode ketidakstabilan tersebut, peningkatan signifikan terjadi pada 2024 dengan capaian produktivitas 59,98%.

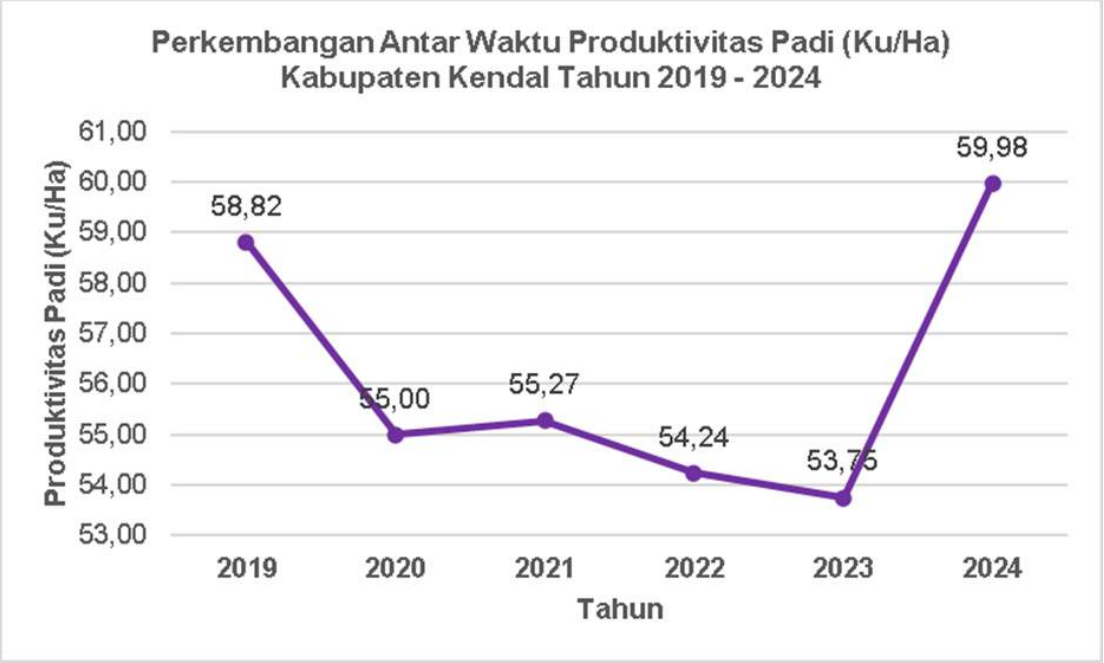

Gambar II-46 Perkembangan Antar Waktu Produktivitas Padi (kw/ha) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2025

Berdasarkan grafik posisi relatif produksi perikanan di pesisir utara Pulau Jawa, Kabupaten Kendal berada pada **kelompok menengah ke bawah** dibandingkan daerah pesisir lainnya. Total produksi perikanan Kendal tercatat sekitar **468 ribu ton**, masih berada di bawah Kabupaten Jepara, Demak, Batang, dan Kota Pekalongan. Bahkan, selisih produksi Kendal dengan Kabupaten Batang sebagai produsen terbesar dalam grafik tersebut terlihat sangat signifikan, menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas produksi antarwilayah pesisir.

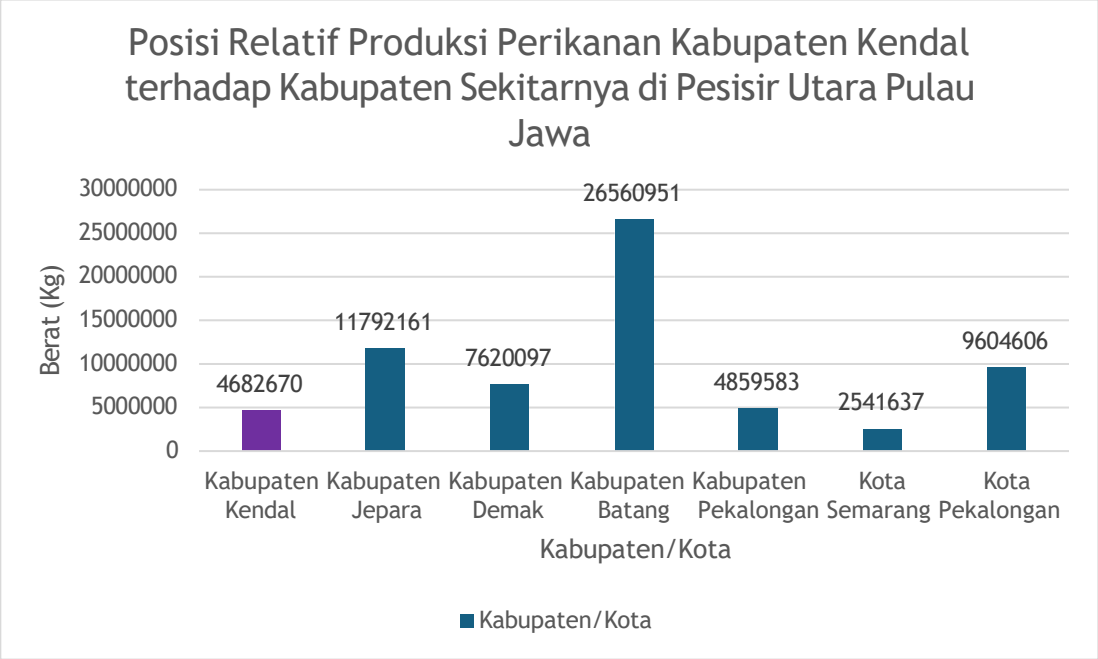

Gambar II-47 Posisi Relatif Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025

Jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki karakter pesisir serupa, posisi Kendal relatif setara dengan Kabupaten Pekalongan, namun masih tertinggal dari Jepara dan Demak yang telah berkembang lebih kuat dalam sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan Kendal belum termanfaatkan secara optimal, baik dari sisi produktivitas, skala usaha, maupun dukungan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, rantai dingin, dan akses pasar.

Produksi perikanan Kabupaten Kendal periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Setelah meningkat dari 2020 hingga mencapai puncak sementara pada 2022, produksi mengalami penurunan cukup tajam pada 2023, sebelum kembali melonjak pada 2024 hingga menjadi yang tertinggi selama periode pengamatan. Pola ini menunjukkan bahwa sektor perikanan Kendal memiliki potensi yang besar, namun masih rentan terhadap faktor cuaca, musim, dan kondisi lingkungan.

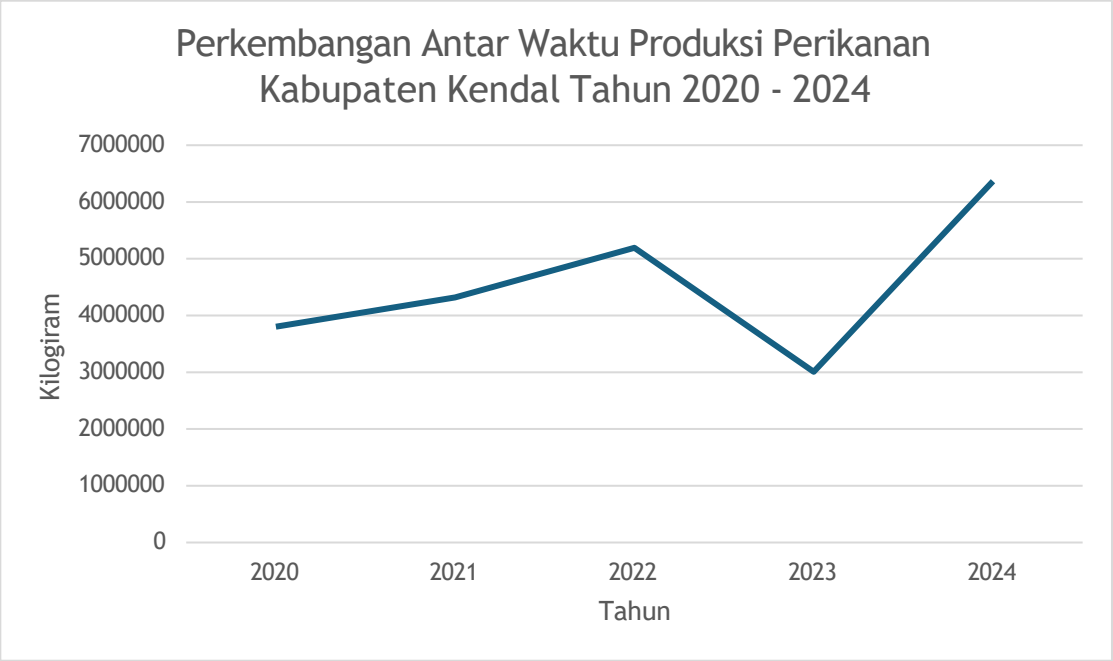

Gambar II-48 Perkembangan Antar Waktu Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berangkat dari posisi relatif produksi perikanan Kabupaten Kendal yang masih berada pada kelompok menengah ke bawah dibanding daerah pesisir utara lainnya, serta pola perkembangan produksi yang fluktuatif antar waktu, terlihat bahwa sektor perikanan Kendal masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas produksi dan stabilitas usaha. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang tidak hanya mendorong peningkatan volume produksi, tetapi juga memperkuat ketahanan pelaku usaha terhadap risiko cuaca, musim, dan gangguan lingkungan yang memengaruhi keberlanjutan pendapatan.

Dalam konteks tersebut, penguatan sektor pertanian dan perikanan perlu dilakukan secara terpadu melalui penyediaan dan pengembangan prasarana serta sarana produksi, termasuk dukungan infrastruktur usaha tani dan perikanan yang memadai. Program penyuluhan pertanian menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas petani dalam penerapan teknologi budidaya yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim. Di sisi perikanan, pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya perlu dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Upaya ini juga harus didukung oleh pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat menurunkan hasil tangkapan dalam jangka panjang. Intervensi pada sektor pertanian dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi kerentanan ekonomi, serta berkontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan dan pesisir Kabupaten Kendal. Oleh karena itu program yang coba ditawarkan adalah (i) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, (ii) Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana Pertanian, (iii) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, (iv) Program Penyuluhan Pertanian, (v) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, (vi) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, (vii) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan (viii) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

6 Kondisi Ketahanan Pangan

Permasalahan kemiskinan dalam dimensi ketahanan pangan muncul ketika keterbatasan pendapatan membuat rumah tangga tidak mampu mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara berkelanjutan. Prevalensi merupakan permasalahan ketahanan pangan ketika besaran proporsi penduduk yang mengalami suatu kondisi pada periode tertentu, sehingga memberikan gambaran seberapa berat masalah tersebut dalam masyarakat. Ketika prevalensi digunakan untuk membaca ketidakcukupan pangan, angkanya menunjukkan seberapa besar bagian keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makan yang layak. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan, karena meningkatnya prevalensi mencerminkan semakin rapuhnya kemampuan rumah tangga untuk memperoleh, membeli, atau mengakses pangan yang cukup dan aman. Dampaknya tidak hanya terbatas pada konsumsi harian, tetapi juga merembet pada kesehatan, produktivitas, dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Kabupaten Kendal memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 10,03 pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh penduduk Kabupaten Kendal berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan secara layak. Ketika angka ini turun menjadi 9,88 pada tahun 2025, proporsi rumah tangga yang mengalami tekanan pangan semakin berkurang walaupun belum secara signifikan. Meskipun perubahan angkanya tidak drastis, pergerakan ini tetap mencerminkan adanya perbaikan akses pangan, yang mungkin dilakukan melalui stabilisasi harga, peningkatan daya beli, atau program bantuan yang lebih tepat sasaran. Namun, angka 9,88 masih mengindikasikan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya kuat, sebab hampir sepuluh persen penduduk tetap berada dalam kategori rentan. Perubahan ini berguna sebagai dasar evaluasi bahwa intervensi tahun sebelumnya mulai memberi efek, tetapi penguatan kebijakan tetap dibutuhkan agar prevalensi dapat ditekan lebih signifikan pada tahun berikutnya. Permasalahan lain mengenai ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan saja namun juga ditinjau dari komoditi berikut dengan indeks ketahanan pangan daerah itu sendiri.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat individu, yang ditandai dengan tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau tanpa bertentangan dengan agama, keyakinan, maupun budaya masyarakat, sehingga mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya pembangunan ketahanan

pangan dan gizi di Kabupaten Kendal dilaksanakan secara sistematis melalui kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai melalui peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan perdagangan, menjaga stabilitas ketersediaan serta akses pangan di berbagai tingkat, baik makro, meso, maupun mikro, serta menjamin kualitas dan kuantitas konsumsi pangan melalui perbaikan infrastruktur pendukung. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu menjaga kestabilan ekonomi serta menjamin kelancaran pasokan dan kestabilan harga pangan.

Berdasarkan gambar posisi relatif indeks ketahanan pangan Kabupaten Kendal menunjukkan nilai sebesar 84,8, yang berarti berada di atas capaian rata-rata nasional sebesar 75,11, namun sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 85,34. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, posisi Kabupaten Kendal tergolong cukup baik, meskipun masih di bawah beberapa daerah seperti Kota Semarang (92,7), Kota Salatiga (91,4), dan Kota Magelang (91,4) yang memiliki indeks tertinggi di provinsi tersebut. Sementara itu, Kabupaten Wonosobo (77,9) tercatat memiliki indeks ketahanan pangan paling rendah di antara daerah yang dibandingkan. Perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 didasarkan pada sejumlah indikator yang mencerminkan tiga aspek utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, sehingga dapat menggambarkan posisi relatif ketahanan pangan setiap wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

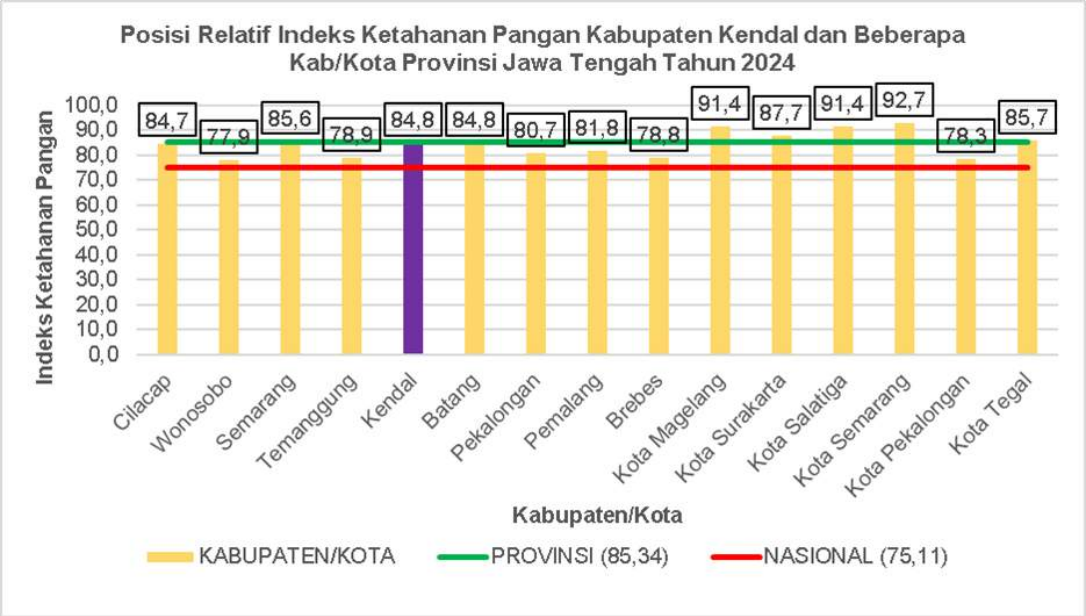

Gambar II-49 Posisi Relatif Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, 2025

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kendal tahun 2019–2024 menunjukkan bahwa capaian IKP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 nilai IKP tercatat sebesar 84,55, kemudian mengalami

peningkatan pada tahun 2020 menjadi 85,24. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 85,18, dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 84,69. Selanjutnya, nilai IKP meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 85,58, sebelum kembali menurun di tahun 2024 sebesar 84,83. Pola tersebut menggambarkan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kendal yang cenderung stabil namun berfluktuasi ringan, menunjukkan adanya dinamika faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan setiap tahunnya.

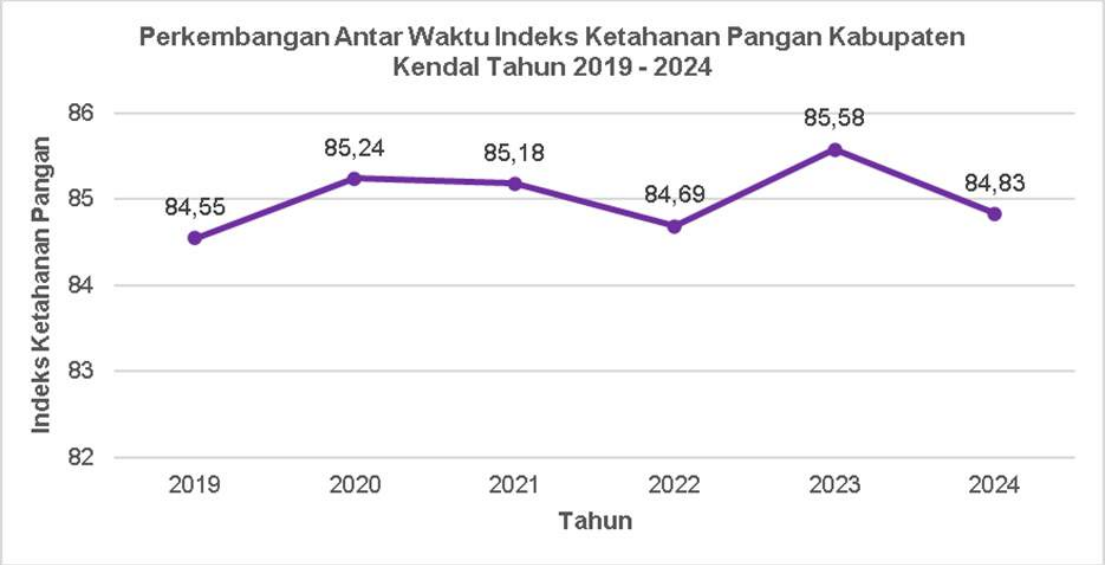

Gambar II-50 Perkembangan Antar Waktu Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2019-2024

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2020-2025

Analisa terhadap isu ketahanan pangan disajikan dalam Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan Indeks Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat individu, yang ditandai dengan tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau tanpa bertentangan dengan agama, keyakinan, maupun budaya masyarakat, sehingga mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Kendal dilaksanakan secara sistematis melalui kolaborasi lintas sektor.

Data menunjukkan adanya penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari tahun 2023 ke 2024, yaitu dari 11,9% menjadi 10,03%. Penurunan ini, merupakan indikator positif bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan kecukupan konsumsi pangan mungkin telah membuahkan hasil. Penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ini juga diikuti dengan penurunan Indeks Ketahanan Pangan yang juga tercatat dalam tabel. Seharusnya dari penurunan prevalensi ketidakcukupan pangan diikuti dari kenaikan nilai indeks ketahanan pangan, namun terjadi penurunan yang menunjukkan ada beberapa parameter lain dalam indeks

ketahanan pangan yang mengalami kenaikan. Contoh faktor yang menyebabkan turunnya IKP salah satunya adalah gangguan produksi akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem seperti banjir atau kekeringan berpotensi menurunkan ketersediaan pangan lokal.

Nilai IKP secara posisi dan tren menunjukkan angka yang cukup baik. Secara posisi relatif, Kabupaten Kendal menunjukkan nilai sebesar 84,8, yang berarti berada di atas capaian rata-rata nasional sebesar 75,11, namun sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 85,34. kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kendal yang cenderung stabil dan meningkat, menunjukkan adanya dinamika faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan setiap tahunnya.

Isu kerawanan pangan merupakan yang cukup penting. Aspek ini akan mempengaruhi kondisi ketersediaan maupun ketercukupan pangan yang ada. Intervensi terhadap kemiskinan di bidang pangan diperlukan untuk mencapai sasaran berupa meningkatnya diversifikasi pangan, kemandirian pangan, serta keamanan pangan di masyarakat. Perlu juga dilakukan perbaikan tata kelola lahan pertanian dengan menjaga luas lahan sawah dan peningkatan kesejahteraan petani. Secara umum, program untuk bidang kemiskinan ketahanan pangan juga perlu diharmonisasi dengan agenda-agenda reforma agraria. Berdasarkan kondisi tersebut beberapa program yang dilakukan adalah (i) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (ii) Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan (iii) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

7 Kondisi Sosial Masyarakat

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya mencakup kekurangan pendapatan atau materi, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam dimensi sosial, kemiskinan menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu, sehingga berpotensi menimbulkan marginalisasi sosial, rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan sosial, serta menurunnya solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. Kemiskinan sosial juga sering menyebabkan terbentuknya lingkaran ketidakberdayaan, di mana individu atau keluarga miskin sulit keluar dari kondisi tersebut karena keterbatasan pendidikan, pekerjaan, dan jaringan sosial. Akibatnya, posisi sosial mereka tetap berada di lapisan bawah dan sulit mengalami mobilitas sosial ke atas.

Dampak lebih lanjut dari kondisi ini adalah ketidakmampuan masyarakat miskin dalam memenuhi pelayanan kebutuhan pribadi, baik berupa kesehatan, pendidikan, maupun jaminan sosial lainnya. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak terlayani, yang menunjukkan bahwa banyak kelompok rentan belum memperoleh akses terhadap pelayanan sosial dasar. Keterbatasan pelayanan ini memperkuat siklus kemiskinan, karena tanpa dukungan dan intervensi sosial yang memadai, masyarakat miskin sulit meningkatkan

kualitas hidupnya dan tetap terjebak dalam kondisi ketidakmampuan sosial maupun ekonomi. Berikut merupakan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial belum terlayani di Kabupaten Kendal.

Data persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak terpenuhi di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan layanan sosial bagi kelompok rentan. Berdasarkan data, kelompok disabilitas terlantar tertinggi berada di Kecamatan Ngampel sebesar 29%, diikuti Kangkung 17% dan Patean 9%, yang menggambarkan masih rendahnya akses terhadap layanan rehabilitasi dan pendampingan sosial bagi penyandang disabilitas. Pada kelompok anak terlantar, Kecamatan Patebon menempati posisi tertinggi dengan 36%, menunjukkan tingginya kerentanan sosial anak akibat faktor ekonomi dan kurangnya perlindungan sosial. Sementara itu, kelompok lanjut usia terlantar tertinggi terdapat di Kecamatan Boja sebesar 29% dan Cepiring 22%, yang menandakan masih lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan lansia di wilayah tersebut. Kondisi ini secara keseluruhan mencerminkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Kendal berpengaruh besar terhadap ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi pelayanan kebutuhan pribadi, terutama bagi kelompok rentan yang seharusnya mendapat prioritas. Tingginya angka PPKS yang tidak terlayani menjadi indikator bahwa upaya pelayanan sosial belum merata dan masih perlu diperkuat agar kesejahteraan sosial masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.

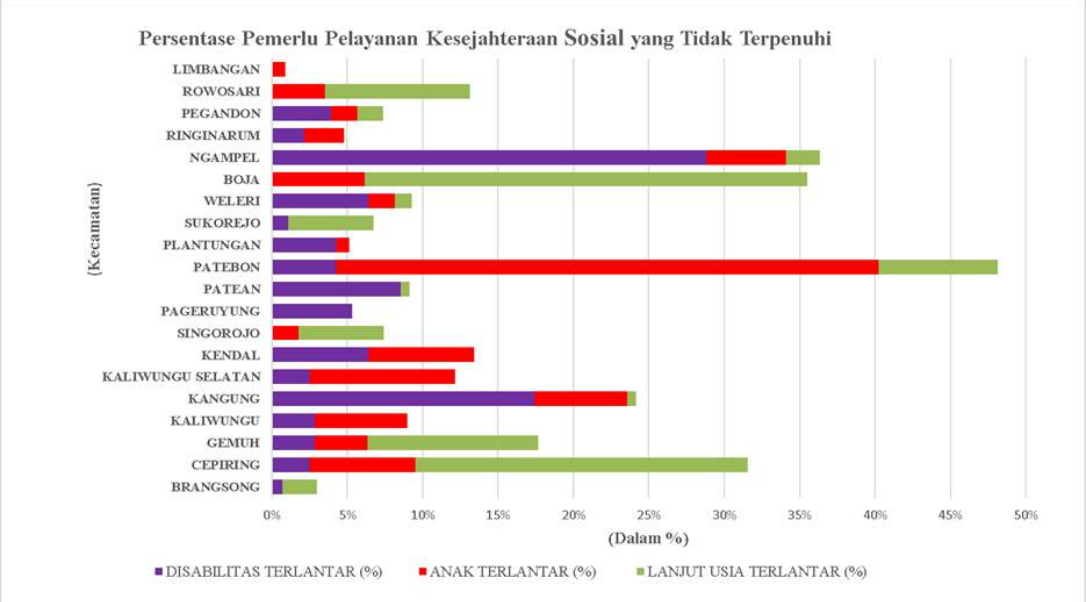

Gambar II-51 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tidak Terpenuhi
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 2024

Berkaitan dengan permasalaha tersebut, pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan Capaian Target SPM Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024. Berdasarkan Tabel Capaian tersebut, secara umum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di Kabupaten Kendal

menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada hampir seluruh jenis layanan dasar. Capaian tertinggi diperoleh pada layanan lansia terlantar dan gelandangan/pengemis (gepeng) dengan tingkat realisasi 100%, menunjukkan bahwa seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan telah terlayani sepenuhnya. Layanan bagi penyandang disabilitas terlantar juga menunjukkan capaian yang sangat baik sebesar 98,67%, sedangkan anak terlantar mencapai 99,12%, yang mengindikasikan efektivitas program rehabilitasi sosial luar panti dalam menjangkau kelompok rentan. Adapun untuk penanganan bencana alam dan sosial, capaian berada pada angka 87%, masih tergolong sangat tinggi meskipun belum mencapai target maksimal. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal telah berhasil melaksanakan pelayanan sosial secara optimal sesuai dengan standar nasional, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana untuk mencapai tingkat pelayanan yang sepenuhnya ideal.

Bentuk kemiskinan yang mungkin timbul dari kondisi dalam masyarakat adalah dalam bidang sosial. Kemiskinan tidak hanya mencakup kekurangan pendapatan atau materi, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam dimensi sosial, kemiskinan menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu, sehingga berpotensi menimbulkan marginalisasi sosial, rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan sosial, serta menurunnya solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan adalah berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis.

Nilai persentase cenderung menunjukkan adanya peningkatan PPKS yang terlantar namun kebutuhan dasarnya terpenuhi. Pencatatan dari RPJMD menunjukkan jika PPKS yang berada diluar panti telah 100 % terpenuhi kebutuhannya. Adapun untuk penanganan bencana alam dan sosial, capaian berada pada angka 87%, masih tergolong sangat tinggi meskipun belum mencapai target maksimal. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal telah berhasil melaksanakan pelayanan sosial secara optimal sesuai dengan standar nasional, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana untuk mencapai tingkat pelayanan yang sepenuhnya ideal.

Peningkatan pelayanan dalam bidang sosial pada Kabupaten Kendal perlu untuk dipertahankan. Program yang terlaksana menunjukkan hasil yang optimal dan positif. Oleh karena itu penerapan program terkait upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka di luar panti telah mencapai target yang signifikan, menunjukkan efektivitas program bantuan sosial dalam menjangkau kelompok rentan tersebut. Pelaksanaan program perlu untuk mempertahankan nilai yang telah diperoleh agar tidak terjadi penurunan nilai ketercapaian hasil pada bidang sosial. Berikut adalah beberapa program

yang dapat untuk dilakukan (i) Program Pemberdayaan Sosial, (ii) Program Penanganan Bencana, (iii) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan (iv) Program Rehabilitasi Sosial.

F. ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Berdasarkan keseluruhan gambaran kondisi sosial, ekonomi, dan spasial Kabupaten Kendal, terlihat bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk pola kerentanan yang kompleks. Dinamika pertumbuhan ekonomi, perkembangan kawasan industri, kondisi sektor pertanian dan perikanan, kualitas sumber daya manusia, hingga ketahanan sosial masyarakat menunjukkan bahwa tantangan pengurangan kemiskinan di Kendal bersifat multidimensional dan beragam antarwilayah. Situasi ini menuntut perumusan isu strategis yang mampu menangkap akar permasalahan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Salah satu isu strategis yang muncul di Kabupaten Kendal adalah **optimalisasi peran Kawasan Industri Kendal (KIK) dalam menyerap tenaga kerja lokal**. Meskipun industri menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan banyak peluang usaha, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri dengan keterampilan angkatan kerja lokal. Hal ini menimbulkan risiko bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin jika tenaga kerja lokal tidak terserap dengan baik di sektor formal. Tantangan ini mempertegas perlunya penguatan **link and match sistem pendidikan dan pelatihan vokasi** dengan kebutuhan industri, serta program inkubasi kewirausahaan agar masyarakat lokal mampu memanfaatkan peluang kerja dan usaha di sekitar Kawasan Industri.

Isu kedua berkaitan dengan **kerentanan ekonomi masyarakat di sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan**, yang berdampak langsung pada tingkat pendapatan rumah tangga di wilayah pesisir dan perdesaan. Posisi produksi perikanan Kendal yang belum unggul secara relatif terhadap daerah pesisir lain, serta fluktuasi produksi antar tahun, menunjukkan bahwa produktivitas sektor ini masih dipengaruhi oleh ketidakpastian iklim, keterbatasan teknologi budidaya, dan sarana-prasarana penunjang yang belum optimal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kerentanan rumah tangga nelayan dan petani terhadap guncangan produksi. Pilihan strategi intervensi yang fokus pada pemberdayaan usaha, diversifikasi mata pencaharian, dan peningkatan teknologi produksi akan menjadi langkah penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di sektor primer.

Isu strategis selanjutnya adalah **kualitas layanan dasar yang belum merata**, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, yang turut memengaruhi peluang keluar dari kemiskinan. Kendal

masih menghadapi tantangan di beberapa indikator sosial, seperti tingginya prevalensi stunting, variabilitas angka partisipasi pendidikan menengah, dan ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah perdesaan dan pesisir. Ketimpangan semacam ini tidak hanya memperlemah kapasitas sumber daya manusia daerah, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, fokus peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan dasar menjadi strategi penting untuk memperkuat landasan pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Terakhir, isu strategis yang tak kalah penting adalah **ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi risiko dan guncangan ekonomi**, baik dari sisi internal rumah tangga maupun eksternal seperti gejolak harga, perubahan iklim, atau krisis ekonomi global. Kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, ataupun rumah tangga miskin yang bergantung pada usaha informal memiliki tingkat proteksi sosial yang masih perlu diperkuat. Kelembagaan sosial, jaringan dukungan komunitas, serta sistem perlindungan sosial berbasis data menjadi instrumen krusial dalam membantu rumah tangga menavigasi risiko-risiko tersebut. Intervensi yang memperkuat ketahanan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai pendekatan holistik untuk mengurangi kemiskinan secara lebih berkelanjutan.

G. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Analisis kondisi fiskal memberikan gambaran pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal secara menyeluruh. Kondisi fiskal memiliki peranan yang sangat sentral dalam pendanaan beragam program dan kegiatan yang diselenggarakan terutama terkait Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kendal. Kemampuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan, alokasi jumlah anggaran serta implementasi dan pengawasan anggaran menjadi faktor penting keberhasilan kinerja (keuangan) pemerintah yang antara lain direfleksikan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.

Untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan sebagai instrumen fiskal yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan lintas sektor. APBD merupakan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah, sekaligus berperan sebagai instrumen akuntabilitas dan komunikasi publik terkait prioritas kebijakan fiskal yang disepakati bersama DPRD.

Struktur APBD secara umum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Selain diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, alokasi ketiga komponen APBD juga dialokasikan untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini tercermin melalui integrasi program berbagai sektor yang fokus pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan sosial.

1 Analisis Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lainnya yang sah. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel II-3 Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**2.129.037.383.310**	**2.297.255.572.103**	**2.265.353.924.689**	**2.450.053.276.426**	**2.515.700.682.694**	**4,26**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**356.753.593.703**	**439.197.987.791**	**437.899.634.627**	**543.919.550.405**	**517.108.168.048**	**9,72**
1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	134.446.651.120	163.518.117.660	219.755.209.493	298.327.822.673	245.618.490.577	**16,26**
1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	20.001.377.327	21.726.989.052	23.513.544.932	27.675.060.649	231.975.967.039	**84,54**
1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	19.295.382.108	20.052.742.157	24.949.384.154	26.350.028.385	27.396.673.646	**9,16**
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	183.010.183.148	233.900.138.922	169.681.496.048	191.566.638.698	12.117.036.786	**-49,27**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.666.073.087.107**	**1.750.154.936.558**	**1.819.497.040.063**	**1.898.127.560.672**	**1.998.592.514.646**	**4,65**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.519.186.978.597**	**1.578.367.786.870**	**1.634.225.086.259**	**1.706.176.886.233**	**1.795.350.609.630**	**4,26**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.226.128.695.597**	**1.290.673.356.870**	**1.363.739.923.259**	**1.445.024.292.433**	**1.520.642.333.010**	**5,53**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	39.443.704.951	56.800.544.344	52.767.824.901	53.903.044.136	53.681.140.000	8,01
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA						
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	909.781.219.000	901.552.517.000	894.555.629.032	946.737.605.230	1.037.379.763.414	3,34
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	276.903.771.646	332.320.295.526	416.416.469.326	444.383.643.067	429.581.429.596	11,6
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	-	-	-	-	6.963.191.000	
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**44.612.446.000**	**36.634.400.000**	**15.291.358.000**	-	-	**-100**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	44.612.446.000	36.634.400.000	15.291.358.000	-	-	-100
1.2.1.4	**Dana Desa**	**248.445.837.000**	**251.060.030.000**	**255.193.805.000**	**261.152.593.800**	**267.745.085.620**	1,89
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**146.886.108.510**	**171.787.149.688**	**185.271.953.804**	**191.950.674.439**	**203.241.905.016**	**8,46**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**128.496.428.284**	**162.850.087.805**	**170.252.676.396**	**181.009.815.888**	182.743.499.170	9,2
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**18.389.680.226**	**8.937.061.883**	**15.019.277.408**	**10.940.858.551**	**20.498.405.846**	**2,75**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	18.389.680.226	8.937.061.883	15.019.277.408	10.940.858.551	20.498.405.846	2,75
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**106.210.702.500**	**107.902.647.754**	**7.957.250.000**	**8.006.165.349**	**-**	**-100**
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	**106.210.702.500**	**4.490.000.000**	**7.800.000.000**	**8.000.070.000**	**-**	**-100**
1.3.2	**Pendatan Dana Darurat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.3.3	**Pendapatan Lainnya**	**-**	**103.412.647.754**	**157.250.000**	**6.095.349**	**-**	**-100**

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Secara umum, PAD Kabupaten Kendal mengalami pertumbuhan positif, terutama pada komponen Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, namun tidak seluruh komponen mengalami tren peningkatan yang konsisten. Pada 2022, terjadi penurunan signifikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah, dari Rp233,90 miliar pada 2021 menjadi Rp169,68 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya koreksi penerimaan di luar pajak dan retribusi, yang dapat dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan, perubahan skema pendapatan, atau faktor eksternal seperti normalisasi pascapandemi. Sebaliknya, komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap menunjukkan tren peningkatan pada 2022, sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi daerah.

Memasuki 2023–2024, pola penerimaan PAD kembali menunjukkan variasi. Pajak Daerah mencapai puncaknya pada 2023 sebelum mengalami koreksi pada 2024. Retribusi Daerah meningkat stabil hingga 2023, namun melonjak tajam pada 2024. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sangat besar pada 2024, sehingga menjadi penyebab utama fluktuasi total PAD daerah pada tahun tersebut.

Grafik Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Kendal tahun 2020–2024 memperlihatkan dinamika kemampuan daerah dalam menyediakan sumber pendanaan mandiri. Indeks mengalami peningkatan bertahap dari 0,733 pada 2020 menjadi puncaknya 1,229 pada 2023, sebelum menurun kembali ke 0,924 pada 2024. Kenaikan selama 2020–2023 mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah terutama PAD mengalami penguatan, sehingga pemerintah daerah semakin mampu membiayai kebutuhan belanja tanpa ketergantungan yang berlebihan pada transfer pusat.

Namun, penurunan indeks pada 2024 menandakan adanya pelemahan kapasitas fiskal. Hal ini selaras dengan penurunan beberapa komponen PAD, khususnya koreksi signifikan pada pos lain – lain PAD yang sah. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang fiskal daerah dan menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Kendal masih bersifat fluktuatif serta sensitif terhadap perubahan penerimaan tertentu. Pada umumnya, tren 2020–2024 menegaskan bahwa Kabupaten Kendal telah menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal dalam beberapa tahun, tetapi konsistensi kemandirian fiskal tetap perlu diperkuat melalui stabilisasi PAD dan optimalisasi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

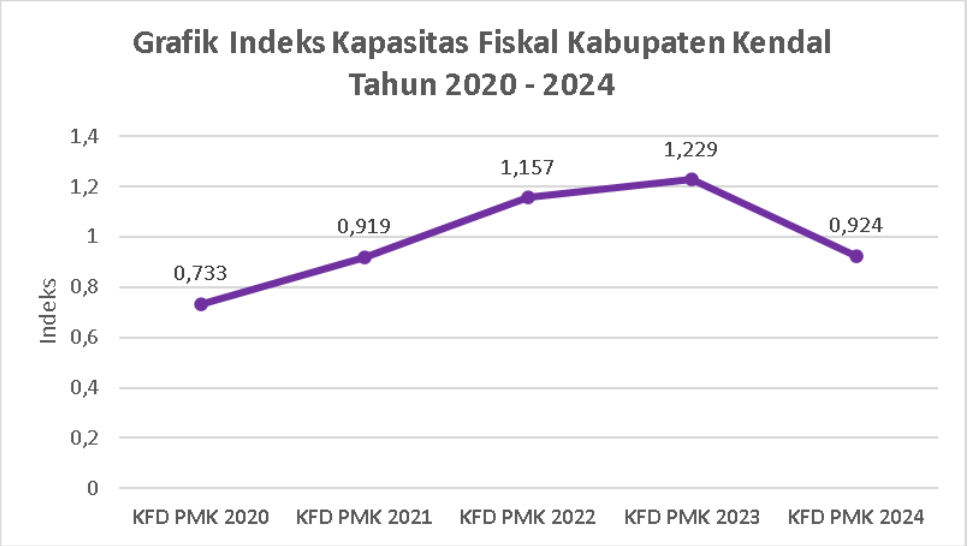

Gambar II-52 Grafik Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Peraturan Menteri Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan, 2020 - 2024

2 Analisis Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penerapan klasifikasi ini terlihat pada APBD Kabupaten Kendal tahun 2020–2024, di mana Belanja Operasional menjadi komponen dominan dan menunjukkan tren peningkatan dari Rp1,49 triliun pada 2020 menjadi Rp2,00 triliun pada 2024. Belanja Modal mengalami fluktuasi cukup signifikan, dengan kenaikan tajam pada 2022 sebelum kembali menurun pada dua tahun berikutnya. Belanja Tidak Terduga berada pada proporsi yang sangat kecil, yang menujukkan bahwa penggunaannya hanya untuk keadaan darurat. Sementara itu, Belanja Transfer berada pada tingkat yang relatif stabil, dimana hal ini menunjukkan konsistensi kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung pemerintah desa dan pihak penerima transfer lainnya sudah berjalan dengan benar.

Tabel II-4 Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**2.041.114.766.533**	**2.069.958.006.821**	**2.499.014.019.249**	**2.475.093.332.750**	**2.626.128.268.893**	**6,5**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.490.381.849.716**	**1.554.612.643.637**	**1.700.561.372.435**	**1.760.554.359.151**	**2.000.107.920.722**	**7,63**
2.1.1	Belanja Pegawai	923.990.970.136	968.147.636.030	961.045.178.608	981.489.110.907	1.155.860.643.648	5,76
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	476.824.893.155	510.694.622.224	658.466.567.306	644.928.015.026	706.381.853.536	10,32
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	89.565.986.425	63.145.785.383	75.440.276.521	133.971.633.218	131.892.423.538	10,16
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	12.624.600.000	5.609.350.000	165.600.000	5.973.000.000	-22,08
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2.2	**BELANJA MODAL**	**108.455.011.780**	**141.147.838.380**	**338.360.021.568**	**305.971.196.198**	**212.877.821.607**	**18,36**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-	93.120.922	23.944.292.715	1.131.118.514	1.772.266.052	166,99
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	46.300.259.389	57.568.869.202	94.540.428.129	80.324.255.047	48.671.101.895	1,26
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	20.654.495.711	37.139.161.699	78.667.565.620	141.793.259.234	70.819.503.071	36,08
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.711.375.008	39.507.697.957	132.083.433.762	60.889.586.525	82.328.487.995	25,95
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.556.591.672	6.838.988.600	9.124.301.342	21.832.976.878	9.182.713.273	1,78
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	232.290.000	-	-	-	103.749.321	-18,25
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**47.178.059.560**	**177.297.000**	**2.426.449.400**	**3.319.381.024**	**2.989.866.000**	**-49,83**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	47.178.059.560	177.297.000	2.426.449.400	3.319.381.024	2.989.866.000	-49,83
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**395.099.845.477**	**374.020.227.804**	**457.666.175.846**	**405.248.396.377**	**410.152.660.564**	**0,94**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**14.976.918.783**	**16.400.714.804**	**30.725.116.491**	**23.415.442.386**	**32.620.428.444**	**21,48**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	13.740.139.419	13.835.268.818	26.342.665.112	20.673.570.879	30.703.314.164	22,26

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	2.565.445.986	4.382.451.379	2.741.871.507	1.917.114.280	-9,25
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.236.779.364	-	-	-	-	-100
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**380.122.926.694**	**357.619.513.000**	**426.941.059.355**	**381.832.953.991**	**377.532.232.120**	**-0,17**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-		-	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-		-	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	379.162.169.500	357.619.513.000	426.941.059.355	381.832.953.991	377.532.232.120	-0,11
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	960.757.194	-	-		-	-100

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Grafik Belanja APBD Kabupaten Kendal tahun 2020–2024 menunjukkan pola komposisi belanja daerah yang konsisten dan relatif stabil. Belanja Operasional merupakan pos dengan proporsi terbesar setiap tahun, yang berarti penganggaran ini merupakan prioritas pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan rutin pelayanan publik. Persentase Belanja Operasional berada pada kisaran 68,05% hingga 76,16%, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 dan terendah pada tahun 2022. Dominasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal Kabupaten Kendal dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan program dan kegiatan operasional perangkat daerah.

Belanja Modal mengalami fluktuasi yang cukup mencolok, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 mencapai 13,54%, sebelum kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024. Variasi ini menggambarkan dinamika kebijakan pembangunan fisik dan pengadaan aset daerah yang sangat dipengaruhi oleh prioritas tahunan serta kemampuan fiskal.

Belanja Tidak Terduga berada pada persentase yang sangat kecil, kurang dari 2,5% sepanjang periode. Proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 2,31%, kemudian turun drastis pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan penanganan keadaan darurat relatif rendah setelah masa awal pandemi. Sementara itu, Belanja Transfer menunjukkan tren penurunan dari 19,36% pada tahun 2020 menjadi 15,62% pada tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan terkait alokasi dana yang diteruskan kepada pemerintah desa maupun pihak ketiga, seiring perubahan prioritas fiskal daerah.

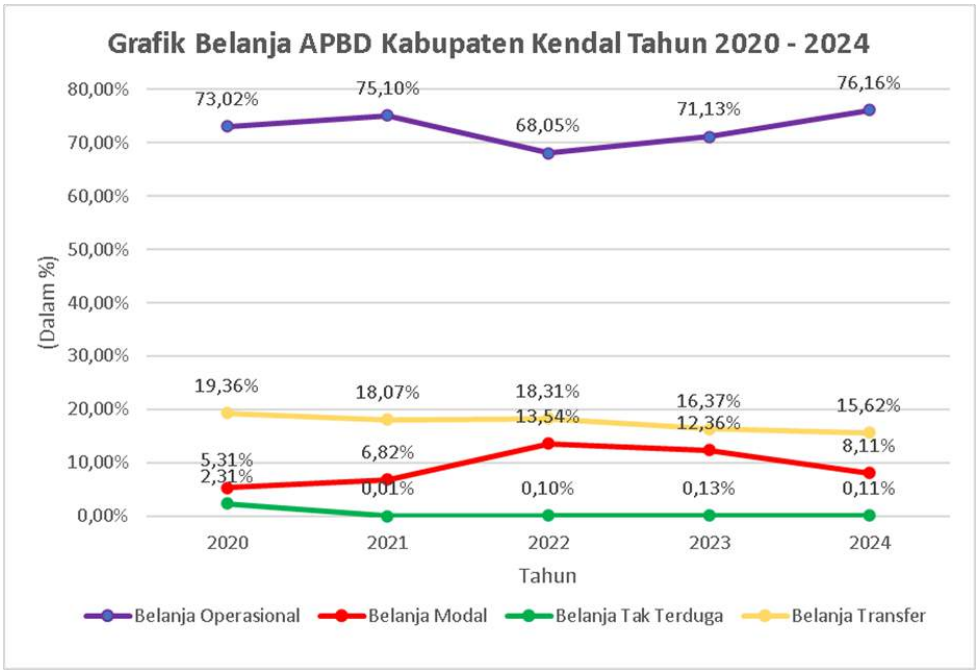

Gambar II-53 Grafik Persentase Belanja APBD Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025 - 2029, 2025

3 Analisis Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal pada periode 2020–2024 disusun melalui integrasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Secara umum, dinamika anggaran daerah menunjukkan kecenderungan peningkatan kapasitas fiskal yang dapat mendukung perluasan intervensi pengurangan kemiskinan, meskipun tetap dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Kendal selama periode 2020–2024 memperlihatkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Total belanja daerah yang terus bertambah menunjukkan adanya ruang fiskal yang semakin besar untuk mendukung program-program prioritas, termasuk yang beririsan dengan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar II-54 Realisasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025 - 2029, 2025

Dari sisi komposisi, belanja operasi masih mendominasi struktur belanja daerah, dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan konsistensi pembiayaan terhadap fungsi pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta dukungan program sosial lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Sementara itu, dinamika belanja modal yang mengalami peningkatan pada beberapa tahun menunjukkan adanya penguatan investasi pada infrastruktur dasar. Investasi ini memiliki dampak jangka menengah dan panjang dalam membuka akses layanan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, belanja transfer, khususnya yang disalurkan ke desa, menunjukkan pola yang relatif stabil sepanjang periode pengamatan. Konsistensi ini penting karena desa menjadi ujung

tombak pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur skala lokal yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Stabilitas alokasi transfer ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis wilayah.

Ke depan, arah kebijakan penganggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal perlu difokuskan pada peningkatan efektivitas belanja melalui penguatan belanja produktif, peningkatan ketepatan sasaran program berbasis data kemiskinan yang mutakhir, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome). Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya tercermin pada besaran anggaran, tetapi juga pada dampak nyata dalam penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

H. PEMBIAYAAN NON APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam rangka mendukung pembiayaan pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan, sumber pendanaan tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dimungkinkan bersumber dari pendanaan non-APBD. Pendanaan non-APBD menjadi alternatif pembiayaan yang penting dalam rangka mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, guna memastikan keberlanjutan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari sektor swasta, lembaga atau organisasi, serta partisipasi masyarakat.

Guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kendal mendorong penguatan kolaborasi pembiayaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal serta pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain BAZNAS, peran tersebut juga dapat didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Pemanfaatan dana ZIS dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Berbagai program yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat turut berkontribusi dalam penanganan permasalahan sosial masyarakat, termasuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Penyaluran zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat karitatif atau layanan kedaruratan, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Sementara itu, pendayagunaan zakat diarahkan pada pemanfaatan yang bersifat produktif guna meningkatkan kemandirian mustahik, meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sumber dana zakat berasal dari para muzakki, yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), non-ASN, serta badan usaha atau perusahaan.

Dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal, penyaluran bantuan melalui dana zakat diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana layanan dasar, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan fasilitas sanitasi, pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, dukungan pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Penyaluran bantuan diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang telah terdata dalam basis data kemiskinan daerah, yang dikelola dan diverifikasi melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat secara luas. Di Kabupaten Kendal, pelaksanaan TJSLP/CSR didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang memberikan pedoman serta kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara terarah dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

Peraturan daerah tersebut menekankan pentingnya terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah, perusahaan, dan masyarakat. Pelaksanaan TJSLP/CSR diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta mendorong keterpaduan antara program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan perusahaan di Kabupaten Kendal diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan sosial, termasuk pengurangan kemiskinan.

Bentuk kegiatan TJSLP/CSR meliputi pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, kemitraan usaha guna mendukung pengembangan UMKM, bina lingkungan untuk memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan, pemberian sumbangan atau donasi, serta kegiatan lain yang memberikan manfaat langsung bagi

masyarakat. Adapun ruang lingkup kegiatan TJSLP/CSR mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi rakyat, keagamaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, infrastruktur, serta bidang lain yang secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

Melalui pelaksanaan TJSLP/CSR yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, perusahaan di Kabupaten Kendal diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perbaikan kondisi lingkungan permukiman.

BAB III
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. HUBUNGAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Salah satu visi yang akan dicapai pada RPJPN Tahun 2025 – 2045 adalah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Visi tersebut sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan kelas menengah. Bentuk penuntasan kemiskinan yang dicanangkan adalah dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi, serta Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Industrialisasi dan integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu metode yang ditujukan untuk penuntasan kemiskinan. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Kebijakan ini dilaksanakan melalui:

A. penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh melalui satu data tunggal yang terverifikasi dan tervalidasi secara berkala;
B. penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal;
C. pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim;
D. integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat;
E. peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
F. peningkatan usia pensiun bertahap sampai dengan usia 65 tahun dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi melalui perluasan cakupan jaminan pensiun dan hari tua, pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kualitas kesehatan, dan pengembangan lingkungan yang ramah lanjut usia;
G. peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;

H. peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan keda, antara lain melalui penerapan care economg, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan;

I. inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya pengembangan *social impact bonds, social impact investment,* dan optimalisasi dana jaminan sosial;

J. penyelarasan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial dan penguatan tata kelola data, utamanya penguatan kerangka regulasi sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek), untuk penargetan penerima manfaat program pemerintah; serta

K. penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan sehingga dapat memastikan pengukuran yang dapat memperlihatkan kondisi kesejahteraan penduduk di lapangan secara absolut yang hasilnya dapat terbandingkan antar waktu dan wilayah.

2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2025-2029 yang dilegal formalkan di Perpres 12/2025. Pengentasan kemiskinan termasuk kedalam salah satu indikator sasaran utama visi Indonesia emas 2045. Tujuan pengentasan kemiskinan juga tertuang dalam Asta Cita ke-6 dari Presiden Prabowo, yaitu membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Tujuan yang ingin diperoleh adalah menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,03 % (Maret 2024) menjadi 7 – 8 % (2025) dan 4,5 – 5 % (2029) serta kemiskinan ekstrim (2,15 PPP) hingga kurang dari 0,5 % (2026). Bisa dikatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah menempatkan perlindungan sosial adaptif sebagai motor penggerak untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standardisasi kegiatan yang selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan (caregiving).

Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi. Strategi pertama adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat,

termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.

Strategi kedua dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam penargetan yang secara terus menerus dimutakhirkan dan berbagi pakai melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi serta diperkuat melalui teknologi digital dalam penyaluran.

Strategi ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha untuk mendukung graduasi dari kemiskinan. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, dan penerapan prinsip afirmatif. Strategi Kartu Usaha menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Strategi keempat memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya serta wilayah-wilayah 3T dan kantong kemiskinan. Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.

Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan lintas sektor lintas Prioritas Nasional. Hal ini membutuhkan prasyarat yaitu pertama, integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ketiga, optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan meningkatkan akses terhadap pasar serta teknologi. Keempat, komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan. Melalui sinergi dari keempat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat tercapai. Pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan untuk memastikan program-program yang dijalankan memiliki dampak berkesinambungan.

3 Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan 2025-2029 (Bappenas)

Arah Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Kemiskinan pada Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan 2025-2029 antara lain:

a. Penyempurnaan metodologi pengukuran kemiskinan;
b. Transformasi Data Terpadu melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
c. Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif bagi Masyarakat;
d. Program kartu Kesejahteraan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
e. Kartu Usaha : Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
f. Sinergi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan;
g. Implementasi Skema Graduasi untuk Kemandirian Penerima Bantuan;
h. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar;
i. Optimalisasi Perekonomian Desa;
j. Peran Desa dalam Swasembada Pangan ;
k. Kolaborasi Perguruan Tinggi dalam Percepatan Pemberantasan Kemiskinan; serta
l. Transformasi Perkotaan untuk Pemberantasan Kemiskinan.

4 Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan tahun 2025-2029

Dokumen dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menguraikan kerangka strategis komprehensif untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2025 hingga 2029. Strategi ini menekankan pentingnya sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan menyeluruh untuk mengatasi sifat kemiskinan yang multifaset, yang tidak hanya mencakup kekurangan finansial tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Pendekatan ini berfokus pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan tangguh, dengan tujuan utama untuk secara signifikan mengurangi angka kemiskinan nasional melalui intervensi yang terkoordinasi dan berbasis bukti.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kerangka kerja ini mengusulkan berbagai pendekatan yang ditargetkan, termasuk transfer tunai, jaminan sosial, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada akurasi data dan penargetan yang efektif, yang akan difasilitasi oleh Sistem Penargetan Nasional (SPN) dengan basis data yang dinamis untuk meminimalkan kesalahan dalam pemilihan penerima manfaat. Selain itu, dokumen ini menyoroti pentingnya pendidikan, kesehatan, dan bantuan tunai langsung sebagai komponen esensial untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang dan peningkatan ketahanan masyarakat, memastikan bahwa individu tidak hanya bertahan hidup tetapi juga berkembang dan mencapai kemandirian sosial-ekonomi.

Lebih lanjut, strategi ini memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan rantai pasok semi-tertutup (semi-closed-loop supply chains) sebagai model ekonomi inovatif yang tidak hanya mempromosikan keberlanjutan tetapi juga memberdayakan komunitas lokal. Model-model ini dirancang untuk menciptakan solusi ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kerja sama, dan menopang ekonomi lokal, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses terhadap layanan penting. Kolaborasi lintas sektor, yang melibatkan partisipasi lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan swasta, ditekankan sebagai faktor penting untuk keberhasilan implementasi inisiatif-inisiatif ini, memastikan program-program tersebut fleksibel, responsif, dan didorong oleh teknologi serta pendekatan berbasis komunitas.

Bagi dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah, kerangka strategis nasional ini menjadi panduan fundamental. Pemerintah daerah didorong untuk mengadaptasi dan mengimplementasikan strategi ini dengan mempertimbangkan konteks lokal, karakteristik demografi, dan tantangan spesifik di wilayah masing-masing. Ini berarti bahwa rencana daerah harus mengintegrasikan sistem penargetan data yang akurat, memperkuat program perlindungan sosial yang relevan dengan kebutuhan lokal, mengembangkan inisiatif pemberdayaan ekonomi yang memanfaatkan potensi daerah, serta membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan demikian, rencana nasional ini berfungsi sebagai cetak biru yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, selaras dengan visi nasional untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah tahun 2025-2045 menggarisbawahi sektor manufaktur sebagai pilar utama kinerja ekonomi daerah, meskipun kontribusinya terhadap sektor manufaktur nasional masih sekitar 0,6% pada tahun 2023. Sub-sektor unggulan seperti makanan dan minuman (43,68%), tembakau (18,97%), dan tekstil (7,64%) menjadi penggerak utama. Strategi pengembangan sektor industri ini akan diselaraskan dengan kerangka pembangunan nasional, berfokus pada optimalisasi potensi lokal dan inovasi, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi sebagai salah satu fondasi pengentasan kemiskinan.

Namun, Jawa Tengah juga menghadapi tantangan signifikan dalam keberlanjutan lingkungan, termasuk kelangkaan air, polusi, dan kebutuhan akan pengelolaan limbah yang lebih baik. Optimisasi infrastruktur dan sumber daya energi sangat krusial untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. RPJPD ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, yang secara tidak langsung berkontribusi pada

pengentasan kemiskinan dengan memastikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang inklusif, dokumen ini menyoroti perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, demokrasi, dan keamanan sebagai prasyarat bagi pembangunan sosial-ekonomi. Strategi utama mencakup peningkatan kesejahteraan sosial, inisiatif khusus untuk memerangi kemiskinan, serta pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim. Area fokus meliputi peningkatan pasokan air, pengelolaan limbah, dan penerapan praktik berkelanjutan di berbagai sektor, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, RPJPD Jawa Tengah menyajikan pendekatan komprehensif untuk pengentasan kemiskinan yang terintegrasi. Dokumen ini menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui sektor manufaktur, diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Strategi-strategi yang diuraikan dalam RPJPD ini, mulai dari penguatan ekonomi lokal, mitigasi dampak lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat, merupakan kerangka kerja esensial yang dapat menjadi landasan kuat bagi penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan demikian, rencana tersebut dapat mengadopsi pendekatan multi-sektoral yang holistik untuk mencapai masa depan yang lebih sejahtera dan berketahanan bagi seluruh warga Jawa Tengah.

6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang dilegal formalkan di Perda 7/2025. Pengentasan kemiskinan termasuk kedalam salah satu indikator sasaran utama nasional sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan termasuk kedalam program prioritas pemerintah. Bentuk pengentasan kemiskinan, meskipun secara tidak langsung disinggung pada Misi RPJMD dapat terlihat pada tujuan 2 dan 6 yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesempatan kerja.

Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tiga strategi utama. Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Strategi ini bermanfaat untuk meminimalkan pengeluaran masyarakat yang langsung dituangkan pemerintah kedalam program – program yang ada. Berbagai macam program yang dibuat seperti bantuan sosial seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), seragam siswa miskin, pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan dan Kartu Jateng Ngopeni (Kajen), bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak dan

penyandang disabilitas, bantuan instalasi sambungan listrik bagi rumah tangga miskin, bantuan sosial dan jaminan perlindungan sosial adaptif lainnya dari pemerintah.

Strategi kedua dengan cara meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta menembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Strategi ini diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya melalui peningkatan akses pekerjaan melalui program Padat Karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin. Melalui program ini, akses terhadap lapangan pekerjaan yang ada lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu terdapat program lain seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal dan akses penggunaan lahan. Program – program ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengembangkan lapangan kerja baru dengan akses pinjaman modal serta penggunaan lahan yang lebih mudah. Pemerintah juga menyusun strategi untuk melakukan pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar, pengembangan dan penjaminan berkelanjutan usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Adanya program peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan melalui usaha rakyat.

Strategi ketiga dengan cara meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang mampu mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan masyarakat. Strategi ini dituangkan dalam berbagai macam program melalui pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak, dan pemberian stimulan jamban serta penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin. Dengan memenuhi infrastruktur dasar yang ada, diharapkan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan. Selain itu terdapat program untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan. Meningkatnya konektivitas antar wilayah akan meningkatkan hubungan antar wilayah khususnya di bidang ekonomi yang menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan. Terdapat program lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin seperti sinergitas dari dokumen perencanaan sampai monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan

(verifikasi dan validasi database kemiskinan), dan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Ketiga strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok.

Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan. Sedangkan untuk pendekatan kelompok difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala kemanfaatan yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kelompok antara lain: pengembangan potensi lokal melalui pemberdayaan kelompok usaha, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur air minum dan sanitasi layak. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal 2025-2045 mengusung visi ambisius untuk mewujudkan Kendal sebagai daerah yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Dokumen ini secara eksplisit mengidentifikasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial sebagai kendala utama yang harus diatasi. Untuk mencapai visi tersebut, RPJPD menetapkan serangkaian tujuan terukur yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator kinerja seperti PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi tolok ukur keberhasilan.

Strategi pengentasan kemiskinan dalam RPJPD ini berpusat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal. Prioritas diberikan pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk membangun kapasitas masyarakat, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, penguatan ekonomi lokal melalui optimalisasi potensi pertanian, industri, dan pariwisasa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran, yang merupakan salah satu akar masalah kemiskinan.

Lebih lanjut, RPJPD juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan dan pengembangan infrastruktur sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang memadai akan mempermudah akses ke pasar dan layanan dasar, sementara pengelolaan lingkungan yang baik akan memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang vital bagi mata pencarian masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci untuk mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan secara komprehensif, memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Rangkuman strategi ini sangat relevan untuk dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah. RPJPD Kendal 2025-2045 menyediakan kerangka kerja yang solid dengan penekanan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Dengan mengadopsi pendekatan yang terintegrasi antara peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan, rencana penanggulangan kemiskinan daerah dapat merumuskan program-program yang lebih terarah dan efektif, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berkontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kendal secara menyeluruh.

8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029

Strategi pemerintah kendal dalam menurunkan kemiskinan termuat dalam sasaran 5 yaitu menurunnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Sasaran ini dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan inklusif dan mengurangi kemiskinan. Strategi untuk mencapai sasaran ini diwujudkan dengan program peningkatan kualitas perlindungan sosial berbasis satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Data ini digunakan sebagai fondasi perencanaan program yang akurat dan terpadu untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal diarahkan pada pemberdayaan rumah tangga miskin dan masyarakat melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif. Hal ini sebagai langkah penguatan ketahanan pangan rumah tangga agar mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, mendorong transformasi desa menjadi desa mandiri melalui inovasi lokal, pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan kelembagaan desa.

Ditinjau dari visi misi daerah yang telah disusun di RPJMD, beberapa program yang ada juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Seperti program pemberdayaan sektor pertanian, perikanan dan UMKM melalui program bantuan keuangan khusus desa, satu kecamatan satu desa unggulan sesuai potensi, pembangunan demplot pertanian dan perikanan, pembuatan *business centre* serta program 100 UMKM naik kelas tiap tahun. Program ini bagian dari menanggulangi kemiskinan khususnya kemiskinan konsumsi.

Dalam bidang ketenagakerjaan, terdapat penyelarasan program pendidikan vokasi dengan industri yang terdiri dari program sekolah vokasi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada. Selain itu, peningkatan peran serta kepemudaan dalam setiap sektor pembangunan akan mengurangi jumlah kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja yang lebih muda. Hal ini juga sesuai dengan program selanjutnya yaitu adanya bursa kerja dengan pendekatan kebutuhan usaha terkini yang lebih mampu dikenali oleh pemuda.

Dalam bidang kesehatan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara memberikan akses kesehatan untuk semua masyarakat Kabupaten Kendal. Akses kesehatan ini diberikan melalui berbagai macam program seperti Jaminan Kesehatan Semesta (UHC), cek kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat serta gerakan jumat bersih. Melalui program – program ini, diharapkan terbangunnya akses kesehatan yang mampu dirasakan semua masyarakat tanpa menimbulkan beban keuangan baru yang mampu menambah angka kemiskinan. Terdapat strategi lain di bidang kesehatan yaitu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan program seperti rumah sakit berjalan serta peningkatan infrastruktur kesehatan desa. Dengan akses kesehatan serta sarana prasarana yang ditujukan untuk semua, akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang berdampak kepada berkurangnya data kematian ibu dan bayi serta bukti keberhasilan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dibidang kesehatan.

Dalam bidang pendidikan, strategi penanggulangan yang ada seperti peningkatan kualitas pendidikan dengan perbaikan gedung, kualitas laboratorium dan kualitas alat kegiatan belajar mengajar. Selain itu, terdapat program untuk meningkatkan akses pendidikan yang luas dan inklusif serta peningkatan kinerja tenaga pendidik seperti program Beasiswa Satu Desa dan program Satu Sarjana bagi Keluarga Tidak Mampu sebagai langkah pemerataan pendidikan serta akses pendidikan yang luas.

Dalam bidang infrastruktur dasar, terdapat program penanganan banjir lokal, rob serta kawasan kumuh dengan program berupa penanganan kawasan kumuh dan pemerataan rumah layak huni. Program ini sangat penting karena termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Selain itu, program pembangunan jalan inspeksi di wilayah pesisir juga penting sebagai penghubung perekonomian yang mampu menjadi salah satu langkah penanggulangan kemiskinan.

B. STRATEGI UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pembuatan program penanggulangan dalam skala nasional diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Program penanggulangan kemiskinan sendiri dibagi menjadi 3 garis besar yakni: (1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu; (2) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan (3) Program lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan/desa.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diterbitkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia melalui integrasi program, ketepatan sasaran, dan sinergi antarlembaga. Inpres ini memerintahkan langkah-langkah konkret seperti bantuan perumahan, infrastruktur dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Strategi yang dikembangkan dalam inpres tersebut berupa (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perumusan strategi utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal merupakan elaborasi dari strategi yang termuat dalam Inpres 8 Tahun 2025 dan Permendagri 53 Tahun 2020. Selain itu, strategi utama ini juga dirumuskan berdasarkan pertimbangan dokumen perencanaan baik dari tingkat pusat maupun daerah. Strategi utama tersebut berfokus pada pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), yang dilaksanakan melalui:

a. **Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin**: Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ini dilaksanakan melalui penguatan sistem perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar secara terintegrasi dan berkelanjutan. Intervensi difokuskan pada penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemenuhan akses layanan dasar, pemberian bantuan sosial adaptif, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah mendorong pengurangan pengeluaran rumah tangga miskin melalui dukungan penyediaan layanan publik dasar dan bantuan non-tunai yang berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Strategi ini diharapkan mampu

menurunkan tekanan pengeluaran rumah tangga miskin, mengurangi tingkat kerentanan sosial, serta meningkatkan daya tahan ekonomi kelompok sasaran.

b. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:** Strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pemberdayaan ekonomi dilaksanakan melalui penguatan produktivitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan akses ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Intervensi diarahkan pada penduduk usia produktif melalui peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, pengembangan kegiatan padat karya, pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan. Penguatan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan melalui fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan usaha, serta peningkatan akses pasar guna menjamin keberlanjutan usaha. Pelaksanaan strategi ini dilakukan secara terarah melalui tahapan identifikasi sasaran, penentuan jenis intervensi, serta penguatan dampak ekonomi pada kelompok penerima manfaat. Fokus intervensi tidak hanya pada masyarakat miskin, tetapi juga pada masyarakat rentan miskin yang memiliki potensi produktif, sehingga diharapkan mampu mempercepat kemandirian ekonomi dan mendorong penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

c. **Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan serta Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan:** Upaya meminimalkan wilayah kantong kemiskinan ini dilaksanakan melalui sinergi kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara lintas sektor dan lintas wilayah. Intervensi difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tinggi melalui pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar, meliputi akses pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air minum layak, sanitasi, serta peningkatan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Strategi ini diperkuat dengan penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kualitas basis data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi, serta optimalisasi pemanfaatan dana desa. Sinergi kebijakan dan program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara spasial dan berkelanjutan.

C. FOKUS STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah, arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, serta perluasan akses layanan dasar dan infrastruktur yang inklusif. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain merujuk pada dokumen perencanaan, perumusan strategi ini juga didasarkan pada hasil analisis terhadap berbagai bidang permasalahan kemiskinan di daerah. Berdasarkan analisis tersebut, fokus strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan Akses Layanan Dasar yang Inklusif dan Merata

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal memerlukan penguatan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap layanan dasar yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi masih menjadi faktor struktural yang memperlambat peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, intervensi diarahkan pada perluasan cakupan layanan dasar terutama di wilayah kantong kemiskinan, desa terpencil, serta kelompok masyarakat dengan keterbatasan sosial dan ekonomi. Strategi ini menitikberatkan pada pendekatan berbasis wilayah dan berbasis keluarga miskin melalui integrasi data kemiskinan sebagai dasar penentuan sasaran. Peningkatan kualitas layanan dasar diharapkan mampu mendorong **meningkatnya partisipasi pendidikan, membaiknya derajat kesehatan masyarakat, serta bertambahnya rumah tangga yang menempati hunian layak dan lingkungan sehat**, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan peningkatan kualitas hidup.

2. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan di Kabupaten Kendal banyak dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas usaha rumah tangga, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan usaha informal skala kecil. Oleh sebab itu, strategi ini diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga miskin melalui peningkatan keterampilan kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap sarana produksi dan pasar. Pendekatan yang digunakan menekankan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih inklusif. Upaya ini mencakup modernisasi pertanian dan perikanan, dukungan pascapanen dan pengolahan hasil, serta penguatan konektivitas rantai nilai. Dengan meningkatnya produktivitas usaha rakyat, diharapkan terjadi **peningkatan produktivitas dan produksi pertanian serta perikanan yang menjadi sumber**

utama pendapatan masyarakat miskin, yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan kerentanan ekonomi.

3. Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat

Ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat miskin. Keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan beragam tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada produktivitas dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Strategi ini diarahkan pada penguatan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan melalui stabilisasi pasokan, penguatan cadangan pangan, serta pengembangan pangan lokal. Di sisi lain, upaya perbaikan gizi masyarakat dilakukan melalui edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta integrasi dengan program kesehatan ibu dan anak. Melalui langkah ini diharapkan terjadi **peningkatan indeks ketahanan pangan masyarakat dan perbaikan status gizi kelompok rentan**, sehingga risiko kemiskinan kronis akibat kerentanan pangan dapat ditekan.

4. Penguatan Kualitas Hunian dan Lingkungan Permukiman

Kondisi hunian yang tidak layak dan lingkungan permukiman yang buruk sering kali menjadi ciri utama rumah tangga miskin. Oleh karena itu, strategi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas rumah, penyediaan prasarana dasar permukiman, serta penanganan kawasan kumuh secara terpadu. Intervensi difokuskan pada rumah tangga berpenghasilan rendah melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan rumah layak, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Selain itu, pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan drainase menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong **meningkatnya persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan akses air minum dan sanitasi yang memadai**, sehingga kualitas hidup masyarakat miskin meningkat secara signifikan.

5. Penguatan Perlindungan Sosial Adaptif dan Responsif

Kelompok masyarakat miskin dan rentan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, sosial, maupun bencana alam. Tanpa sistem perlindungan sosial yang kuat, satu kejadian krisis dapat mendorong rumah tangga kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif, responsif, dan terintegrasi, termasuk bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan ini juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan sosial di tingkat lokal, termasuk peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dengan sistem perlindungan sosial yang efektif, diharapkan meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS melalui pemenuhan kebutuhan dasar

dan perlindungan terhadap risiko sosial, sehingga dampak kemiskinan ekstrem dan kemiskinan akibat guncangan dapat diminimalkan.

6. Pembangunan Sumberdaya Manusia secara Menyeluruh dan Komprehensif

Pengentasan kemiskinan tidak hanya menyasar kondisi saat ini, tetapi juga bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Strategi ini menekankan pembangunan kualitas manusia sejak masa anak-anak, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia. Intervensi meliputi pencegahan stunting, peningkatan akses pendidikan menengah, penguatan keterampilan kerja, serta perlindungan sosial bagi lansia. Dengan pendekatan ini, setiap tahapan usia memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat secara berkelanjutan. Strategi ini diharapkan dapat mendorong **peningkatan partisipasi pendidikan, perbaikan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas penduduk usia kerja**, yang dalam jangka panjang memperkuat daya tahan ekonomi keluarga dan mengurangi risiko kemiskinan turun-temurun.

7. Penguatan Tata Kelola, Data, dan Konvergensi Program

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan ketepatan sasaran program. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan pada penguatan sistem data kemiskinan yang terpadu, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Penggunaan satu data kemiskinan yang mutakhir menjadi landasan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Konvergensi program antar sektor juga menjadi kunci, agar intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ekonomi, dan sosial saling mendukung. Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan **seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan** di Kabupaten Kendal.

D. PENTAHAPAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pentahapan pembangunan adalah instrumen krusial untuk memastikan arah kebijakan dan strategi dapat diterapkan secara sistematis, bertahap, dan selaras dengan fokus pembangunan Kabupaten Kendal setiap tahunnya, sesuai amanat RPJMD. Mekanisme pentahapan ini juga berfungsi mengharmonisasi rencana pembangunan Kabupaten Kendal dengan rencana penanggulangan kemiskinan, agar program dan intervensi yang disusun dapat berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan akan lebih terarah, adaptif terhadap dinamika pembangunan Kabupaten Kendal, dan konsisten dalam setiap tahapan implementasi. Penyelarasan pentahapan pembangunan Kabupaten Kendal tahun

2025-2029 dengan pentahapan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Tahun 2026 – *"Kendal Hebat"*: Peningkatan Kualitas SDM Unggul dan Produktif**

   Pada tahap awal pelaksanaan RPKD, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin dan rentan miskin sebagai prasyarat utama penurunan kemiskinan. Kebijakan diarahkan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan perlindungan sosial, sekaligus peningkatan kapasitas individu melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan dasar. Intervensi diprioritaskan pada kelompok usia produktif dan rumah tangga miskin yang memiliki potensi peningkatan kualitas hidup, sehingga mampu menjadi akseptor utama dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pada tahap ini, penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pencegahan kemiskinan berulang serta penguatan fondasi kapasitas manusia sebagai dasar peningkatan kesejahteraan pada tahap berikutnya.

2. **Tahun 2027 – *"Kendal Lincah"*: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan**

   Pada tahap kedua, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem penanggulangan kemiskinan yang efektif, akuntabel, dan terintegrasi. Fokus kebijakan meliputi penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, penyelarasan perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas basis data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi secara berkelanjutan. Pada tahap ini, pemerintah daerah mendorong sinergi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten serta optimalisasi peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan. Penguatan kelembagaan menjadi pondasi penting untuk memastikan intervensi penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

3. **Tahun 2028 – *"Kendal Mantap"*: Pemerataan Infrastruktur Ramah Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

   Tahap ketiga penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pengurangan kesenjangan wilayah dan peminimalan kantong-kantong kemiskinan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan layak, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Intervensi diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tinggi, khususnya daerah perdesaan dan wilayah tertinggal. Pembangunan infrastruktur pada tahap ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga sebagai penopang

aktivitas ekonomi masyarakat miskin guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. **Tahun 2029 – *"Kendal Berdikari"*: Pemantapan Produktivitas Ekonomi Daerah**

   Pada tahap keempat, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Kebijakan diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin melalui penciptaan kesempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan usaha mikro dan kecil. Intervensi dilakukan melalui perluasan akses permodalan, peningkatan keterampilan usaha, pendampingan kewirausahaan, dan perluasan akses pasar. Tahap ini menekankan transformasi penerima manfaat dari kelompok penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan keluar dari jerat kemiskinan.

5. **Tahun 2030 – *"Kendal Maju dan Berkelanjutan"*: Pemantapan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keberlanjutan**

   Pada tahap akhir, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemantapan dan keberlanjutan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahap sebelumnya. Fokus kebijakan meliputi penguatan sistem perlindungan sosial adaptif, keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta pemantapan kualitas layanan dasar dan infrastruktur pendukung kesejahteraan masyarakat. Pada tahap ini, pemerintah daerah menekankan pengendalian risiko kemiskinan baru, pencegahan kemiskinan ekstrem, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan diarahkan agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Kendal yang maju, inklusif, dan berkeadilan.

E. PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dunia usaha, maupun unsur masyarakat lainnya di Kabupaten Kendal. Program penanggulangan kemiskinan tersebut disusun secara komprehensif dan terstruktur ke dalam beberapa tingkatan, yaitu program prioritas, program intervensi, program aksi, dan program taktis. Keseluruhan program dilaksanakan secara terpadu dan simultan, dengan memperhatikan hasil analisis bidang kemiskinan yang telah dipetakan berdasarkan karakteristik wilayah dan kelompok sasaran di Kabupaten Kendal. Penyusunan Program pada sub-bab ini didasarkan pada program prioritas dan unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Pendekatan ini bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap intervensi penanggulangan kemiskinan berjalan secara sinergis, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kendal.

A. Program Prioritas Kabupaten Kendal. Program prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

- Program Strategis 1 : Kendal Cerdas

Program Penguatan Daya Saing SDM dilakukan dengan a) peningkatan kualitas pendidikan, b) insentif madin dan pondok pesantren, c) pemberian beasiswa "Satu Desa Satu Sarjana" bagi keluarga mampu, d) pemerataan guru, e) peningkatan insentif tenaga pendidik, dan f) pengembangan budaya lokal.

- Program Strategis 2 : Kendal Sehat

Program Kesehatan dilakukan dengan a) Universal Health Coverage (UHC), b) Rumah Sakit Berjalan untuk layanan kesehatan perdesaan, dan c) Pendampingan Kesehatan dan keluarga

- Program Strategis 3 : Kendal Millenial

Program Ketenagakerjaan dilakukan dengan a) Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, b) Sekolah Vokasi, c) layanan khusus keluarga pekerja migran, dan d) Kerjasama dengan Kawasan Industri Kendal (KIK)

- Program Strategis 4 : Kendal JOSS

Program Pembangunan Ekonomi Strategis berbasis Potensi Unggulan dilakukan dengan a) pembangunan pusat bisnis atau Center Bussines (CB), b) pendampingan UMKM dengan target 100 UMKM naik kelas per tahun, c) fasilitas permodalan bagi Petani dan Nelayan, d) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

- Program Strategis 5 : Kendal Cekatan

Program Pelayanan Publik dilakukan dengan a) integrasi pelayanan Publik dan pemerintaahan dengan super apps, b) bantuan keuangan khususu untuk desa, c) integrasi mode transportasi antar wilayah, dan d) birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel

- Program Strategis 6 : Kendal Mantap

Program Peningkatan Infrastruktur dilakukan dengan a) peningkatan konektivitas wilayah, b) penyediaan rumah layak huni, c) pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Zero Timbunan Sampah), d) pengembangan akses jalan dan transportasi, e) penataan trotoar kota, dan f) pembangunan batas wilayah

B. Program Unggulan Kabupaten Kendal. Program unggulan merupakan program berbasis pendekatan terfokus dan inovatif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

- Satu Kecamatan Satu Desa Unggulan sesuai potensi", semua OPD wajib untuk menyinkronkan kegiatan di desa tsb
- Pembangunan demplot integrated farming untuk menjadi rujukan petani di Kendal
- Gerakan Jumat Bersih untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong di setiap Desa/keluarahan secara bergilir oleh Bupati dan OPD dilanjutkan sambung rasa, belanja masalah
- Keterlibatan LINMAS pada setiap kegiatan pemerintahan termasuk untuk peningatan kapsitas dan seragam LINMAS
- Peningkatan peran RT dalam membantu pemerintah khususnya sebagai agen kebangsaan dan membantu peningkatan pajak daerah
- Pemabngunan infrastruktur terutama jalan dan lampu jalan

F. TARGET KEMISKINAN DAERAH

Proyeksi tingkat kemiskinan disusun sebagai instrumen analitis untuk memperkirakan arah perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika indikator makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, fluktuasi harga pangan dan energi, serta efektivitas program perlindungan sosial. Dengan demikian, proyeksi tingkat kemiskinan menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

Ketidakpastian ekonomi masih relatif tinggi, baik yang bersumber dari faktor domestik, khususnya iklim dan cuaca yang memengaruhi hasil panen maupun tingkat harga komoditas, terutama pangan. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kemiskinan karena semakin tinggi laju inflasi, khususnya inflasi pangan, akan mendorong kenaikan Garis Kemiskinan. Hal ini terjadi karena harga barang dan jasa merupakan salah satu komponen utama dalam penentuan Garis Kemiskinan. Kenaikan inflasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah, akan menurunkan daya beli masyarakat. Mengingat Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran atau konsumsi, maka indikator ini sangat sensitif terhadap fluktuasi harga. Acuan target penurunan angka kemiskinan akan didasarkan kepada dokumen RPJMD 2025 – 2029 dari Kabupaten Kendal. Indikator yang digunakan sebagai tujuan utama penurunan angka kemiskinan berada pada indikator tingkat kemiskinan yang diharapkan turun setiap tahunnya. Indikator dalam setiap bidang juga telah

dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Berikut adalah tabel rangkuman beberapa tujuan dan target yang ingin diperoleh hingga pada tahun 2029.

Tabel III-1 Target Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2030

Indikator		Tingkat Kemiskinan
Satuan		%
Baseline 2024		9,35
Target	**2025**	8,89 - 8,53
	2026	8,82 - 8,73
	2027	8,04 - 7,68
	2028	7,62 - 7,25
	2029	7,20 - 6,82
	2030	6,77 - 6,40

G. SASARAN INTERVENSI

Sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1-5, namun diprioritaskan pada desil 1-3. Kelompok ini merupakan keluarga/individu dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan basis data mikro kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan, sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

H. PRIORITAS WILAYAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1 Bidang Pendidikan

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang pendidikan dilakukan dengan menggabungkan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah siswa putus sekolah. Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan jumlah siswa yang putus sekolah dengan angka yang tinggi, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan siswa putus sekolah yang rendah. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang pendidikan adalah Kecamatan Sukorejo, Singorejo, Patean, Weleri, dan Cepiring.

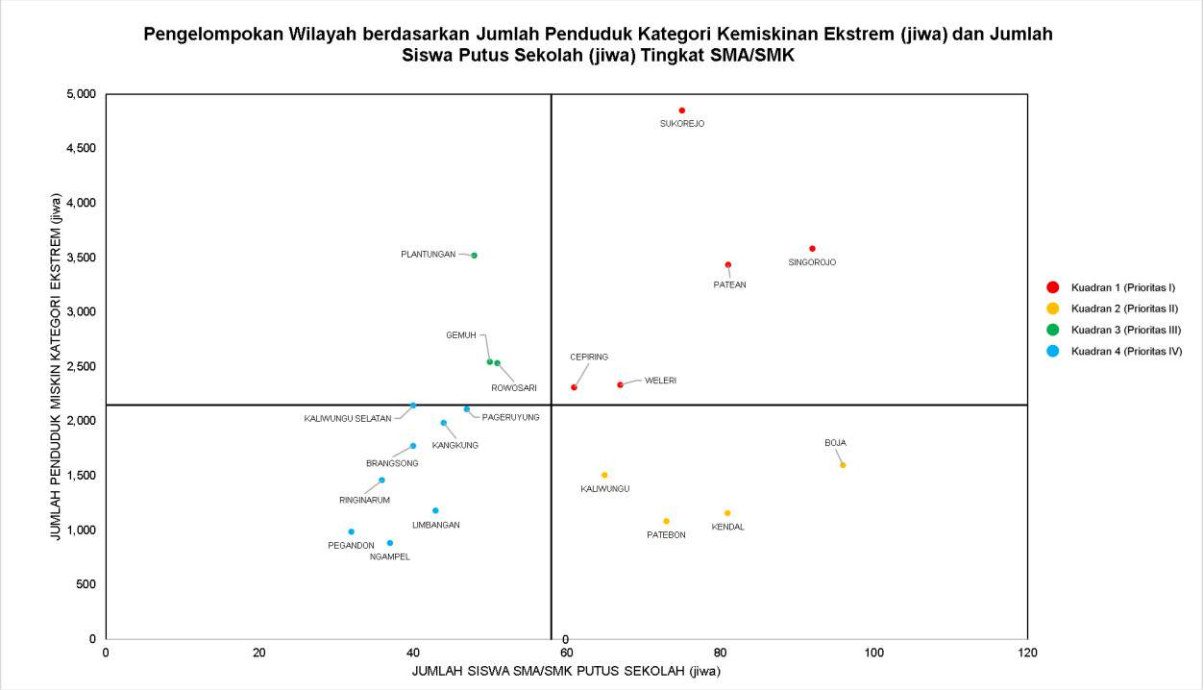

Gambar III-1 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Jumlah Siswa Putus Sekolah (jiwa) Tigkat SMA/SMK
Sumber : Hasil Olah Data, 2025

2 Bidang Kesehatan

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang kesehatan dilakukan dengan menggabungkan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah stunting. Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan stunting yang tinggi, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan prevalensi stunting yang rendah. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang kesehatan adalah Kecamatan Sukorejo, Singorejo, dan Weleri.

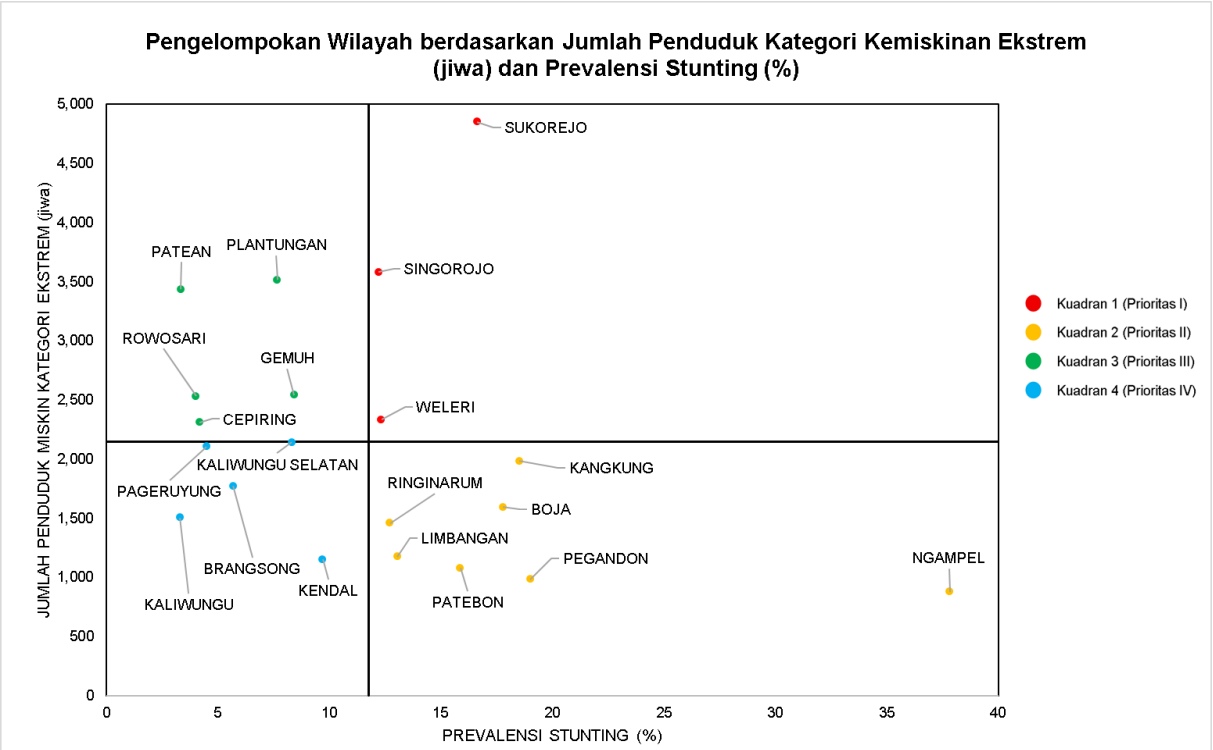

Gambar III-2 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Prevalensi Stunting

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang kesehatan pada tujuan jangka panjang kedua dilakukan dengan menurunkan angka kematian bayi. Oleh karena itu dilakukan penggabungan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah kematian bayi. Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan angka kematian bayi yang tinggi, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan angka kematian bayi yang rendah. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang kesehatan dalam tujuan ini adalah Kecamatan Sukorejo, Singorejo, Weleri, Plantungan, dan Rowosari.

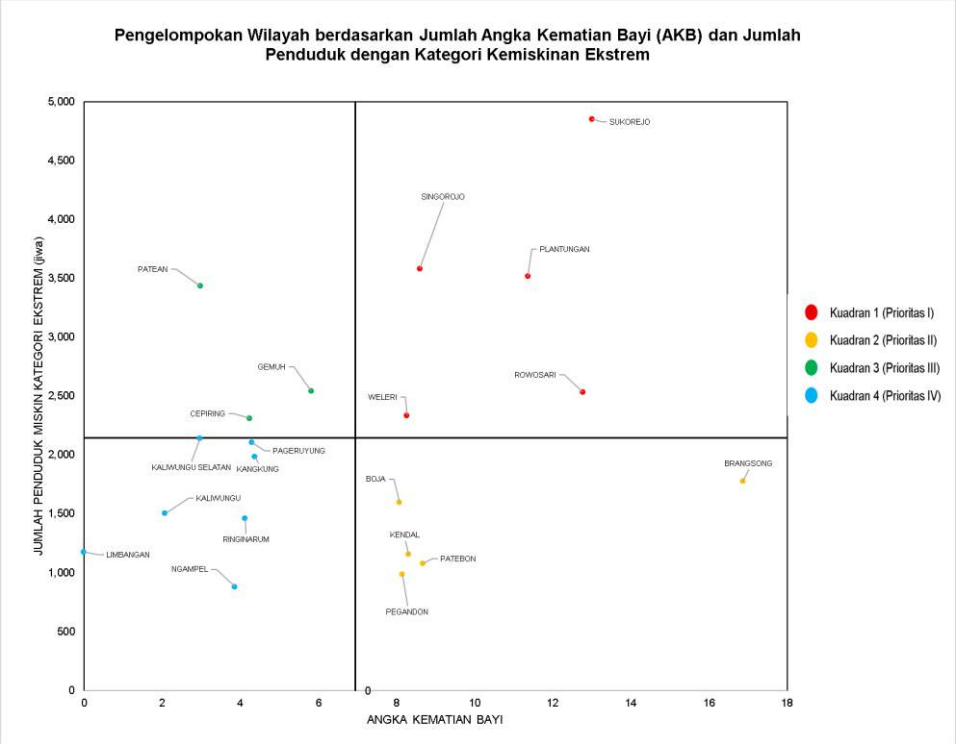

Gambar III-3 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Angka Kematian Bayi
Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang kesehatan pada tujuan jangka panjang ketiga dilakukan dengan menurunkan angka kematian ibu. Oleh karena itu dilakukan penggabungan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah kematian ibu. Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan angka kematian ibu yang tinggi, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan angka kematian ibu yang rendah. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang kesehatan dalam tujuan ini adalah Kecamatan Singorejo, Weleri, Gemuh, dan Cepiring.

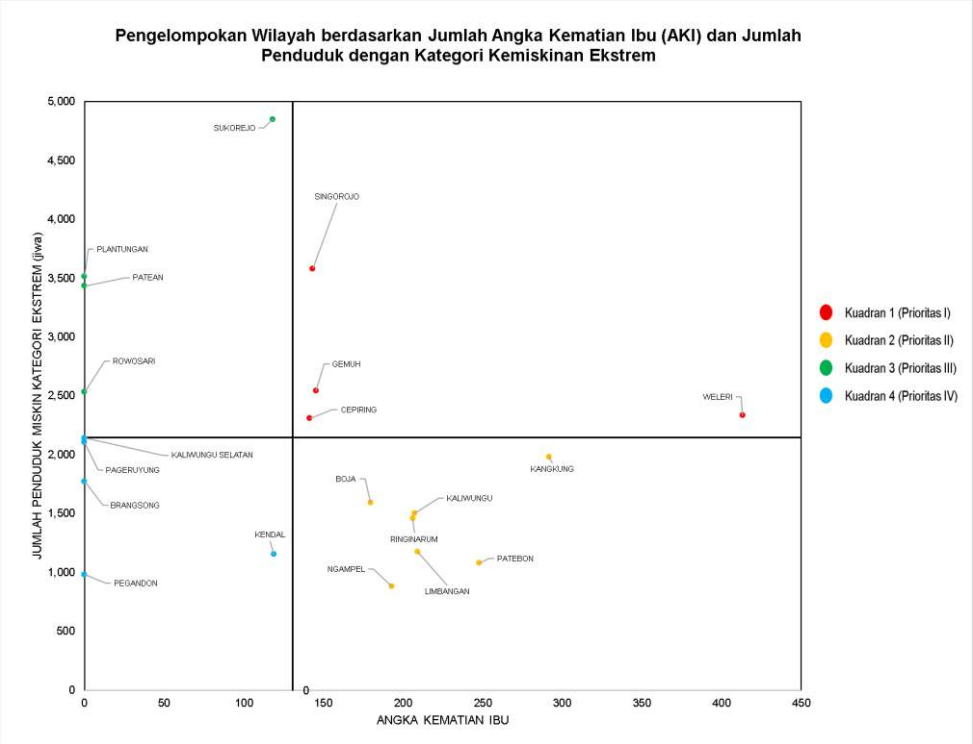

Gambar III-4 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Angka Kematian Ibu
Sumber : Hasil Olah Data, 2025

3 Bidang Ketenagakerjaan

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang ketenagakerjaan kedua dilakukan dengan menggabungkan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah pengangguran terbuka. Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan jumlah pengangguran terbuka yang tinggi, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan jumlah pengangguran terbuka yang rendah. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang ketenagakerjaan adalah Kecamatan Singorejo, Gemuh, Rowosari, Weleri, dan Cepiring.

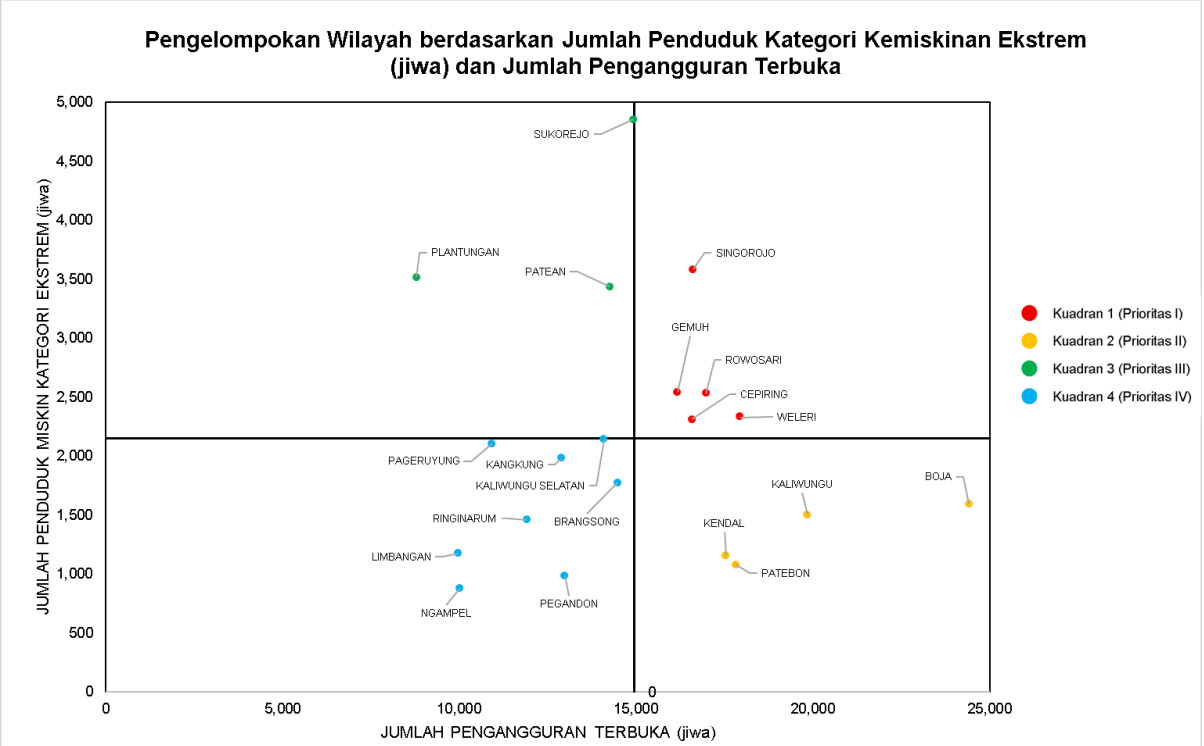

Gambar III-5 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Jumlah Pengangguran Terbuka
Sumber : Hasil Olah Data, 2025

4 Bidang Infrastruktur Dasar

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang infrastruktur dasar dilakukan dengan menggabungkan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah rumah tidak layak huni. Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan jumlah rumah tidak layak huni yang tinggi, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan jumlah rumah tidak layak huni yang rendah. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang infrastruktur dasar adalah Kecamatan Sukorejo, Singorejo, Patean, Weleri, Rowosari, Plantungan, dan Gemuh.

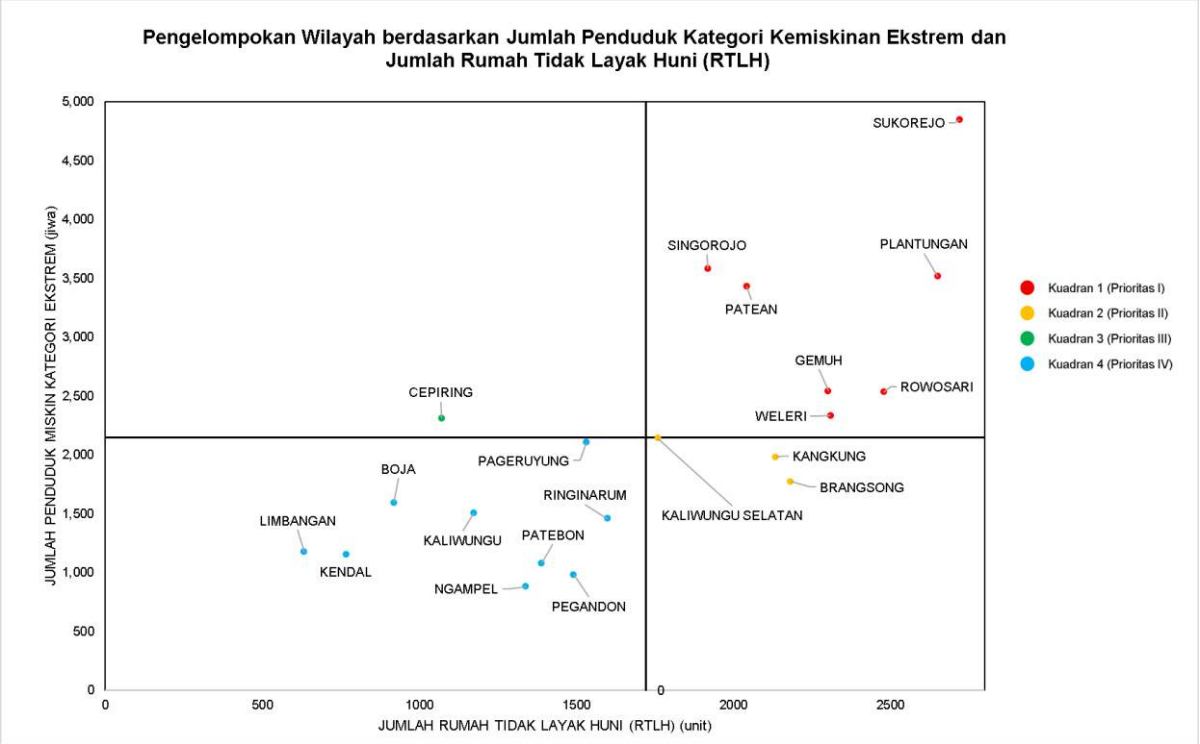

Gambar III-6 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Sumber : Hasil Olah Data, 2025

5 Bidang Pertanian dan Perikanan

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang pertanian dan perikanan dilakukan dengan menggabungkan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah produktivitas padi sawah. Hal ini dikarenakan data ini tersedia dalam skala kecamatan, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator dalam bidang ini Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan produktivitas yang rendah, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan j produktivitas yang tinggi. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang Pertanian dan Perikanan adalah Kecamatan Sukorejo, Singorejo, Patean, dan Plantungan.

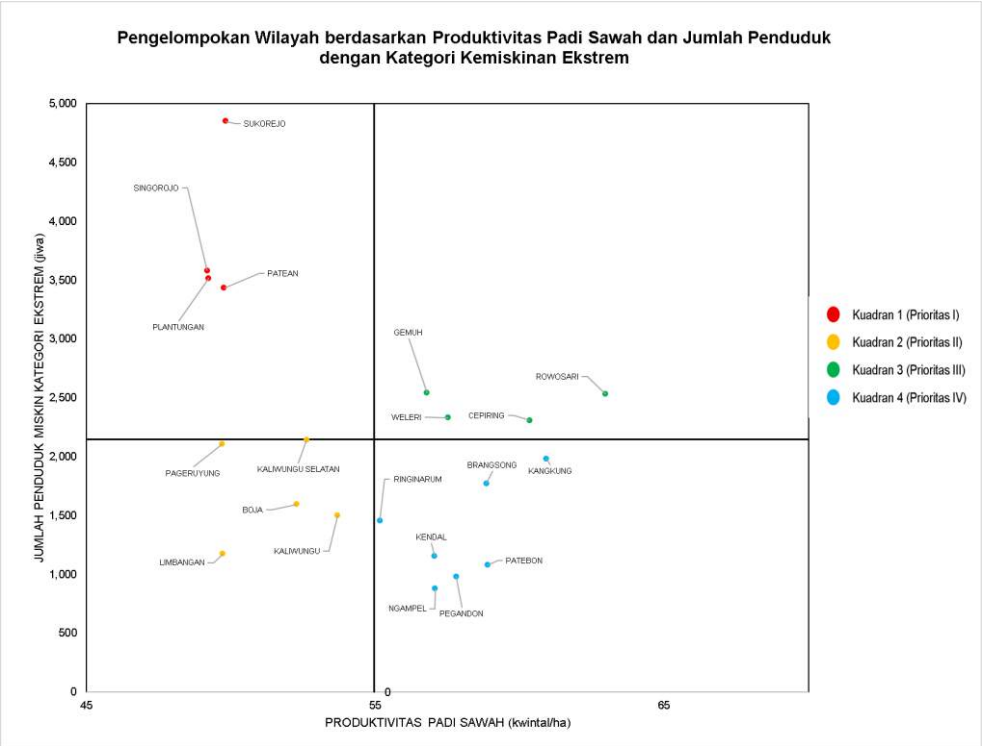

Gambar III-7 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Produktivitas Padi Sawah

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang pertanian dan perikanan dilakukan dengan menggabungkan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah produksi perikanan. Hal ini dikarenakan data ini tersedia dalam skala kecamatan, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator dalam bidang ini Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan produksi yang rendah, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan produksi yang tinggi. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang Pertanian dan Perikanan adalah Kecamatan Sukorejo, Singorejo, Patean, Plantungan, Gemuh, Weleri, dan Cepiring.

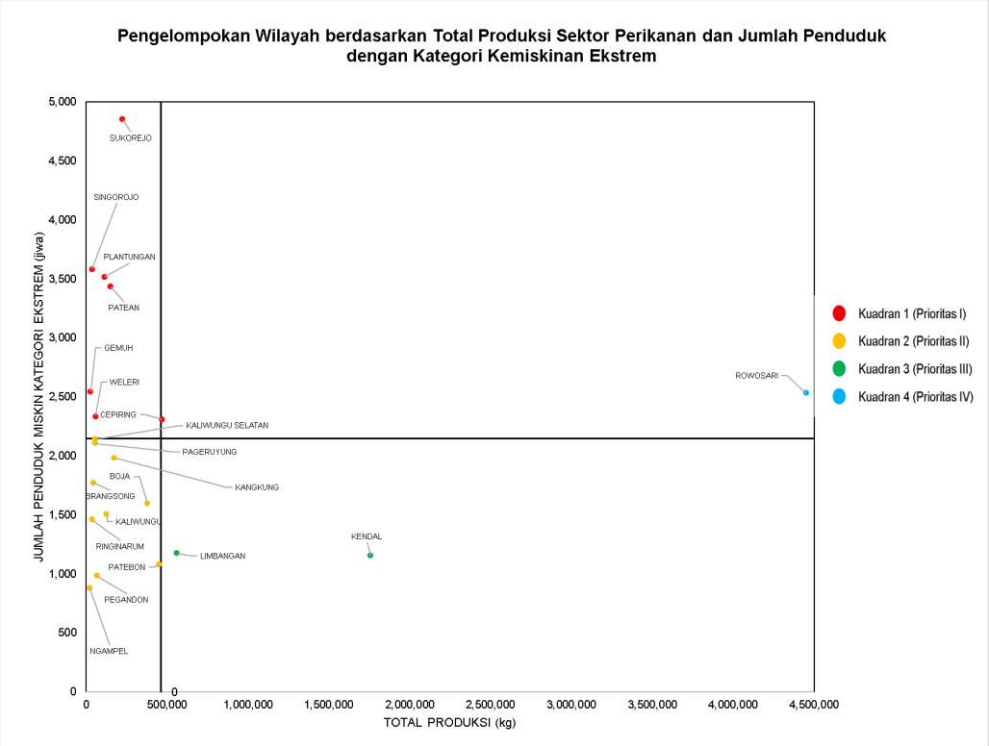

Gambar III-8 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Produksi Perikanan

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

6 Bidang Ketahanan Pangan

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang ketahanan pangan dilakukan dengan menggabungkan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan nilai komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan nilai komposit yang rendah, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan nilai komposit yang tinggi. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang ketahanan pangan adalah Kecamatan Sukorejo, dan Singorejo.

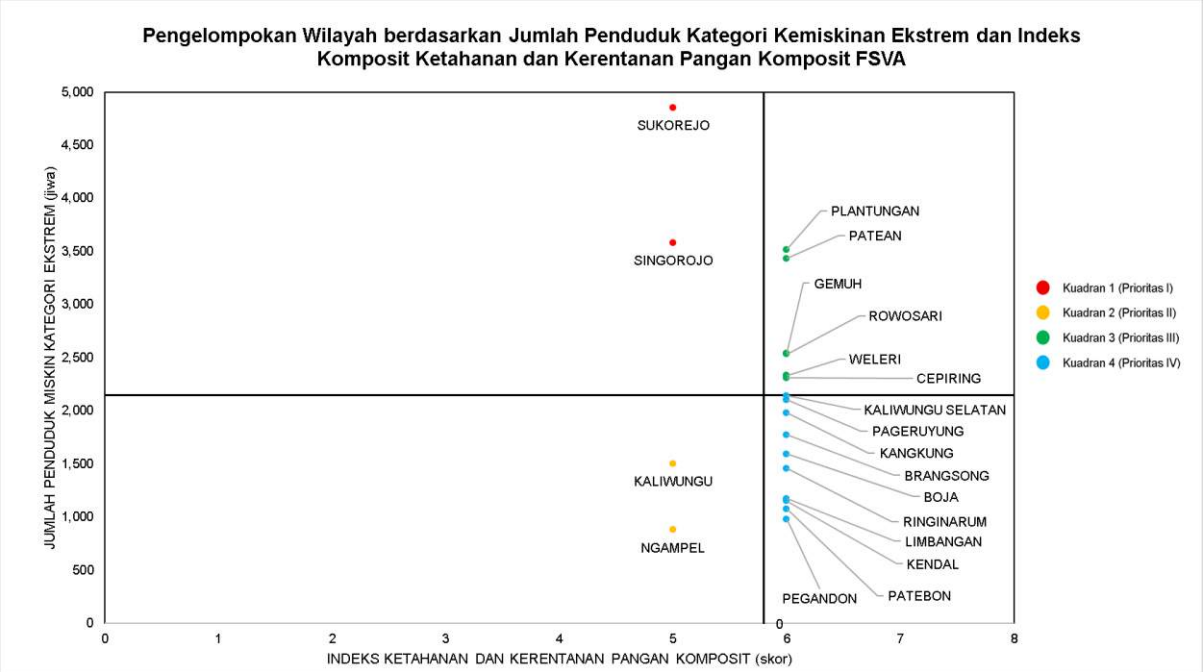

Gambar III-9 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Indeks Komposit Ketahanan Pangan

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

7 Bidang Sosial Masyarakat

Analisis lokasi wilayah prioritas pada bidang sosial dilakukan dengan menggabungkan indikator antara jumlah penduduk miskin ekstrim dan jumlah PPKS. Prioritas 1 atau kuadran pertama dalam bidang ini adalah pada jumlah kemiskinan ekstrim yang diatas rata-rata dan jumlah PPKS yang tinggi, sedangkan prioritas 4 berada pada daerah dengan kemiskinan ekstrim rendah dan jumlah PPKS yang rendah. Secara kewilayahan, kecamatan yang termasuk kedalam prioritas untuk intervensi bidang sosial adalah Kecamatan Gemuh dan Cepiring.

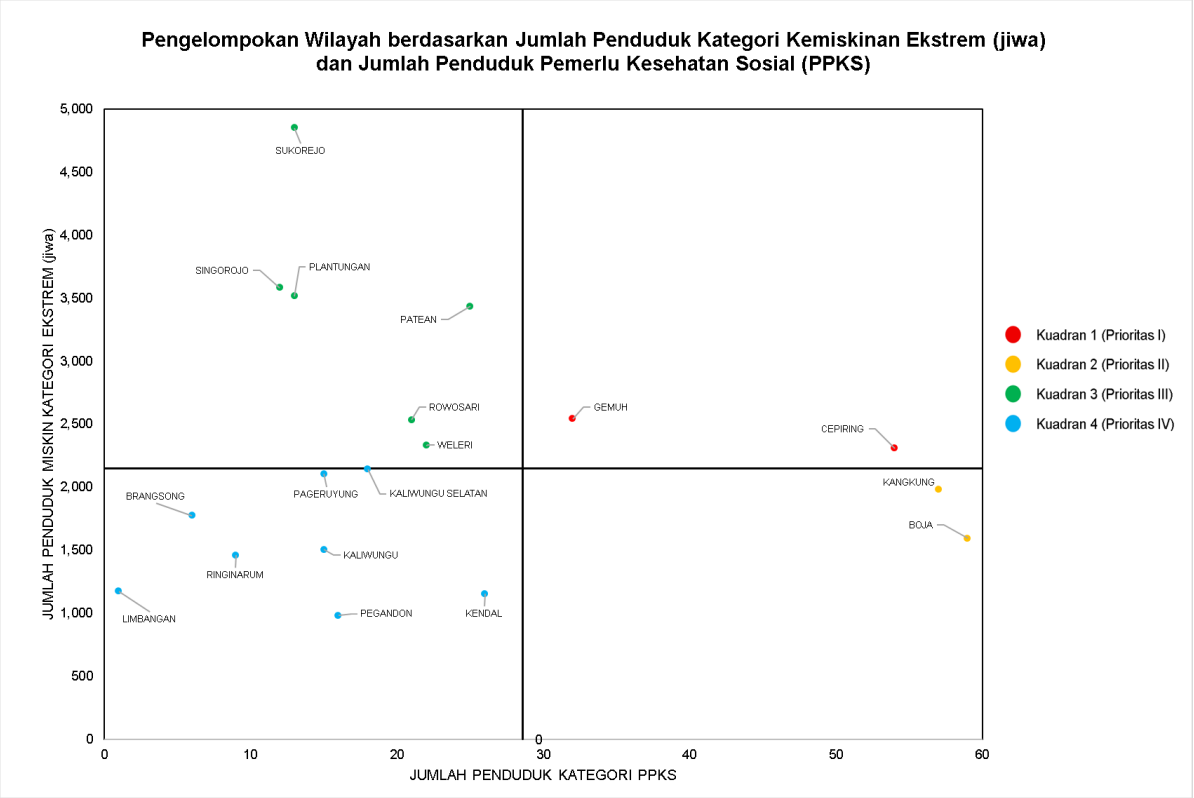

Gambar III-10 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kategori Kemiskinan Eksttrem (jiwa) dan Jumlah Penduduk Pemerlu Kesehatan Sosial
Sumber : Hasil Olah Data, 2025

8 Komposit Hasil Wilayah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, percepatan penanggulangan kemiskinan dpaat dilihat dari jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin serta kondisi tiap bidang kemiskinan. Penentuan hasil komposit prioritas wilayah ditentukan dari bidang konsumsi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Dengan adanya wilayah prioritas intervensi yang mempresentasikan distribusi penduduk sangat miskin-rentan miskin maka perlunya upaya yang dilakukan melalui kolaborasi intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Komposit dilakukan dengan menggabungkan seluruh parameter yang terdapat pada bidang yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil penggabungan juga akan menghasilkan empat kelas prioritas, dengan mempertimbangkan pada prioritas 1 sebagai wilayah dengan prioritas penanggulangan kemiskinan yang lebih didahulukan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi area yang paling membutuhkan intervensi, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien untuk mencapai dampak maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tabel III-2 Hasil Komposit Prioritas Wilayah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tiap Bidang Kemiskinan

KECAMATAN	KOMPONEN VARIABEL										PRIORITAS INTERVENSI
	SOSIAL DISABILITAS PPKS	PRODUKTIVITAS PADI SAWAH	PRODUKSI IKAN	PENGANGGURAN TERBUKA	STUNTING	AKI	AKB	SMA/SMK PUTUS SEKOLAH	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	KETAHANAN PANGAN KOMPOSIT	
KALIWUNGU SELATAN	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV
PAGERUYUNG	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV
LIMBANGAN	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS III	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV
BRANGSONG	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV
PEGANDON	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV
RINGINARUM	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV
NGAMPEL	PRIORITAS III	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS III
KENDAL	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS III	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS III
KALIWUNGU	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS III
KANGKUNG	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS III
PATEBON	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II
BOJA	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS II	PRIORITAS IV	PRIORITAS IV	PRIORITAS II
ROWOSARI	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS IV	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS II
PATEAN	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS II
PLANTUNGAN	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS II
CEPIRING	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS I
GEMUH	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I
SUKOREJO	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I
SINGOROJO	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I

WELERI	PRIORITAS III	PRIORITAS III	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS I	PRIORITAS III	PRIORITAS I

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. REKAPITULASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal melibatkan sejumlah Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Intervensi tersebut dijalankan melalui tiga arah strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kapasitas serta pendapatan masyarakat miskin, dan penguatan keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan serta penguatan sinergi kebijakan dan program lintas sektor. Rekapitulasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan pengelompokan strategi utama tersebut sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian kebijakan.

Tabel IV-1 Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Strategi Utama

Kabupaten Kendal 2025-2030

Strategi Utama	**Kerangka Pendanaan**					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	12.946.365.326,00	16.943.391.684,00	20.179.048.677,00	19.699.123.539,00	20.179.233.971,00	19.999.403.021,00
Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	361.069.044.405,00	319.707.125.478,00	372.435.623.474,00	419.775.051.754,00	471.354.658.386,00	469.230.841.456,00
Meminimalkan Wilayah Kantong	26.785.537.433,00	31.645.696.290,00	31.775.025.258,00	32.134.845.610,00	35.520.220.515,00	34.453.434.127,00

Kemiskinan serta Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan						
Total (Rupiah)	**400.800.947.164,00**	**368.296.213.452,00**	**424.389.697.409,00**	**471.609.020.903,00**	**527.054.112.872,00**	**523.683.678.604,00**

Secara rinci Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada lampiran.

BAB V
PENUTUP

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius melalui pendekatan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya pengentasannya tidak hanya berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar warga secara layak agar mereka mampu menjalani kehidupan yang bermartabat. Selain itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat agar kemandirian ekonomi dapat tumbuh secara bertahap.

Dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, pemerintah daerah menempatkan isu kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai salah satu dokumen strategis yang menjadi rujukan dalam perencanaan kebijakan di daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, keberadaan RPKD berperan dalam memperkaya, memperdalam, dan memperkuat substansi berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini memberikan kontribusi terhadap perencanaan jangka menengah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, maupun perencanaan tahunan seperti RKPD dan Renja Perangkat Daerah, terutama dalam memastikan isu kemiskinan tertangani secara lebih terarah.

Selain itu, kemiskinan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah, sehingga kebijakan penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. RPKD menjadi penting sebagai instrumen untuk menerjemahkan strategi umum ke dalam konteks permasalahan yang spesifik di daerah. Dokumen ini tidak bersifat terpisah, melainkan terintegrasi dan mendukung dokumen perencanaan serta penganggaran rutin daerah. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan wilayah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Asselin, L.-M. (2009). *Analysis of multidimensional poverty: Theory and case studies* (Vol. 7). Springer Science \& Business Media.

Badan Pangan Nasional. (2024). *Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (12 indikator)*. Satu Data Indonesia. https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications/frq/ikp-kab-kota-2024

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal: Kendal.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2025 Volume 50*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah: Semarang.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Statistik Indonesia 2025 Volume 53*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Bank Indonesia. (2024). *Informasi harga pangan strategis (PIHPS)*. Bank Indonesia. Diakses 19 November 2025, dari https://www.bi.go.id/hargapangan/

Bappeda Kabupaten Kendal. (2024). *Laporan RPJMD Kabupaten Kendal 2024.* Kendal: Bappeda

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2023. *Profil Perkembangan Kependudukan 2022*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal: Kendal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2024. *Profil Perkembangan Kependudukan 2023*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal: Kendal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2025. *Profil Perkembangan Kependudukan 2024*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal: Kendal.

Dinas Sosial Kabupaten Kendal. (2024). *Rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/masyarakat/komunitas).* Kendal: Dinas Sosial.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025. *Peta Rencana Kawasan Strategis RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031*. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal: Kendal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025. *Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031*. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal: Kendal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025. *Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031*. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal: Kendal.

Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty+ inequality*. World Bank Publications.

Kakwani, N., & Son, H. H. (2008). Poverty equivalent growth rate. *Review of Income and Wealth*, *54*(4), 643–655.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (PMK No. 65/2020)*. Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, 2025. *Peta Adminsitrasi Kabupaten Kendal*. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal: Kendal.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2022. *Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020. *Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031*.

Peraturn Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.*

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024. *Tentang Penanggulangan Kemiskinan.*

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011. *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031*.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025. *Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.*

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2024. *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019. *Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.*

Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi (SiHaTi) Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Tabel harga berdasarkan kabupaten*. SiHaTi Jawa Tengah. Diakses 19 November 2025, dari https://www.hargajateng.org/tabel-harga-kab

Wagle, U. (2009). *Multidimensional poverty measurement: Concepts and applications.*

LAMPIRAN

TOC Determinan Pendidikan

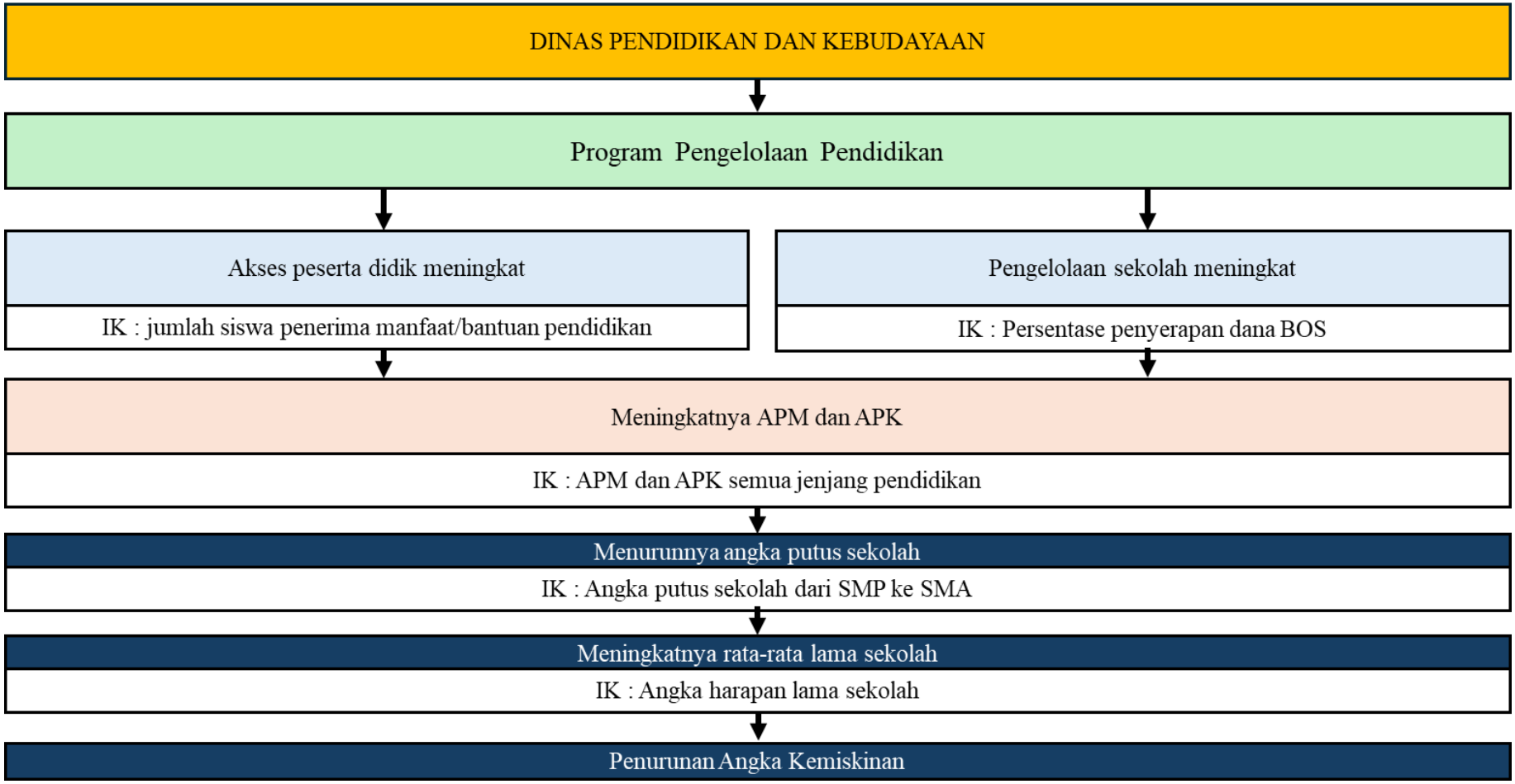

TOC Determinan Kesehatan

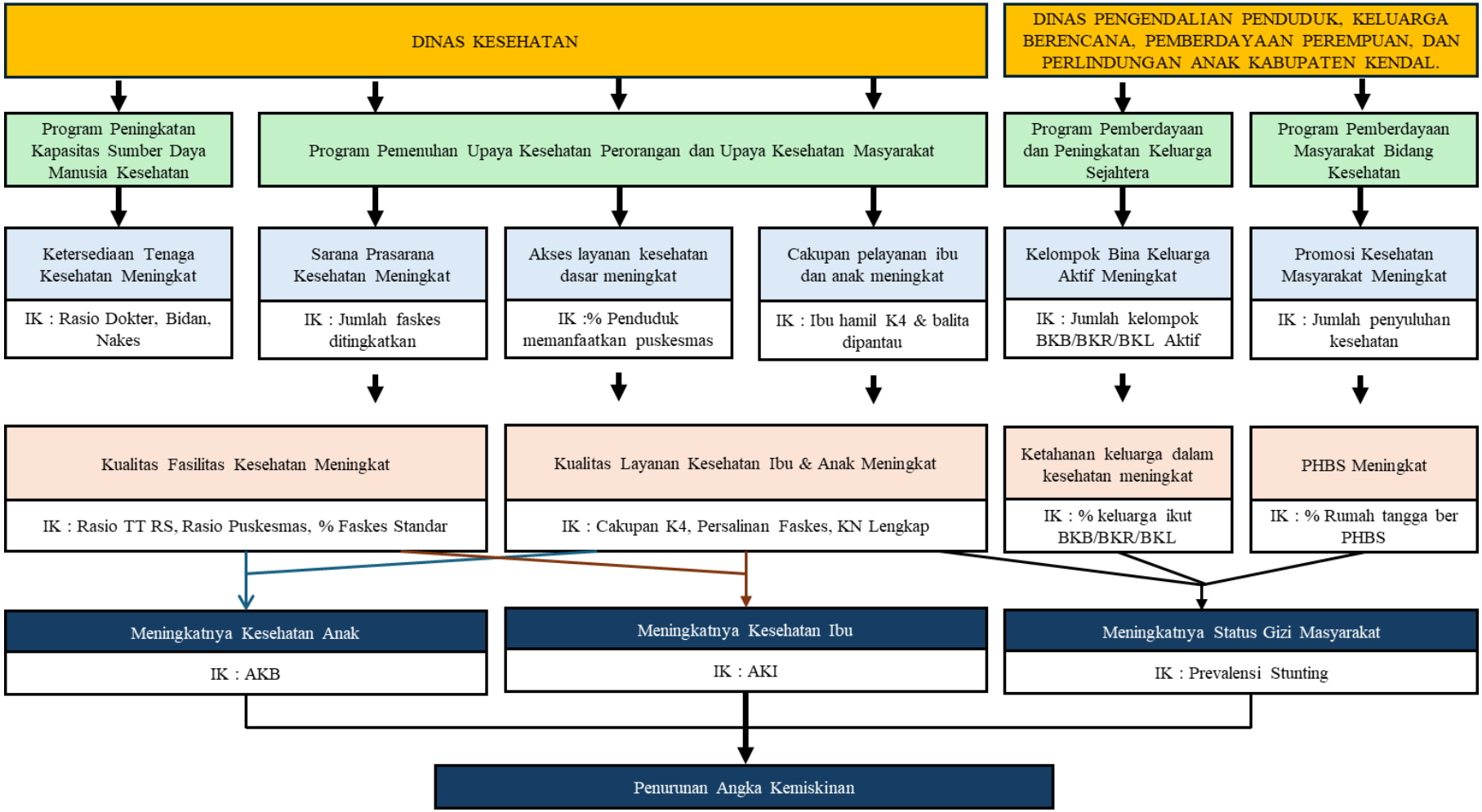

TOC Determinan Ketenagakerjaan

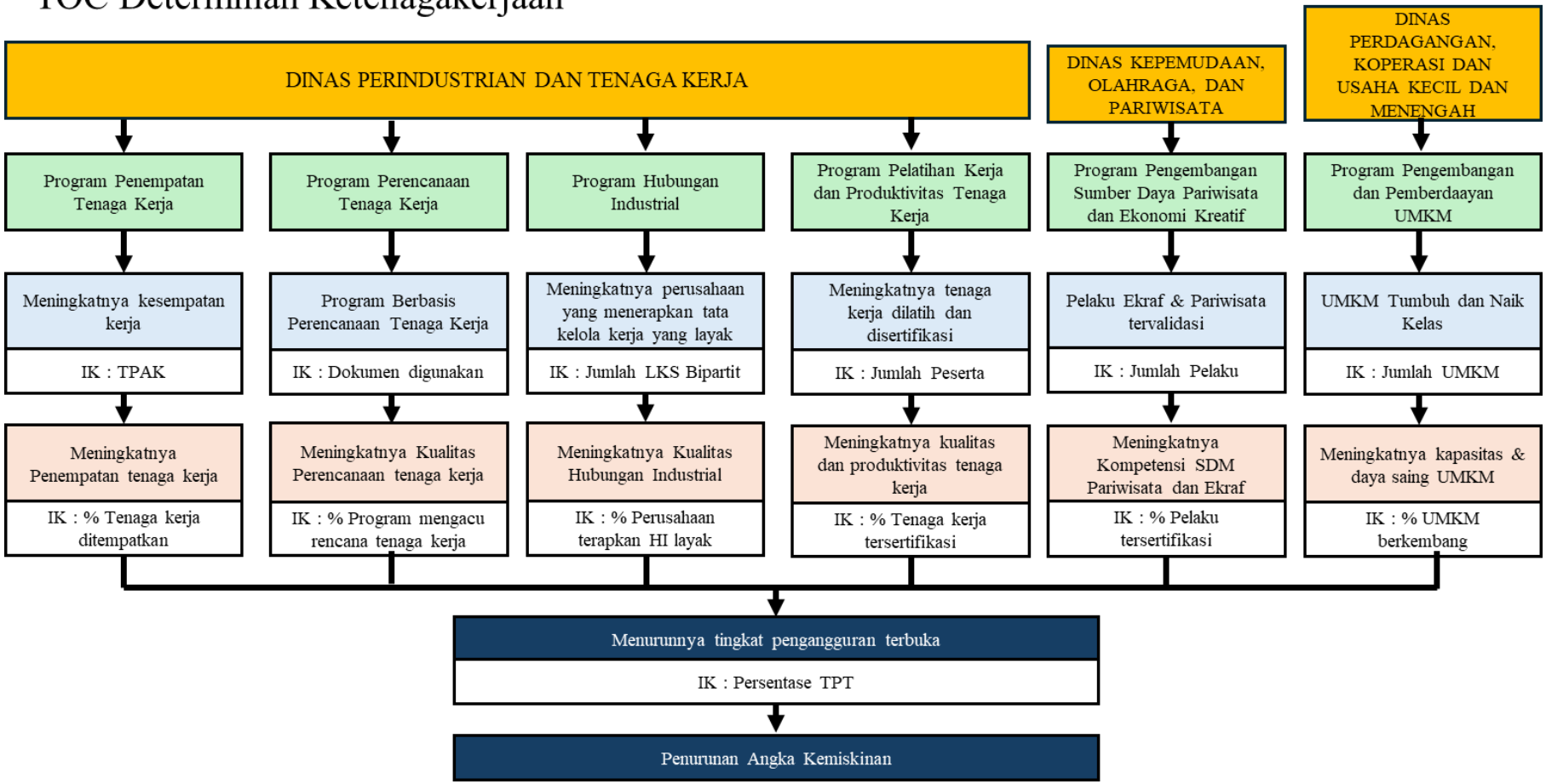

TOC Determinan Infrastruktur

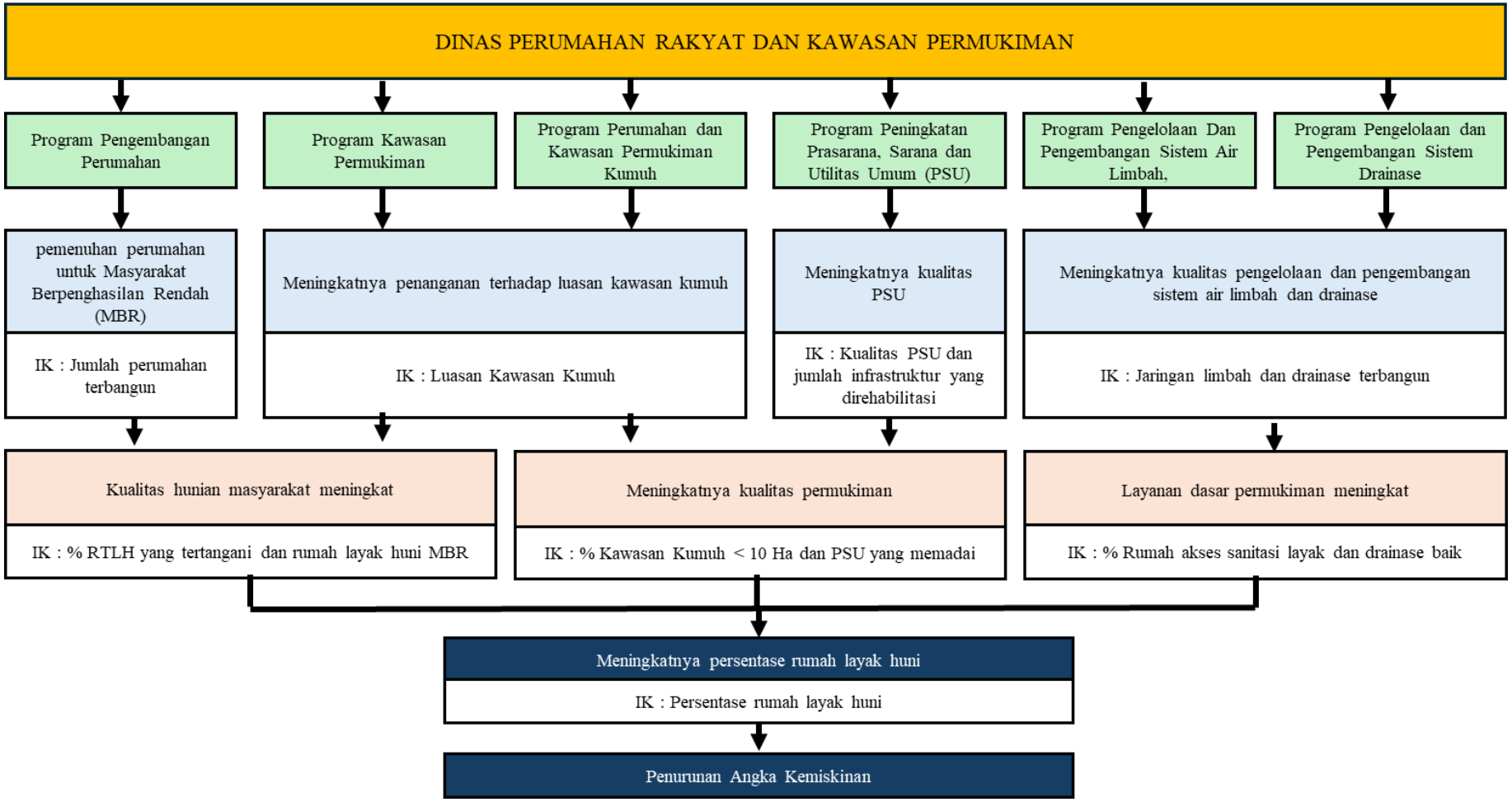

TOC Determinan Pertanian dan Perikanan

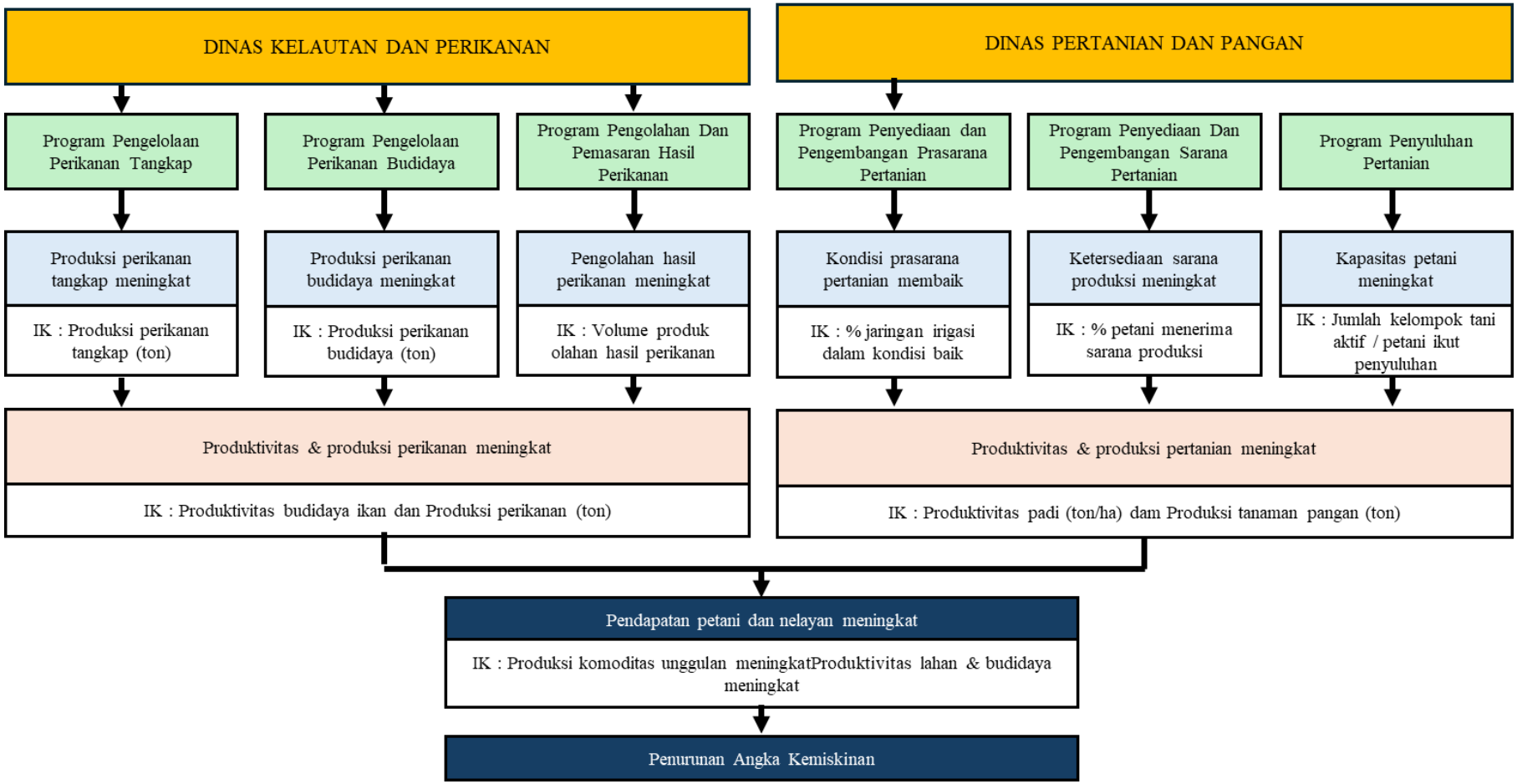

TOC Determinan Ketahanan Pangan

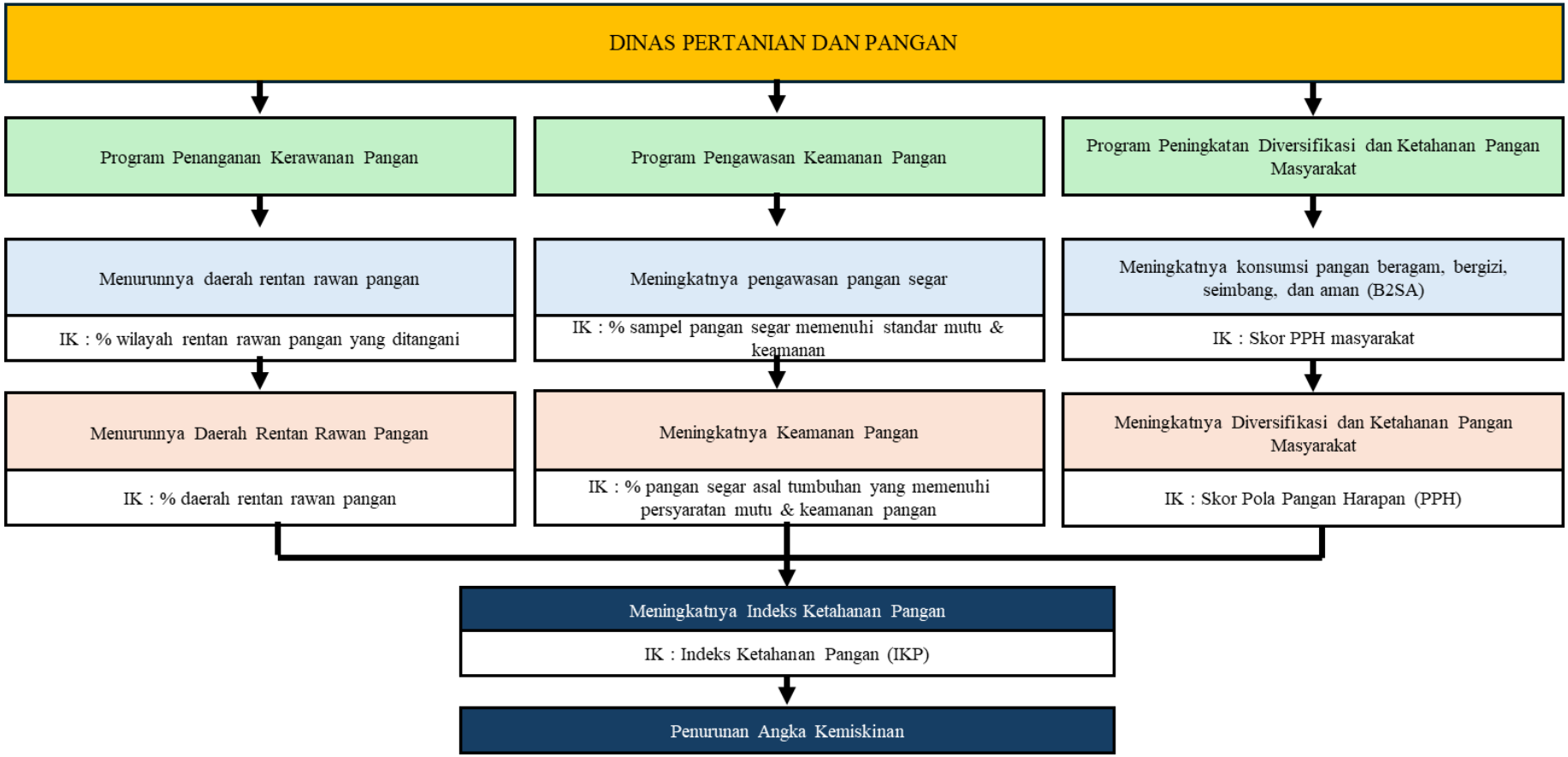

TOC Determinan Sosial

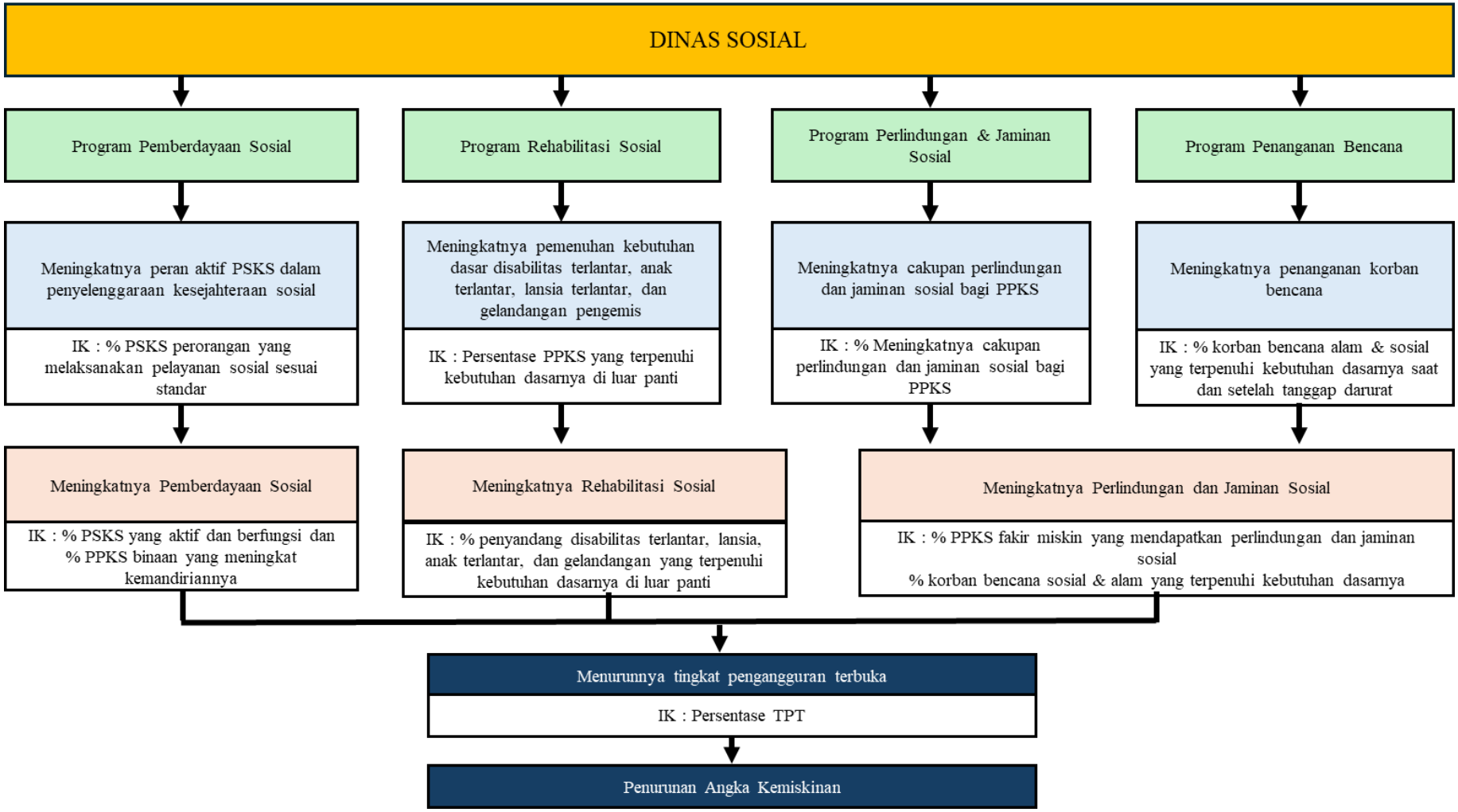

LAMPIRAN 2

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 – 2030

Kode Rekening	Program	Strategi OPPKPE	Outcome	Indikator Program	Definis Operasional	Satuan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pendapatan & Pemberdayaan	Meningkatnya kapasitas, produktivitas, dan daya saing UMKM	Presentase usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan / Jumlah total usaha mikro X 100%	Persen	6,41	426.749.570	6.94	242.547.212	7.20	171.000.428	7.46	179.413.064	7.72	184.408.406	7.98	198.624.930	8.24	196.897.646
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Pendapatan & Pemberdayaan	Meningkatnya UMKM yang inovatif, kreatif, berorientasi pasar	Presentase Usaha mikro yang dikembangkan	Jumlah Usaha mikro yang dikembangkan / Jumlah usaha mikro X100%	Persen	6.10	81.220.000	6.20	434.354.790	6.40	2.418.434.082	6.60	2.037.412.774	6.80	2.108.061.158	7	2.309.123.384	7.20	2.284.694.659
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Pendapatan & Pemberdayaan	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja yang terlatih X 100	Persen	39,19	2.576.913.591	0,4	2.051.291.866	40.40	953.932.166	40.80	1.000.862.368	41.10	1.028.729.064	41.50	1.108.036.466	41.90	1.098.400.749
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Peningkatan Pendapatan & Pemberdayaan	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja X jumlah rencana kegiatan tenaga kerja X 100	Persen	9,71	21.230.000	0,1	-	0,1		0,1	9.000.000	0,1	10.000.000	0,1	10.000.000	0,1	10.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Peningkatan Pendapatan & Pemberdayaan	Meningkatnya kualitas penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten /kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar dikali 100%	Persen	68,14	886.926.795	0,69	377.572.031	69.50	2.105.466.676	0,7	2.200.048.441	70.60	2.260.554.281	0,71	2.435.597.223	71.50	2.414.329.797

2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	(jumlah perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak) DIBAGI (jumlah Perusahaan) DIKALI 100%	Persen	63,24	74.374.000	63.30	1.065.967.001	63.72	886.912.207	64.14	930.545.256	64.59	956.454.134	64.79	1.030.189.674	0,65	1.021.230.929
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Perlu Review Manual	Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Presentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi DIBAGI Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif DIKALI 100%	Persen	NA	4.204.075.000	0,7	-	0,72	436.867.613	0,73	458.360.006	0,75	471.121.979	0,77	507.442.000	0,8	503.029.178
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perlu Review Manual	Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)	Presentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual DIBAGI Jumlah pelaku ekonomi kreatif DIKALI 100%	Persen	0,33	50.000.000	5.15	127.862.500	7.69	2.815.594	10.71	2.954.112	12.90	3.036.362	14.29	3.270.443	0,15	3.242.003
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perlu Review Manual	meningkatnya kulitas layanan kesehatan perorangan dan masyarakat	IP SPM Ibu Hamil & Bersalin	Rata-rata Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar Ibu Hamil & Bersalin x	Persen	100	109.776.699.310	100	142.004.324.891	100	109.450.096.476	100	154.834.667.185	100	193.031.972.609	100	227.131.364.766	100	227.131.364.766
		Perlu Review Manual			BM + Persentase pencapaian penerima layanan															
		Perlu Review Manual			dasar Ibu Hamil & Bersalin x BP															
		Perlu Review Manual		Persentase Intervensi Spesifik Stunting	Rata - rata capaian Indikator Spesifik per Tahun	Persen	90,74	-	91	-	92		93		94		95		96	

		Perlu Review Manual		IP SPM Bayi Baru Lahir & Balita	Rata-rata Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar Bayi Baru Lahir & Balita x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar Bayi Baru Lahir & Balita x BP	Persen	100	-	100	-	100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual																	
		Perlu Review Manual																	
		Perlu Review Manual		IP SPM PM	Rata-rata Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar Orang Terduga Tuberkulosis & Orang Dengan Risiko HIV x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar Orang Terduga Tuberkulosis & Orang Dengan Risiko HIV x BP	Persen	100	-	100	-	100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)**	Jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan diantara perkiraan (estimasi) kasus tuberkulosis	Persen	81,69	-	90	-	93		93		93		93		93	
		Perlu Review Manual																	
		Perlu Review Manual		Insidensi Rate HIV	Jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur di atas 15 tahun dibagi jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun yang belum terkena infeksi HIV (population at risk), dalam kurun waktu tertentu, dikali 1000	Per 1.000	0,14	-	0,13	-	0,12		0,11		0,1		0,09		0,08	
		Perlu Review Manual				Penduduk													

		Perlu Review Manual		IP SPM PTM	Rata-rata Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar Hipertensi, DM & ODGJ Berat x BM	Persen	100	-	100	-	100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual			+ Persentase pencapaian penerima layanan dasar Hipertensi, DM & ODGJ Berat x BP														
		Perlu Review Manual		Persentase seluruh anggota rumah tangga yang telah melakukan cek kesehatan	Jumlah anggota rumah tangga yang telah melakukan cek kesehatan / Jumlah seluruh anggota keluarga yang harus melakukan cek	Persen	80	-	80	-	85		90		95		100		100	
		Perlu Review Manual			kesehatan X100%														
		Perlu Review Manual		IP SPM Usia Produktif	Rata-rata Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar Usia Produktif x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar Usia	Persen	100	-	100	-	100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual			Produktif x BP														
		Perlu Review Manual		IP SPM Usia Lanjut	Rata-rata Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar Usia Lanjut x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar Usia Lanjut x	Persen	100	-	100	-	100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual			BP														
		Perlu Review Manual		Persentase desa/kelurahan STBM	Jumlah Desa/Kelurahan yang	Persen	67	-	70	-	77		84		91		100		100	

					Melaksanakan STB														
		Perlu Review Manual			M / Jumlah seluruh desa/kelurahan X100%														
		Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna / Jumlah fasilitas	Persen	80	-	82	-	84		86		88		90		92	
		Perlu Review Manual			pelayanan kesehatan X100%														
		Perlu Review Manual		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk	Rasio	0,83	-	0,95	-	1,03		1,11		1,19		1,27		1,35	
		Perlu Review Manual		Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio jumlah puskesmas per 30000 penduduk	Rasio	0,82	-	0,82	-	0,82		0,85		0,85		0,85		0,85	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perlu Review Manual	Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis per 1000 penduduk	Rasio	3,75	2.301.590.917	2,5	1.514.634.000	2,54	1.300.452.620	2,58	1.364.430.445	2,62	1.402.419.852	2,66	1.510.536.050	2,7	1.497.400.112
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas advokasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	persentase rumah tangga PHBS	Jumlah Rumah Tangga yang Menerapkan PHBS / Jumlah Rumah tangga yang disurvei X100%	Persen	80	4.485.523.000	60	1.479.705.062	70	955.499.709	80	1.002.507.029	85	1.030.419.516	90	1.109.857.240	100	1.100.205.689
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Perlu Review Manual	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian keluarga dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga DIBAGI Jumlah	Persen	7,37	5.375.658.500	7,67	5.470.100.000	7,97	5.133.579.246	8,27	5.386.133.802	8,57	5.536.098.226	8,87	5.962.890.456	9,17	5.911.035.912
		Perlu Review Manual			Keluarga DIKALI 100%														

			pendidikan																
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas pendidikan dan pengelolaan PAUD	APK PAUD	APK PAUD	Persen	-	190.594.053.607	100	195.924.441.878	100	194.299.456.400	100	200.858.325.649	100	209.534.288.722	100	225.687.832.727	100	223.725.204.048
		Perlu Review Manual																	
		Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas pendidikan dan pengelolaan SD	APK SD	APK SD	Persen	103,44		100		100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual																	
		Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas pendidikan dan pengelolaan SMP	APK SMP	APK SMP	Persen	94,76		100		100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual																	
		Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas pendidikan dan pengelolaan Kesetaraan	APK KESETARAAN	APK KESETARAAN	Persen	-		-		-		-		-		-		-	
		Perlu Review Manual																	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas muatan lokal PAUD yang dikembangkan	Prosentase Kurikulum muatan lokal PAUD yang ditetapkan	jumlah kurikulum muatan lokal PAUD yang ditetapkan dibagi jumlah kurikulum muatan lokal	Persen	100	75.000.000	100	43.190.000	100	44.136.318	100	46.307.674	100	47.597.004	100	51.266.381	100	50.820.558
		Perlu Review Manual			yang teridentifikasi di kali 100															
		Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas muatan lokal SD yang dikembangkan	Prosentase Kurikulum muatan lokal SD yang ditetapkan	jumlah kurikulum muatan lokal SD yang ditetapkan dibagi jumlah kurikulum muatan lokal yang	Persen	100		100		100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual			teridentifikasi di kali 100															

		Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas muatan lokal SMP yang dikembangkan	Prosentase Kurikulum muatan lokal SMP yang ditetapkan	jumlah kurikulum muatan lokal SMP yang ditetapkan dibagi jumlah kurikulum muatan lokal	Persen	100		100		100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual			yang teridentifikasi di kali 100															
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Prosentase Tenaga Pendidik Bersertifikat	Jumlah tenaga pendidik bersertifikat / Jumlah total	Persen	58	11.550.336.000	57	3.796.995.136	60	4.630.608.130	75	5.760.518.253	100	5.920.906.546	100	6.377.364.651	100	6.321.905.752
		Perlu Review Manual			tenaga pendidik X100%															
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Perlu Review Manual	meningkatnya satuan pendidikan PAUD yang memiliki izin pendirian	Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD	Jumlah penerbitan rekomendasi pendirian PAUD / Jumlah total yang mengajukan izin X100%	Persen	100	15.000.000	75	36.032.500	80	28.155.943	80	29.541.119	80	30.363.623	80	32.704.434	80	32.420.029
		Perlu Review Manual	meningkatnya satuan pendidikan SD yang	Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian SD	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Pendirian SD /	Persen	100		100		100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual	memiliki izin pendirian		Jumlah Pengajuan izin pendirian SD X100%															
		Perlu Review Manual	meningkatnya satuan pendidikan SMP yang memiliki izin pendirian	Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian SMP	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Pendirian SMP	Persen	100		100		100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual			/ Jumlah pegajuan izin pendirian SMP X 100%															
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas pengembangan tradisonal	Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan	jumlah kesenian tradisional kendal yang difasilitasi dibagi jumlah kesenian tradsional yang ditetapkan	Persen	100	127.500.000	100	155.425.000	100	309.715.374	100	324.952.312	100	333.999.856	100	359.748.775	100	356.620.324

		Perlu Review Manual			X 100														
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perlu Review Manual	meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah terkena bencana dan relokasi program pemerintah	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah KK terdampak relokasi yang difasilitasi rumah layak huni dibagi Jumlah total KK terdampak relokasi x 100	Persen	15	2.854.258.000	15	2.676.100.150	10	1.420.936.593	10	1.490.841.818	10	1.532.350.856	10	1.650.483.775	10	1.636.130.822
		Perlu Review Manual																	
		Perlu Review Manual		persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah KK korban bencana yang difasilitasi rumah layak huni dibagi Jumlah total KK korban bencanax 100	Persen	23.53	-	15	-	15		30		30		30		30	
		Perlu Review Manual																	
		Perlu Review Manual	Meningkatnya pemenuhan perumahan untuk MBR	persentase rumah layak huni untuk MBR	jumlah ruangan yang dihuni dibagi jumlah unit yang tersedia di runusawa X 100%	Persen	79.59	-	79.59	-	81.67		82.92		82.92		83.75		83.75	
		Perlu Review Manual																	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya penanganan terhadap luasan kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota ditangani	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani dibagi kawasan kumuh dibawah 10 ha x 100	Persen	19.87	6.774.167.000	5.69	3.928.060.000	11.38	126.701.744	17.07	132.935.037	22.76	136.636.305	28.45	147.169.953	34.14	145.890.133
		Perlu Review Manual		Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani dibawah 10 ha dibagi jumlah rumah tidak layak huni dibawah 10 ha x 100	Persen	9.79	-	9.98	-	8.17		25.41		34.07		51.68		100	

1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pengurangan Kantong Kemiskinan	Meningkatnya pencegahan luasan permukiman kumuh	Persentase Rumah tidak layak huni yang ditangani	jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun dibagi jumlah rumah tidak layak huni X 100	Persen	5.19	762.590.000	1.78	3.286.530.869	1.78	2.168.267.589	1.78	2.274.938.945	1.78	2.338.279.352	1.78	2.518.543.397	1.78	2.496.641.616
		Perlu Review Manual																		
		Perlu Review Manual		Persentase BKM aktif dalam pencegahan kumuh	Jumlah Kelompok anggota BKM yang aktif dalam pecegahan kawasan kumuh	Persen	-	-	3.45	-	6.90		10.34		13.79		17.24		20.69	
		Perlu Review Manual																		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perlu Review Manual	Meningkatnya kualitas PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah perumahan yang memiliki PSU dibagi dengan jumlah perumahan dengn PSU yang sudah diserahkan ke pemda X 100	Persen	100	9.165.256.000	100	3.162.740.999	100	2.814.140.107	100	2.957.505.842	100	3.042.635.013	100	3.284.908.930	100	3.255.473.053
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	(Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/per	Persen	91,91	6.366.692.745	92,01	7.932.302.368	92.11	8.790.261.024	92.21	8.790.261.024	92.31	8.479.496.883	92.41	10.210.295.985	92.51	10.121.505.112

					mukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N / Jumlah penduduk di kabupaten/kota) x 100%														
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik (%)	panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik dibagi jumlah drainase perkotaan X 100	Persen	40,84	1.268.625.000	40,93	1.088.429.496	41,02	306.333.845	41,11	321.404.423	41,21	330.353.185	41,3	355.820.973	41,39	352.726.679
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya infrastruktur pangan aktif	Persentase infrastruktur pangan aktif	Jumlah lumbung pangan aktif DIBAGI jumlah lumbung pangan DIKALI 100%	Persen	0,16	-	0,18	-	0,2		0,21	1.000.000.000	0,22	1.000.000.000	0,23	1.000.000.000	0,24	1.000.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Perlu Review Manual Perlu Review Manual Perlu Review Manual	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	1.Pengelompokkan pangan 2.Konversi bentuk. jenis dan satuan 3.Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4.Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan	Nilai	95,76	658.083.840	95.77	361.540.340	95.77	226.270.544	95.78	237.402.281	95.78	244.012.198	95.79	262.823.734	95.79	260.538.164

		Perlu Review Manual			5.Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhdap total energi aktual (dalam bentuk persen)														
		Perlu Review Manual			6.Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angak Kecukupan Energi (% AKE)														
		Perlu Review Manual			7.Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan.														
		Perlu Review Manual			8.Menghitung skor AKE 9.Menghitung Skor PPH														
		Perlu Review Manual			10.Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan														
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Perlu Review Manual	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Jumlah desa/kelurahan rentan rawan pangan DIBAGI jumlah desa/kelurahan DIKALI 100%	Persen	0,03	143.015.000	0,03	34.235.000	0,03	62.693.900	0,03	65.778.226	0,03	67.609.668	0,03	72.821.873	0,02	72.188.599
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan	Jumlah sampel PSAT memenuhi mutu pangan DIBAGI jumlah seluruh Sampel PSAT DIKALI 100%	Persen	0,86	35.907.000	86.25	30.510.000	86.30	31.440.803	86.35	32.987.583	86.45	33.906.046	86.50	36.519.951	86.55	36.202.366
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA	Perlu Review Manual	Meningkatnya hasil pertanian	jumlah produksi padi	jumlah produksi padi	Ton	192.740	4.261.841.482	193.589	3.516.695.200	194.439	1.765.781.856	196.137	2.852.652.289	197.835	1.904.235.102	199.533	1.051.037.545	201.231	1.033.201.293

	NGAN SARANA PERTANIAN	Perlu Review Manual		jumlah produksi jagung	jumlah produksi jagung	Ton	220.553	221.018	221.429	222.315	223.204	224.097	224.994				
		Perlu Review Manual		jumlah produksi bawang merah	jumlah produksi bawang merah	Ton	251.657	243.812	244.577	245.343	246.109	246.875	247.641				
		Perlu Review Manual		jumlah produksi cabai	jumlah produksi cabai	Ton	4.984	4.842	4.861	4.880	4.900	4.920	4.940				
		Perlu Review Manual		jumlah produksi tembakau	jumlah produksi tembakau	Ton	6.455	6.778	7.117	7.473	7.846	8.238	8.650				
		Perlu Review Manual		jumlah produksi kopi	jumlah produksi kopi	Ton	2.156	2.346	2.455	2.570	2.689	2.815	2.948				
		Perlu Review Manual		Jumlah populasi sapi	Jumlah populasi sapi	Ekor	17.156	18.013	18.553	19.093	19.093	20.174	20.714				
		Perlu Review Manual		Jumlah populasi ayam ras (broiler)	Jumlah populasi ayam ras (broiler)	Ekor	10.820.257	11.090.763	11.361.269	11.631.776	11.902.282	12.172.789	12.443.295				
		Perlu Review Manual		Jumlah popupasi ayam petelur	Jumlah popupasi ayam petelur	Ekor	5.514.079	5.596.790	5.679.501	5.762.212	5.844.923	5.927.634	6.010.346				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik (jalan usaha tani, Irigasi, Puskeswan, BPP,RPH) DIBAGI Julmah Prasarana pertanian DIKALI 100%	Persen	0,36	14.450.170.143	0,36	2.297.268.200	0,42	10.484.696.001	0,48	10.000.507.214	0,54	10.306.790.867	0,56	10.924.582.319	0,56	10.072.554.374
		Perlu Review Manual		Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Ha	22.666,00	22.666,00	22.666,00	22.666,00	22.666,00	22.666,00	22.666,00				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Perlu Review Manual	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit	(Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan DIKURANGI jumlah kejadian	Persen	0,32	687.075.000	0	397.693.720	0	265.369.763	0,01	278.425.049	0,01	286.177.150	0,01	308.239.291	0,01	305.558.778

	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		penyakit hewan menular	hewan menular	penyakit/kasus tahun sebelumnya)														
		Perlu Review Manual			Dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan														
		Perlu Review Manual			tahun sebelumnya DIKALI 100%														
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya pengendalian penanggulangan bencana pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	JUmlah luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DIBAGI Jumlah luas areal Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan x 100%	Persen	0,97	294.392.081	96.94	343.023.401	96.95	325.116.675	96.97	341.111.304	96.99	350.608.758	97.01	377.638.101	97.06	374.354.081
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya penyuluhan pertanian	Cakupan Kelompok Tani yang aktif	Jumlah kelompok tani aktif DIBAGI jumlah kelompok tani DIKALI 100%	Persen	0,85	2.663.672.000	0,87	2.471.699.515	0,89	827.936.710	0,9	868.668.367	0,9	892.854.426	0,9	961.686.899	0,92	953.323.868
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perlu Review Manual	Meningkatnya kualitas pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Kilogram	6.365.695	1.861.208.000	5.093.807.0	2.071.081.950	5.348.497	5.209.242.712	5.615.922	5.465.519.651	5.896.718	5.617.694.391	6.191.554	6.050.777.082	6.377.301	5.998.158.257
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perlu Review Manual	Meningkatnya kualitas pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kilogram	19.169.100	3.372.929.827	9.203.000.	701.811.500	9.397.000.	2.813.186.974	9.491.000.	2.951.586.159	9.586.000.	3.033.766.241	9.682.000.	3.267.647.182	9.779.000.	3.239.231.037
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan dan kelautan terhadap peraturan	Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh / Jumlah seluruh pelaku usaha yang diawasi X100%	Persen	NA	-	35	-	45	33.740.205	55	35.400.108	65	36.385.742	70	39.190.814	75	38.850.002

			dan perikanan																
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perlu Review Manual	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Kilogram	434.722	1.573.484.800	450.21	13.525.250	467.05	66.369.189	482.04	69.634.326	498.71	71.573.133	515.62	77.090.892	527.09	76.420.494
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatnya PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	JUmlah PSKS perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar DIBAGI Jumlah PSKS perorangan DIKALI 100% (PSM 75, TKSK 20, KArangtaruna 286 , LKS 33)	Persen	84,45	79.324.928	0,8	328.301.947	0,81	757.409.885	0,82	794.671.863	0,82	816.797.661	0,83	879.766.720	0,84	872.116.084
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti DIKALI 100%	Persen	62,35	627.744.392	100	262.350.792	100	282.942.818	100	296.862.637	100	305.128.090	100	328.651.209	100	325.793.189
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentae PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindunga	Jumlah PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dibagi JumlahPPKS	Persen	94,45	8.485.557.250	0,84	9.794.089.600	0,85	5.275.701.578	0,85	5.535.248.066	0,85	5.689.364.232	0,86	6.127.972.138	0,86	6.074.682.008

				n dan jaminan sosial (%)	fakir miskin dan PPKS anak terlantar DIKALI 100%														
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlu Review Manual	Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota (%)	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota DIBAGI Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial DIKALI 100%	Persen	90,08	190.226.000	100	164.212.000	100	140.638.936	100	147.557.891	100	151.666.298	100	163.358.648	100	161.938.047
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perlu Review Manual	meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	jml warga di kawasan rawan bencana yg menerima layanan pencegahan kesiapsiagaan/target yg ditetapkan untuk melaksanakan pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan	Persen	100	2.430.466.000	100	1.214.301.000	100	973.905.019	100	1.021.817.817	100	1.050.267.968	100	1.131.235.861	100	1.121.398.397
		Perlu Review Manual		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(Jumlah kejadian bencana yang ditangani/Jumlah total kejadian bencana) x 100%	Persen	100		100		100		100		100		100		100	
		Perlu Review Manual		Persentase penanganan pasca bencana	(Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n / Jumlah target kegiatan penanganan	Persen	100		100		100		100		100		100		100	

					pascabencana pada dokumen R3P) x 100%															

LAMPIRAN 3 - PETA PRIORITAS WILAYAH

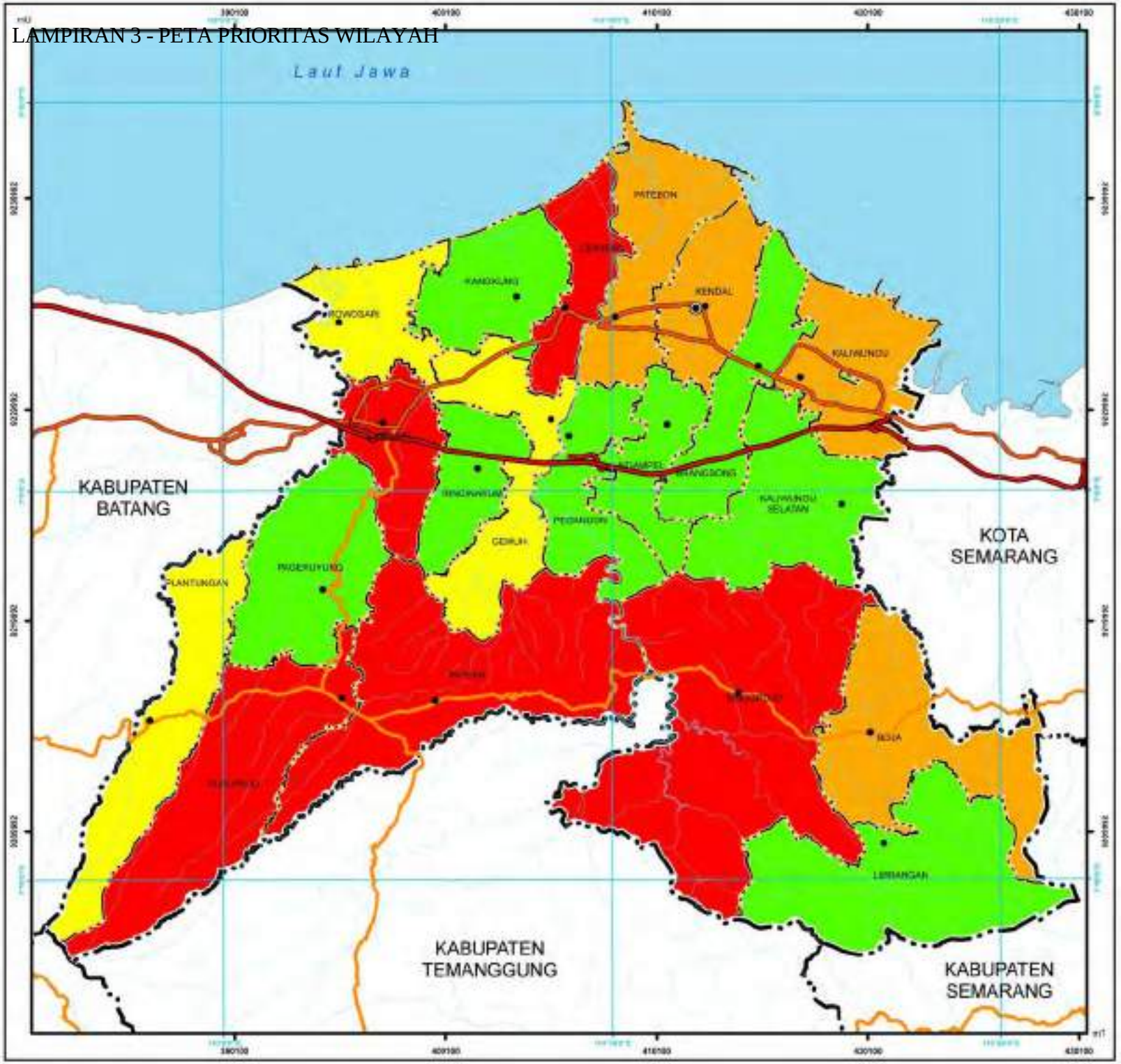

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT

U
B T
S

SKALA 1:250.000

2 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

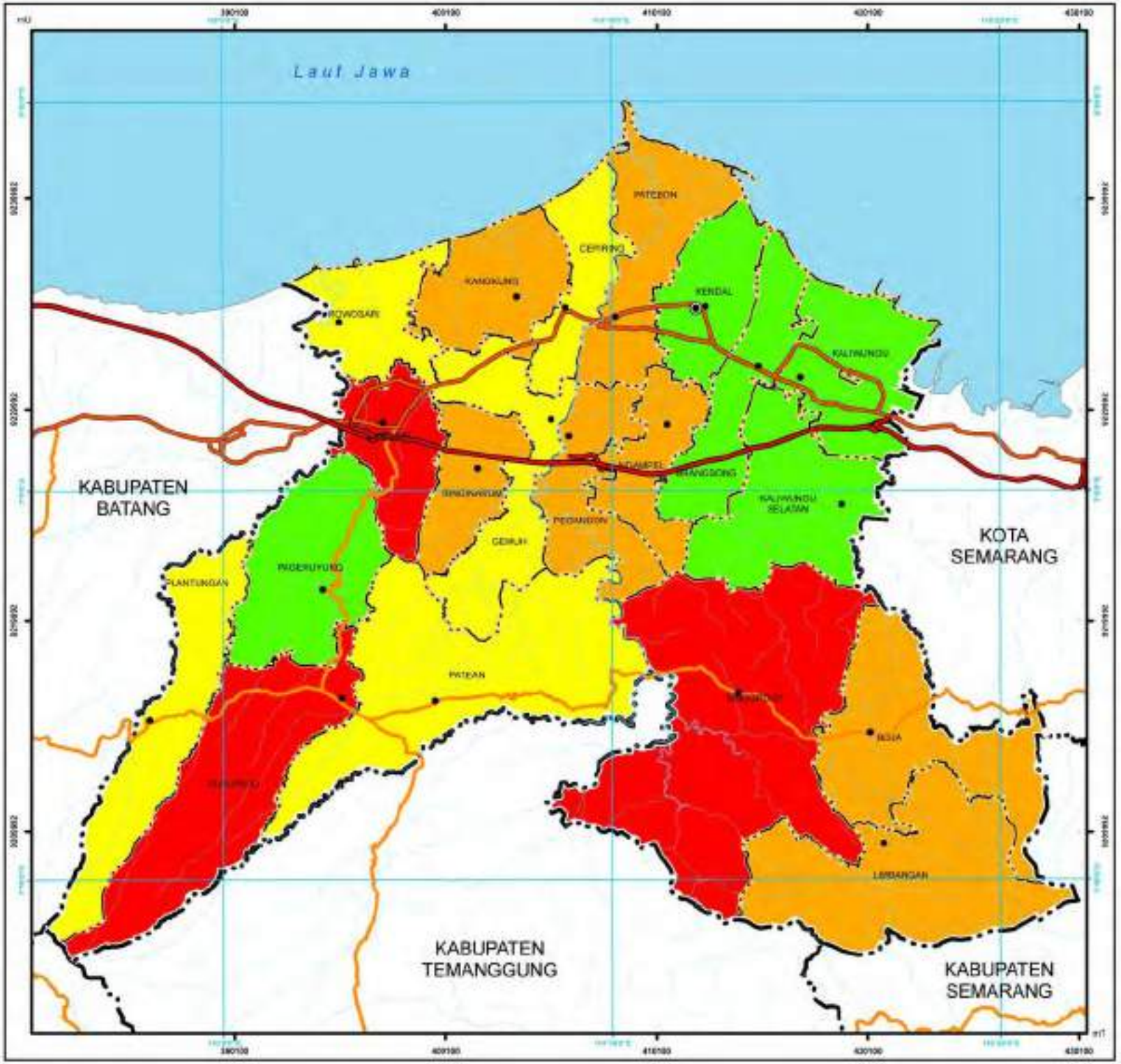

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG KESEHATAN

PREVALENSI STUNTING

U
B T
S

SKALA 1:250.000

2 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

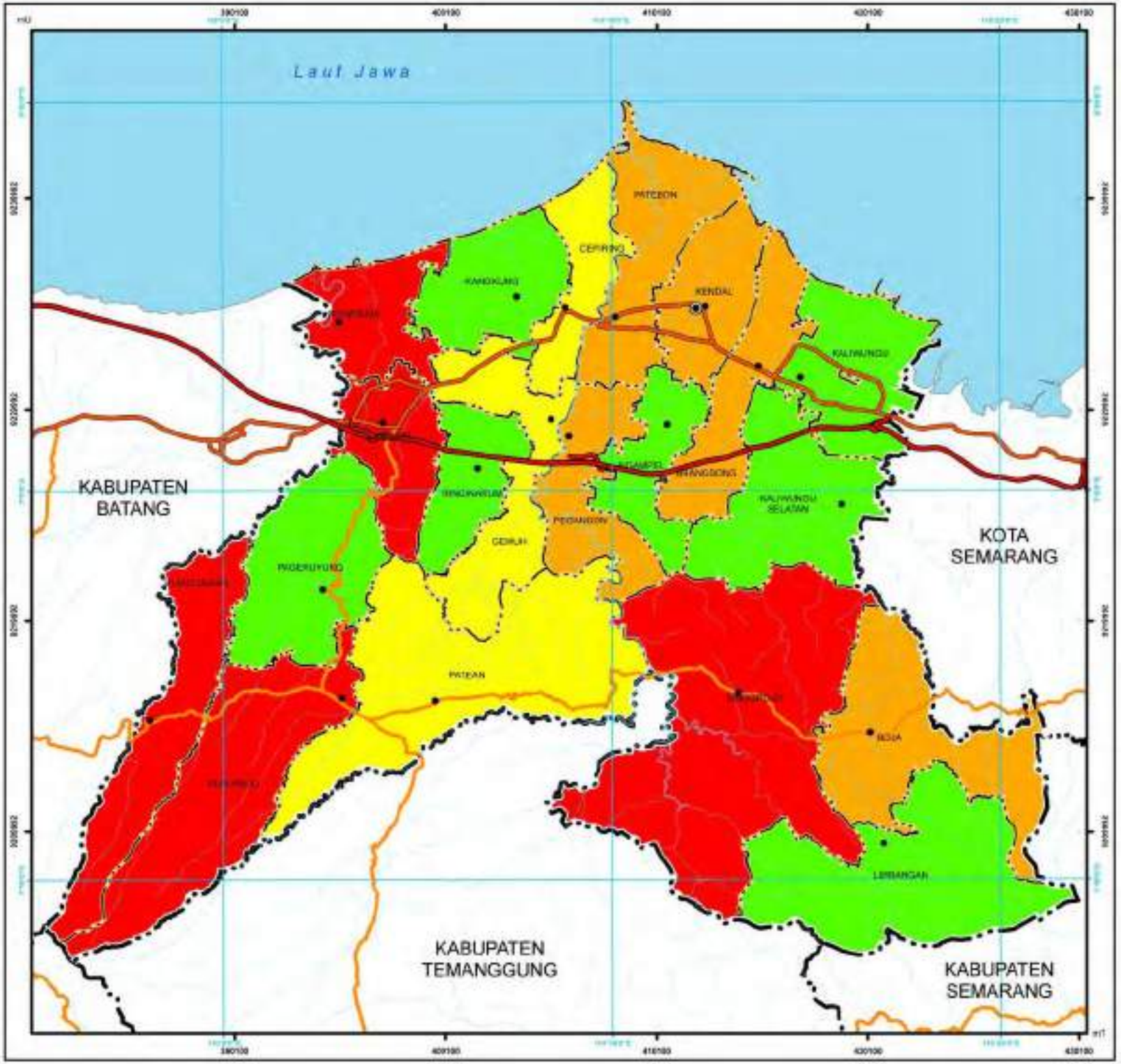

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG KESEHATAN

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

U
B T
S

SKALA 1:250.000

2 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

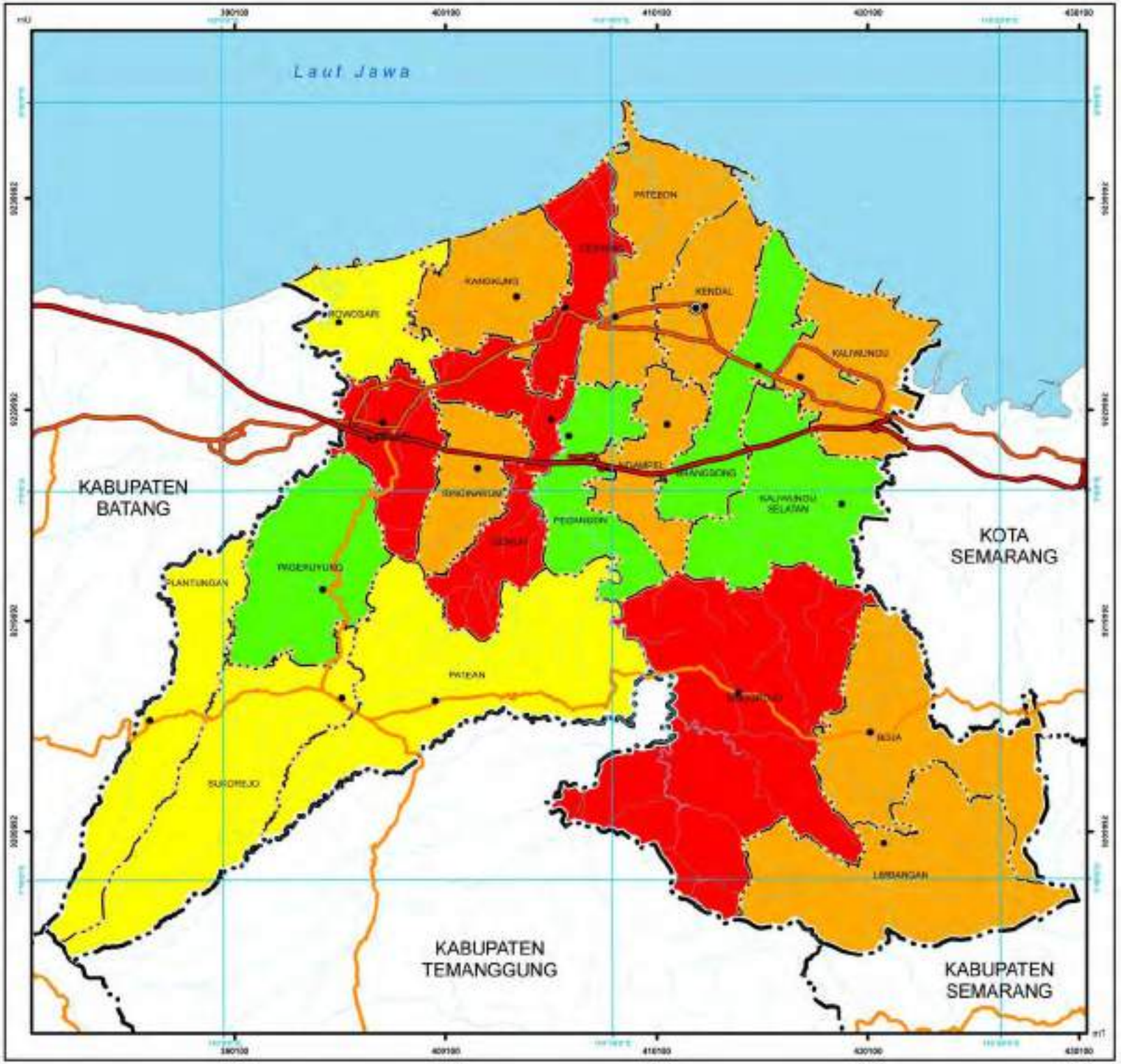

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG KESEHATAN

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

U
B T
S

SKALA 1:250.000

2 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

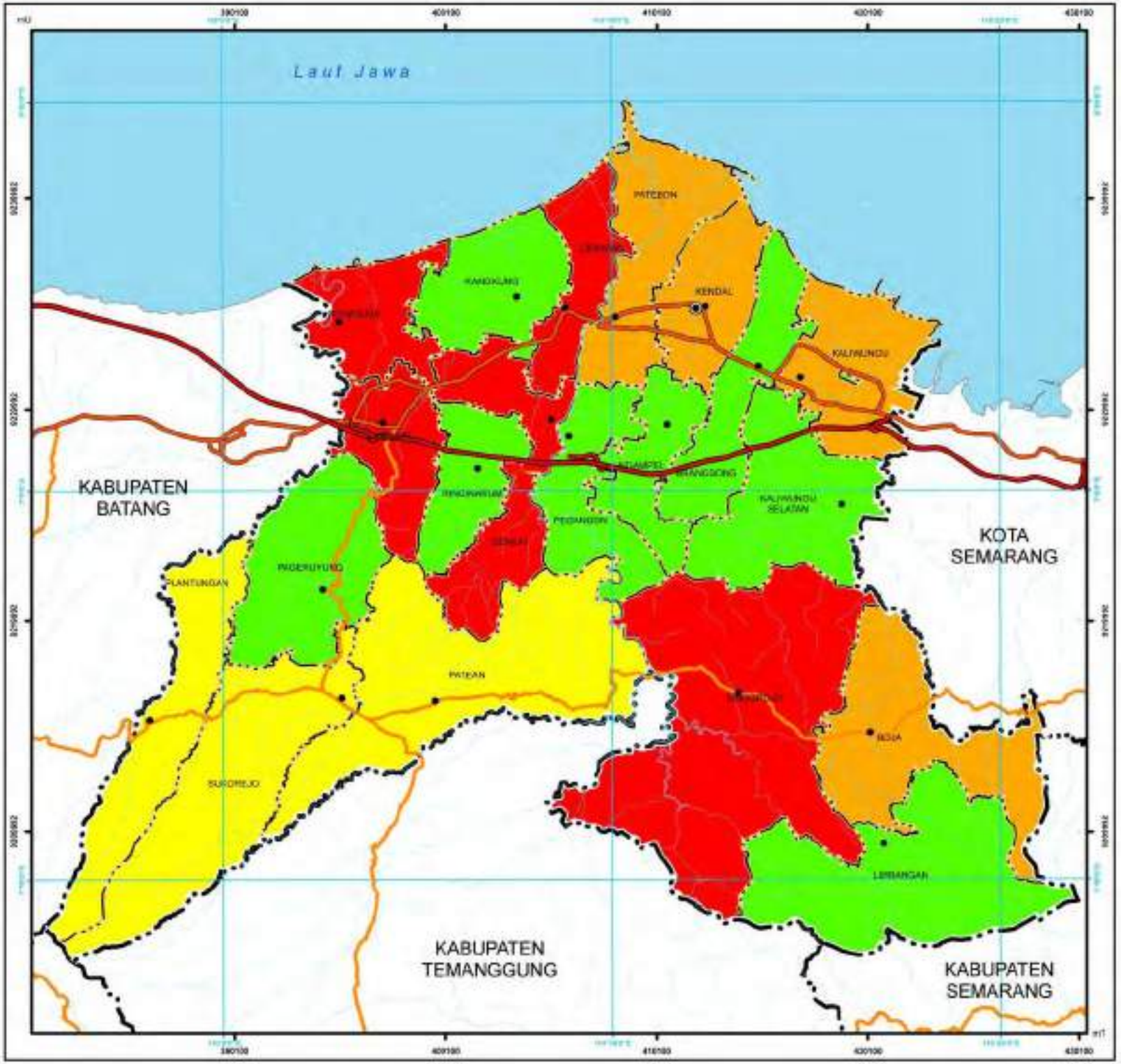

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA

U
B T
S

SKALA 1:250.000

3 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

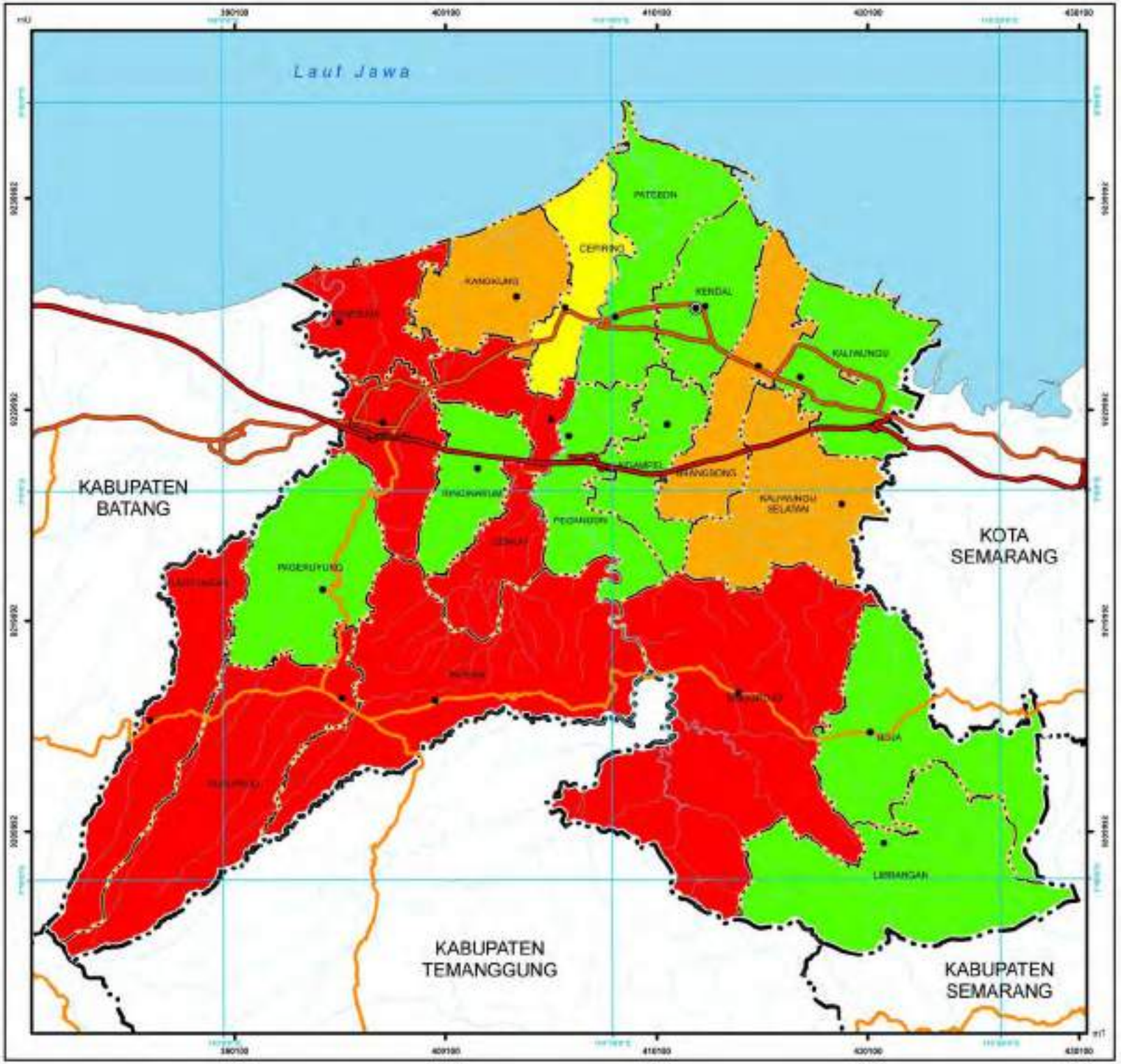

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (UNIT)

U
B T
S

SKALA 1:250.000

3 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

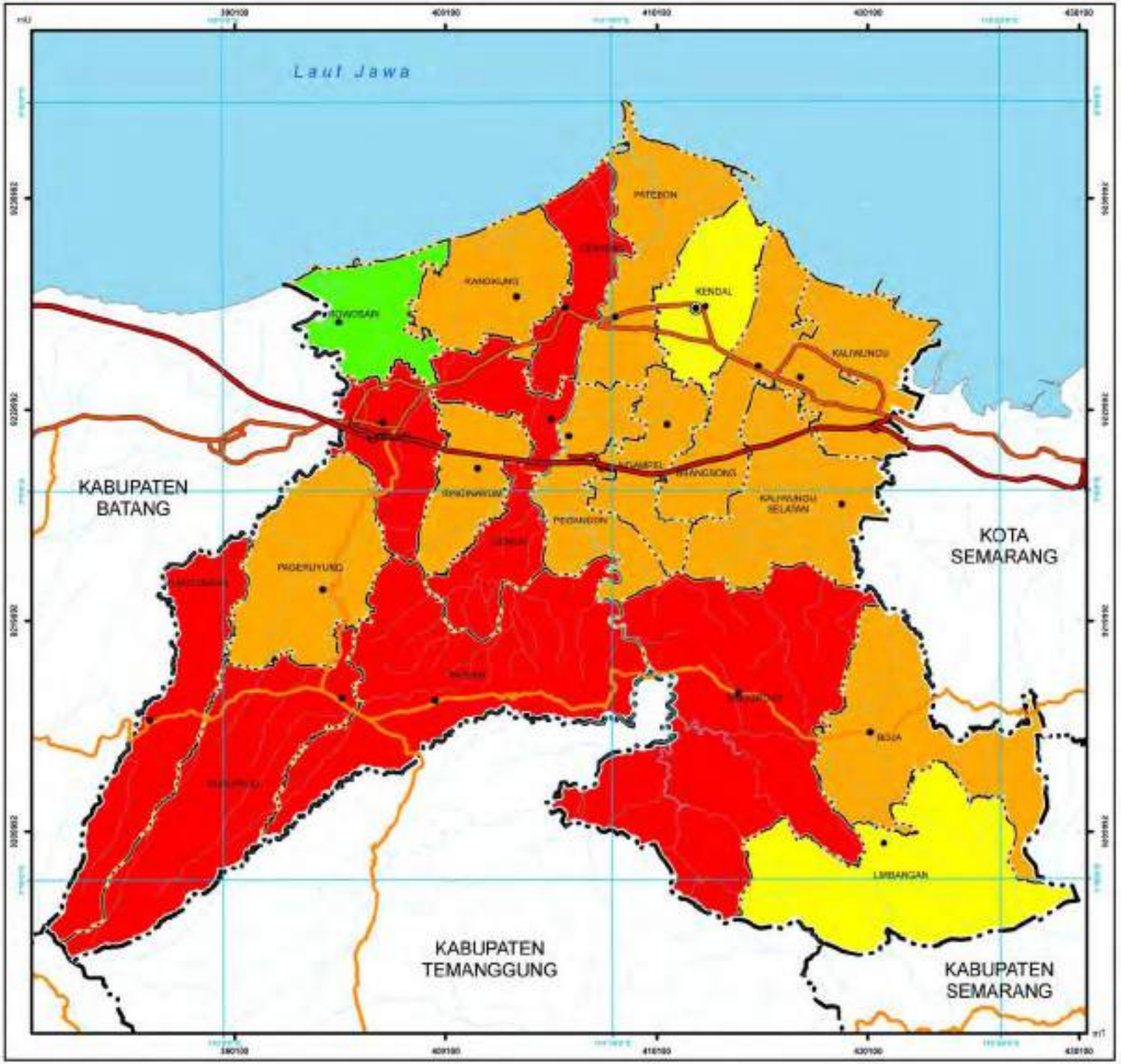

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AIR LAUT DAN AIR TAWAR

U
B T
S

SKALA 1:250.000

2 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

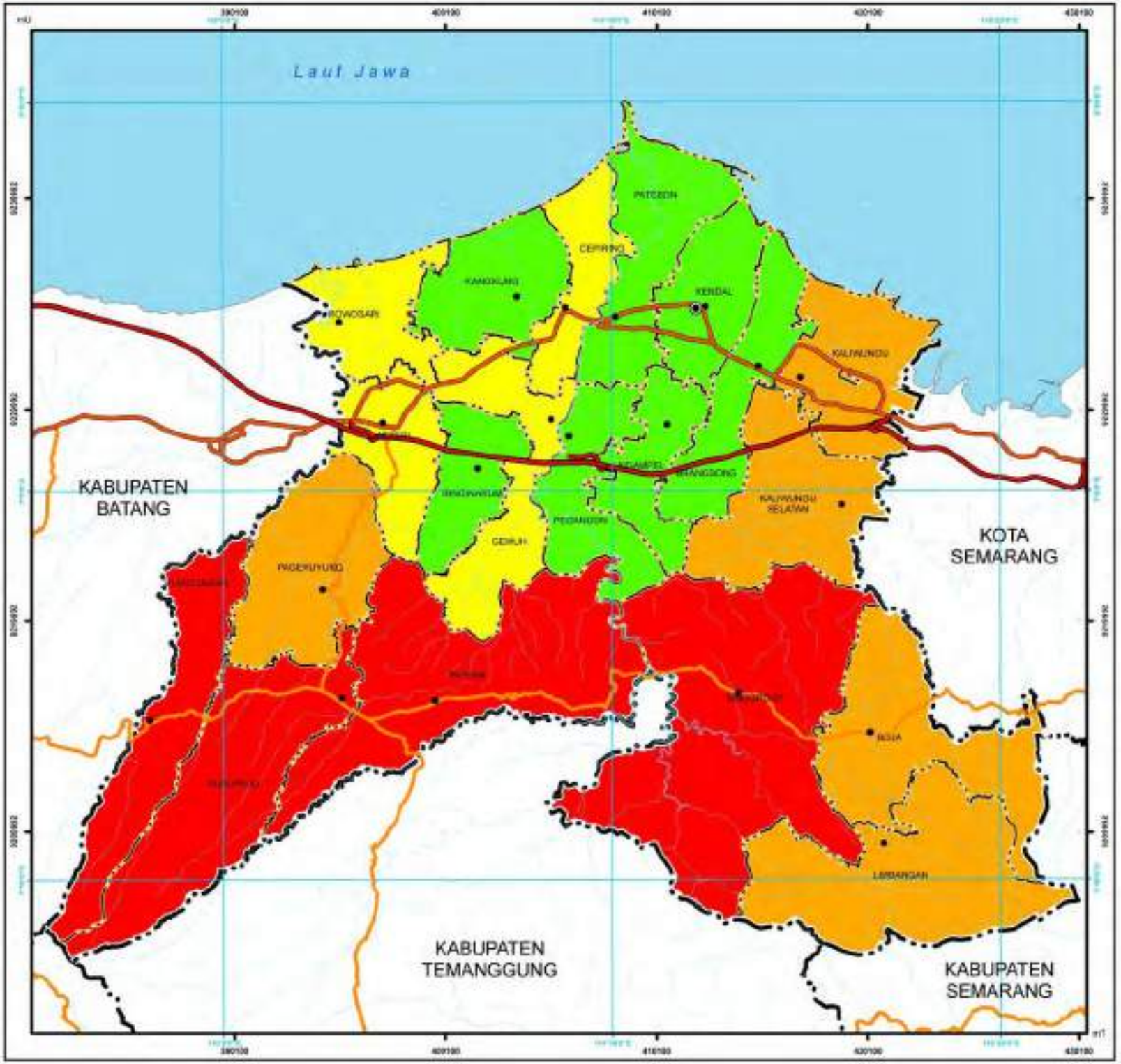

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN

PRODUKTIVITAS PADI SAWAH

U
B T
S

SKALA 1:250.000

2 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

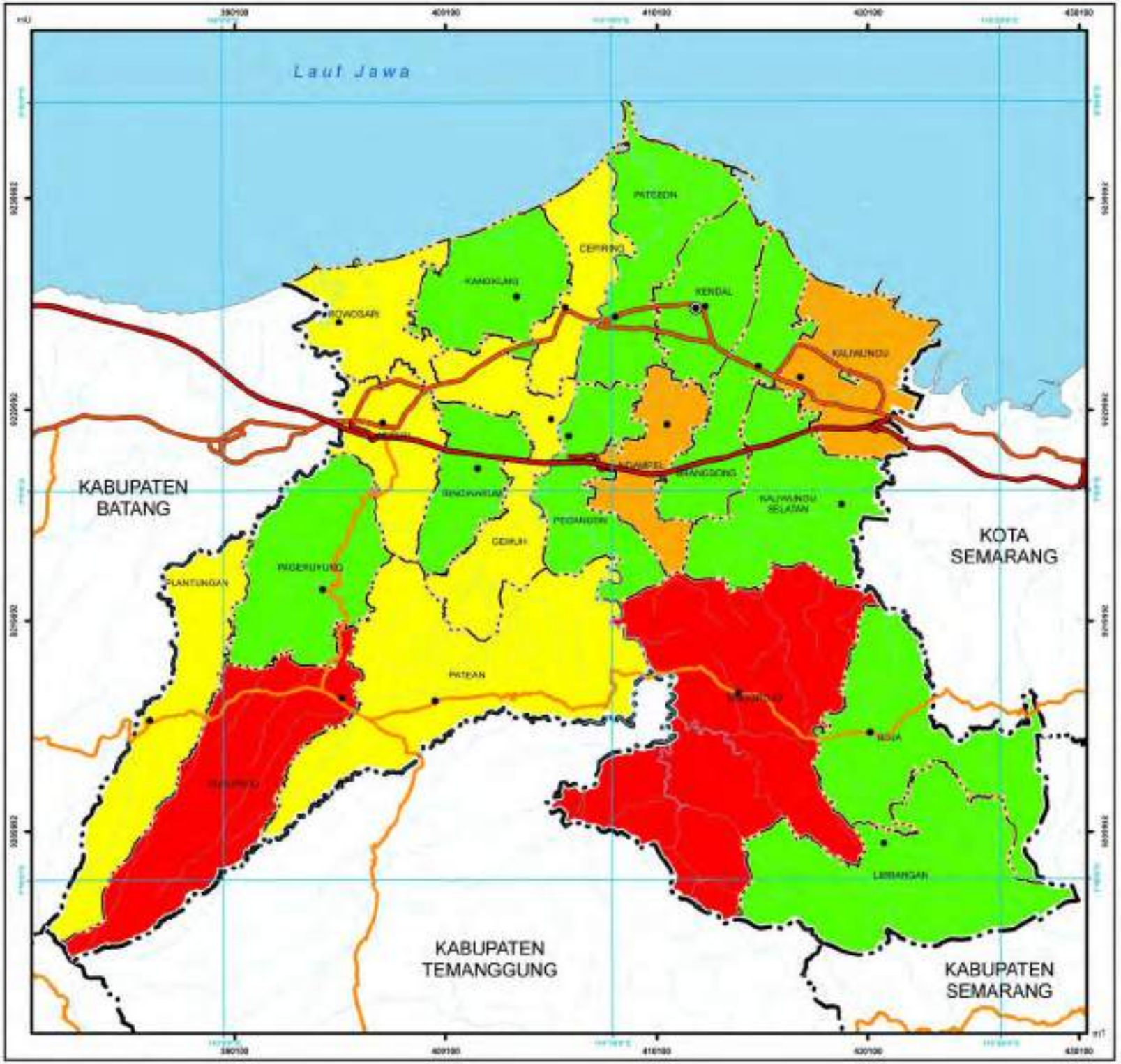

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG KETAHANAN PANGAN

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT FSVA

U
B T
S

SKALA 1:250.000

3 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

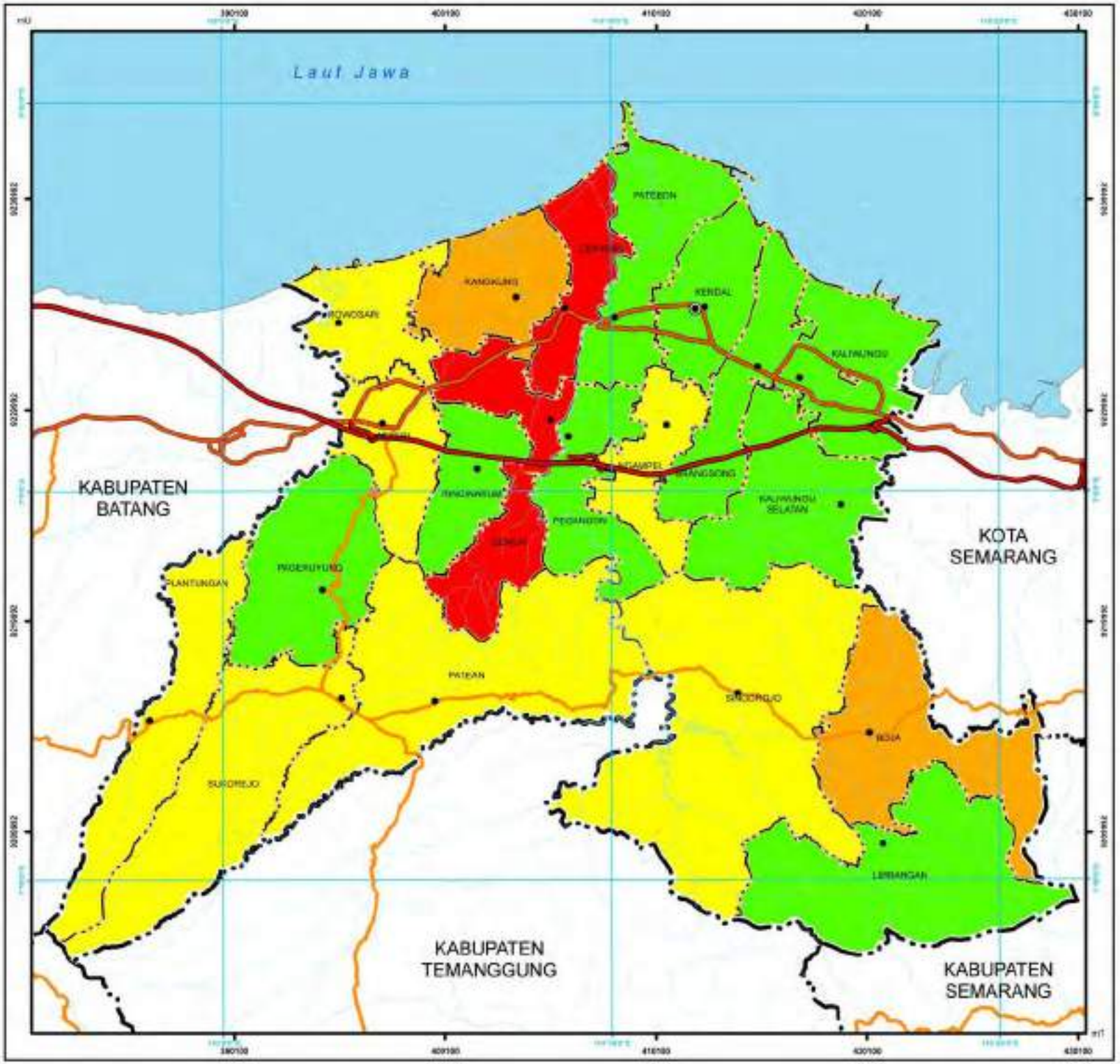

PETA PRIORITAS WILAYAH BIDANG SOSIAL

JUMLAH PENDUDUK PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

U
B T
S

SKALA 1:250.000

2 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

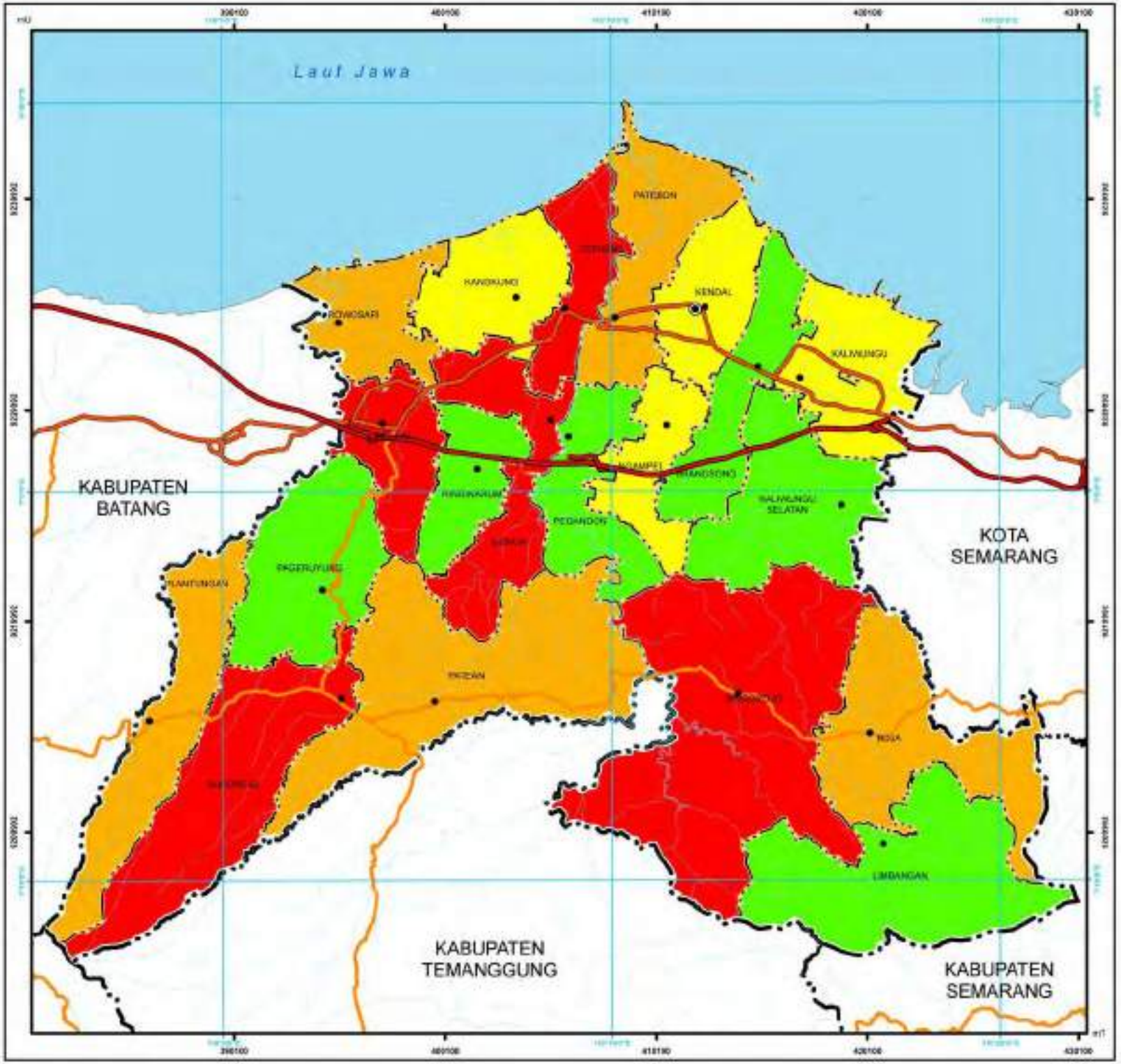

PETA KOMPOSIT PRIORITAS WILAYAH PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

KABUPATEN KENDAL

U
B T
S

SKALA 1:250.000

3 1 0 2 4 6 8 Kilometer

LEGENDA

Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Klasifikasi Prioritas Wilayah Intervensi
- Prioritas Intervensi I
- Prioritas Intervensi II
- Prioritas Intervensi III
- Prioritas Intervensi IV

Sistem Jaringan Sungai dan Perairan
- Sungai
- Laut

SISTEM PROYEKSI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Sistem Proyeksi : WGS 1984 Zone 49S

DATA DAN SUMBER DATA

1. SHP Wilayah Administrasi Indonesia dan SHP Rupa Bumi Kabupaten Kendal- BIG
2. Peta Administrasi Kabupaten Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 - Pemerintah Kabupaten Kendal

INSET

Wilayah Kajian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029. Naskah Penjelasan disusun berdasar latar belakang, masalah, tujuan, dan pokok-pokok pikiran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029.

Naskah penjelasan ini dapat dijadikan referensi dan pertanggungjawaban ilmiah terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029 ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Selain itu, naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029 ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif-solutif sangat kami nantikan.

Kendal, Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan Perencanaan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal

IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19750704 200312 1 003

DAFTAR ISI

JUDUL ……. i

KATA PENGANTAR …….. ii

DAFTAR ISI …… iii

BAB I PENDAHULUAN ……..…… 1

A. Latar Belakang …… 1

B. Identifikasi Masalah …… 3

C. Tujuan Penyusunan …… 3

D. DasarHukum …… 4

BAB II POKOK PIKIRAN …….. 6

A. Kajian Teoritis dan Kondisi Umum …… 6

B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan …… 8

C. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis …… 11

BAB III MATERI MUATAN…… 16

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan…… 16

B. Ruang Lingkup …… 16

BAB IV PENUTUP …… 17

A. Simpulan ……. 17

B. Saran …… 17

DAFTAR PUSTAKA ……... 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Amanat ini menjadi dasar filosofis bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat miskin.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Pergub Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 kemudian menegaskan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi. Kabupaten Kendal sebagai bagian dari Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun Raperbup yang lebih spesifik sesuai kondisi lokal.

Di Kabupaten Kendal, kondisi kemiskinan masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kendal tahun 2023, jumlah penduduk miskin tercatat 92,64 ribu orang atau sekitar 9,39% dari total penduduk. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp465.936 per kapita per bulan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,19 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,25.

Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah absolut penduduk miskin masih cukup besar. Data tahun 2024 bahkan menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 92,71 ribu orang, meskipun persentase kemiskinan turun menjadi 9,35%. Hal ini menggambarkan bahwa penurunan persentase tidak selalu diikuti oleh penurunan jumlah absolut, sehingga kebijakan penanggulangan harus lebih fokus pada keberlanjutan dan efektivitas program.

Kabupaten Kendal juga menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem, yang menjadi prioritas nasional untuk dihapuskan pada 2024 sesuai Instruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kendal bahkan menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Target ambisius ini menuntut adanya strategi terpadu, sinergi antarperangkat daerah, serta dukungan dunia usaha dan masyarakat sipil.

Selain faktor ekonomi, kemiskinan di Kendal juga berkaitan erat dengan aspek sosial. Masih terdapat anak-anak yang putus sekolah, kasus stunting yang cukup tinggi, serta keterbatasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Dengan kondisi tersebut, penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal menjadi sangat penting. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas, berbasis data empiris, serta sesuai dengan amanat konstitusi dan regulasi nasional maupun provinsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa pertanyaan pokok yang perlu dijawab melalui penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal adalah:

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal masih tinggi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur?
2. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar bagi masyarakat miskin?
3. Apa bentuk intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, khususnya di sektor informal dan pertanian tradisional?
4. Bagaimana cara mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama di desa-desa pesisir dan perbukitan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi?
5. Apa kebijakan khusus yang perlu dirancang untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga?
6. Bagaimana mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil agar program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu dan berkelanjutan?

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kendal memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu:

1. Memberikan arah kebijakan yang jelas dan terukur bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sesuai amanat konstitusi, undang-undang, dan regulasi nasional maupun provinsi.
2. Menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah, TKPKD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.
3. Mewujudkan sinergi lintas sektor dan lintas kelembagaan, sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan parsial, melainkan terpadu dan saling mendukung.
4. Menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kendal dengan target nol persen pada tahun 2026, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan layanan dasar lainnya.
6. Melindungi kelompok rentan (anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga) agar tidak semakin terjerumus dalam kemiskinan.
7. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan, sehingga tercipta kemandirian ekonomi.
8. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terukur, sehingga efektivitas program dapat dipantau secara berkala dan dilakukan perbaikan berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat konstitusi, undang-undang, maupun regulasi turunan. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial)
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023–2026
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis dan Kondisi Umum

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Dalam teori pembangunan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun non-pangan.

Menurut pendekatan basic needs yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri dihitung berdasarkan kebutuhan minimum makanan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Selain itu, teori multidimensional poverty menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta partisipasi sosial. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus bersifat komprehensif, melibatkan berbagai sektor, dan tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi semata.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan regulasi yang mendukung pengentasan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kabupaten Kendal memiliki jumlah penduduk sekitar 1,05 juta jiwa dengan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kendal mencapai 92,64 ribu orang atau 9,39% dari total penduduk, dengan garis kemiskinan sebesar Rp465.936 per kapita per bulan.

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah absolut penduduk miskin masih cukup besar. Data tahun 2024 bahkan menunjukkan sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin

menjadi 92,71 ribu orang, meskipun persentase kemiskinan turun menjadi 9,35%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan persentase tidak selalu diikuti oleh penurunan jumlah absolut, sehingga kebijakan penanggulangan harus lebih fokus pada keberlanjutan dan efektivitas program.

Selain itu, Kabupaten Kendal juga menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem, yang menjadi prioritas nasional untuk dihapuskan pada tahun 2024 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kendal menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, sejalan dengan Pergub Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kondisi sosial masyarakat Kendal juga menunjukkan adanya kelompok rentan seperti anak-anak putus sekolah, penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan kepala keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Di sisi lain, ketimpangan antarwilayah masih terlihat jelas, di mana desa-desa di pesisir dan perbukitan memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

Penanggulangan kemiskinan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bahwa setiap kebijakan daerah, termasuk Kabupaten Kendal, wajib mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan demikian, Raperbup Kendal bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan perwujudan dari amanat konstitusi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa kesejahteraan sosial termasuk penanggulangan kemiskinan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Evaluasi terhadap implementasi di daerah menunjukkan bahwa meskipun sudah ada program penanggulangan kemiskinan, koordinasi antarperangkat daerah masih belum optimal. Oleh karena itu, Raperbup Kendal perlu memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai lembaga penggerak utama.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menekankan pentingnya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Analisis terhadap kondisi di Kendal menunjukkan bahwa program bantuan sosial seringkali bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi dasar penting bagi percepatan kebijakan di Kendal. Target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai, sehingga Kabupaten Kendal menetapkan target realistis nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Analisis menunjukkan bahwa pencapaian target ini membutuhkan intervensi prioritas pada sektor perumahan tidak layak huni (RTLH), penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Di tingkat provinsi, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 memberikan kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023–2026. Pergub ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal perlu menyesuaikan program daerah dengan strategi provinsi, sehingga kebijakan lokal tidak berjalan sendiri tetapi menjadi bagian dari gerakan terpadu Jawa Tengah.

C. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum

dasar Negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Landasan filosofis penyusunan Raperbup ini berakar pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara untuk melindungi warganya. Filosofi yang mendasari kebijakan ini adalah keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal didasarkan pada kondisi nyata masyarakat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kendal mencapai 92,64 ribu orang atau 9,39% dari total penduduk, dengan garis kemiskinan sebesar Rp465.936 per kapita per bulan. Angka ini menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan persentase kemiskinan dari tahun ke tahun, jumlah absolut penduduk miskin masih cukup besar dan menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah.

Kondisi sosial masyarakat Kendal juga memperlihatkan adanya kesenjangan antarwilayah. Desa-desa di pesisir dan perbukitan cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan sebagian masyarakat tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan meskipun program bantuan sosial telah dijalankan.

Selain itu, terdapat kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak-anak putus sekolah, penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan kepala keluarga. Kelompok ini seringkali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses layanan dasar maupun peluang ekonomi.

Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin berisiko tinggi mengalami putus sekolah, sementara perempuan kepala keluarga menghadapi keterbatasan akses permodalan dan lapangan kerja.

Masalah sosial lain yang menonjol adalah tingginya angka stunting di beberapa wilayah Kendal, yang menunjukkan adanya keterbatasan gizi dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di Kendal tidak bisa hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial.

Dengan demikian, landasan sosiologis Raperbup ini menekankan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat Kendal. Program yang dirancang harus inklusif, berbasis data empiris, dan mampu menjawab permasalahan sosial yang kompleks, sehingga masyarakat miskin tidak hanya terbantu secara sementara tetapi juga memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis penyusunan Raperbup ini mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah, antara lain:

- UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, serta menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kesejahteraan sosial sebagai urusan wajib pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial), yang memberikan kerangka kebijakan kesejahteraan sosial.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023–2026, yang menjadi acuan langsung bagi Kabupaten Kendal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

  Pasal 4 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penaggulangan kemiskman. **Kebijakan** penanggulangan kemiskinan antara lain meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antara pelaku penanggulangan kemiskinan. Kehadiran Perbup RPKD merupakan salah satu kebijakan strategis karena tidak hanya sebagai pedoman teknis dari Perda, melainkan suatu kebutuhan agar perencanaan penanggulangan kemiskinan lintas instansi marjadi terkoordinir dan terarah.

Dengan landasan yuridis ini, Raperbup Kabupaten Kendal memiliki legitimasi hukum yang jelas, sekaligus memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan regulasi nasional dan provinsi.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah penjelasan adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal 2025-2029 ini memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Kendal dan operasionalisasinya ke segi dokumen perencanaan tahunan, termasuk dokumen penganggaran. Sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan kuat dalam pengaturan perundangan, peraturan kepala daerah ini wajib dipatuhi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menganut asas:

a. efisiensi yang berarti pembentukan tim ditentukan berdasarkan tingkat daya guna;
b. efektivitas yang berarti pembentukan tim harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
c. pembagian habis tugas yang berarti pembentukan tim yang membagi habis tugas dan fungsi kepada semua anggota tim;
d. tata kerja yang jelas yang berarti pelaksanaan tugas dan fungsi tim mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
e. fleksibilitas yang berarti penentuan tugas dan fungsi tim memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan..

Sasaran

Sasaran utama dari Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal adalah menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya diukur dari penurunan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dalam perubahan nyata pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pertama adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026. Target ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023. Kabupaten Kendal harus memastikan bahwa keluarga miskin ekstrem memperoleh intervensi prioritas, seperti bantuan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), akses pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS), serta layanan kesehatan untuk menurunkan angka stunting.

Sasaran kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemiskinan seringkali berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Raperbup ini menargetkan peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan akses layanan kesehatan dasar. Dengan SDM yang lebih berkualitas, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sasaran ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga harus memberikan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan akses permodalan, masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

Sasaran keempat adalah pengurangan ketimpangan antarwilayah. Desa-desa di pesisir dan perbukitan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan harus menjadi prioritas intervensi. Dengan memperkuat pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak, diharapkan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan sehingga pembangunan lebih merata.

Sasaran kelima adalah perlindungan kelompok rentan. Lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga seringkali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses layanan dasar maupun peluang ekonomi. Raperbup ini menargetkan adanya kebijakan inklusif yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan tersebut, sehingga mereka tidak semakin terjerumus dalam kemiskinan.

Dengan sasaran yang jelas dan terukur ini, Raperbup Kabupaten Kendal diharapkan mampu menjadi pedoman operasional yang komprehensif dalam

menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

Jangkauan

Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal memiliki jangkauan yang luas, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat miskin. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar. Dengan cakupan yang komprehensif, diharapkan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Secara wilayah, jangkauan Raperbup ini meliputi seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kendal. Namun, perhatian khusus diberikan pada wilayah pesisir dan perbukitan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Dengan pendekatan berbasis wilayah, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memastikan pembangunan yang lebih merata.

Dari sisi sektor, Raperbup ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan pendekatan multidimensi dalam penanggulangan kemiskinan, di mana kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai masalah pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Dengan cakupan lintas sektor, kebijakan ini diharapkan mampu menjawab berbagai faktor penyebab kemiskinan secara simultan.

Kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah keluarga miskin, masyarakat miskin ekstrem, serta kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga. Dengan memperhatikan kelompok rentan, Raperbup ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Selain itu, jangkauan Raperbup ini juga mencakup aspek kelembagaan. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD Kendal berperan sebagai penggerak utama, dengan dukungan perangkat daerah, dunia usaha,

perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Dengan jangkauan kelembagaan yang luas, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui intervensi multidimensi.

Pertama, arah pengaturan menekankan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Hal ini dilakukan melalui program bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial yang terintegrasi. Dengan adanya intervensi ini, keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan tanpa terbebani biaya yang terlalu besar.

Kedua, arah pengaturan diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penguatan UMKM menjadi prioritas agar masyarakat miskin memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi. Dengan adanya akses permodalan dan pendampingan usaha, diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan produktivitas dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Ketiga, arah pengaturan mencakup penyediaan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses terhadap rumah layak huni, air bersih, sanitasi, listrik, dan layanan kesehatan. Infrastruktur dasar yang memadai akan mendukung peningkatan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, khususnya di desa-desa pesisir dan perbukitan.

Keempat, arah pengaturan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama, dengan target menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS) dan angka stunting. Dengan SDM yang lebih sehat dan berpendidikan, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan.

Kelima, arah pengaturan memperkuat koordinasi kelembagaan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD

berperan sebagai penggerak utama yang mengintegrasikan program lintas sektor, memastikan sinergi antarperangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Arah pengaturan menekankan pada sinergi lintas sektor dan keberlanjutan program. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Program yang dijalankan harus berkelanjutan, tidak hanya memberikan bantuan sesaat tetapi juga menciptakan peluang jangka panjang bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan.

B. Ruang Lingkup

Peraturan Bupati Kendal tentang Tim Percepatan Pembangunan akan mengatur tentang:

1. Wilayah
   a. Seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kendal.
   b. Prioritas pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti daerah pesisir dan perbukitan.
2. Sektor Strategis
   a. Pendidikan: penurunan angka anak tidak sekolah (ATS), peningkatan partisipasi sekolah.
   b. Kesehatan: penurunan angka stunting, peningkatan layanan kesehatan dasar.
   c. Perumahan: perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
   d. Infrastruktur dasar: penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan akses transportasi.
   e. Ekonomi: pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan.
   f. Perlindungan sosial: bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi bagi keluarga miskin.
3. Kelompok Sasaran
   a. Keluarga miskin dan miskin ekstrem.
   b. Kelompok rentan: anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.

4. Kelembagaan dan Koordinasi
    a. Melibatkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal.
    b. TKPKD sebagai koordinator utama penanggulangan kemiskinan.
    c. Dukungan dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
5. Monitoring dan Evaluasi
    a. Setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
    b. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program.
    c. Pelaporan hasil program dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Kemiskinan di Kabupaten Kendal masih menjadi tantangan serius yang bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Meskipun persentase kemiskinan menunjukkan tren penurunan, jumlah absolut penduduk miskin masih besar, dan kemiskinan ekstrem tetap menjadi isu prioritas.

Evaluasi terhadap regulasi nasional dan provinsi menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan memiliki landasan konstitusional, yuridis, dan regulatif yang kuat. UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 13 Tahun 2011, serta Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 60 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk bertindak. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka sebagai bahan masukan tindak lanjut, kami sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan TKPKD, TKPKD Kabupaten Kendal perlu diperkuat sebagai koordinator utama penanggulangan kemiskinan. Mekanisme koordinasi lintas sektor harus diperjelas agar program tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi.
2. Fokus pada kemiskinan ekstrem, Intervensi prioritas harus diarahkan pada keluarga miskin ekstrem melalui program RTLH, penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah (ATS), dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
3. Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, Bantuan sosial perlu dilengkapi dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan akses permodalan. Dengan demikian, masyarakat miskin tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki peluang untuk mandiri.

4. Peningkatan kualitas SDM, Pemerintah daerah harus memastikan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program penurunan angka putus sekolah dan peningkatan layanan kesehatan ibu-anak harus menjadi prioritas.
5. Pembangunan infrastruktur dasar, Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir dan perbukitan, seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak, untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
6. Monitoring dan evaluasi yang terukur, Setiap program penanggulangan kemiskinan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023–2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. (2023). Profil Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2023. Kendal: BPS Kabupaten Kendal.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Data dan Analisis Kemiskinan Jawa Tengah. Semarang: BPS Jawa Tengah.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Pedoman Penanganan Fakir Miskin dan Kelompok Rentan. Jakarta: Kemensos RI.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2021). Strategi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan

---